

## **BAB I. PENDAHULUAN UMUM**

### **1.1. Latar Belakang**

Jagung memiliki peranan strategis dalam sistem pangan nasional Indonesia (Nasikh et al., 2021). Sebagai komoditas pangan utama kedua setelah padi, jagung tidak hanya menjadi sumber karbohidrat penting, tetapi juga berkontribusi besar terhadap ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan petani di berbagai wilayah (Agus et al., 2019). Selain itu, jagung sebagai bahan pangan alternatif ketika terjadi kegagalan panen, menjadikannya komponen penting dalam diversifikasi pangan (Jayadi and Latief, 2023). Namun demikian, keberhasilan peningkatan kesejahteraan petani jagung tidak dapat dilepaskan dari peran kelembagaan petani. Kelembagaan ini berfungsi sebagai wadah aksi kolektif, berbagi pengetahuan, serta mobilisasi sumber daya. Organisasi seperti koperasi, kelompok tani, dan asosiasi pertanian terbukti meningkatkan modal ekonomi dan sosial petani, yang berujung pada produktivitas dan keberlanjutan pertanian yang lebih baik (Addai et al., 2021; Sudrajat, 2020).

Secara teoritis, kelembagaan merupakan komunitas belajar informal berdasarkan praktik bersama anggotanya, keterlibatan sukarela, dan penggunaan sumber daya bersama yang berkembang seiring waktu (Dolinska and D'Aquino, 2016). Kelembagaan sebagai aturan perilaku sosial, dan lebih formal, beberapa batasan yang dibuat untuk hubungan antar manusia, dan mengurangi ketidakpastian perilaku. Ada tiga jenis sistem: aturan formal, aturan informal, dan mekanisme penegakan aturan (Cao et al., 2020). Menurut Uphoff (1986) kelembagaan memiliki struktur dan norma, dimana yang lainnya eksis sebagai sebaran pengaruh terhadap perilaku. Menurut Ostrom (1990), kelembagaan merupakan aturan kerja yang menentukan hak, keputusan, dan prosedur dalam aktivitas kolektif.

Keberadaan kelembagaan dalam masyarakat penting sebagai media pembentuk pola-pola perilaku yang stabil untuk mengatur interaksi antar individu dan kelompok (Ostrom, 1994). Kelembagaan hadir di masyarakat karena kondisi masyarakat dipenuhi oleh berbagai aturan dan perilaku (Bernard and Spielman, 2009). Keberadaan kelembagaan akan memberikan kontribusi bagi kehidupan masyarakat (Beunen et al., 2017). Kelembagaan yang efektif mampu memberikan kontribusi positif pada kehidupan masyarakat, namun dalam praktiknya sering terjadi penyalahgunaan kekuasaan untuk legitimasi akses sumber daya yang tidak seimbang (Michalak, 2022). Oleh karena itu, kelembagaan harus didukung oleh sanksi efektif agar norma dan aturan berjalan sebagaimana mestinya.

Kelembagaan petani dianggap penting karena empat alasan utama, yaitu memfasilitasi aksi bersama untuk mencapai kemajuan sosial ekonomi (Brinkerhoff et al., 1990), membentuk pola interaksi sosial (Ostrom, 1992), meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya (Ostrom, 1992), serta mempengaruhi perilaku individu melalui insentif positif (Ostrom, 1992). Dalam konteks pertanian, kelembagaan petani dapat mendorong efisiensi pemanfaatan sumber daya dan memperkuat posisi petani

dalam adopsi teknologi inovatif (Moore et al., 2021). Kerjasama petani dalam kelembagaan dapat mendorong penggunaan sumberdaya yang lebih efisien. Peran kelembagaan petani memerlukan keterlibatan birokrasi atau organisasi luar masyarakat. Agar peran kelembagaan petani jagung tersebut dapat optimal harus berbasis pada pemanfaatan potensi sumberdaya manusia lokal, sumberdaya institusi lokal, sumberdaya fisik lokal, dan sumberdaya alam yang dimiliki daerah (Taylor and Van Grieken, 2015).

Kelembagaan salah satu kunci utama dalam proses penyelenggaraan pembangunan pertanian karena mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan produksi dan pendapatan, serta kesejahteraan petani. Pengembangan kelembagaan merupakan salah satu komponen pokok pembangunan pertanian dan pedesaan (Al-Kaisi et al., 2015; Mehraban et al., 2021). Berdasarkan Permentan nomor 67 tahun 2016 yang dimaksud dengan kelembagaan petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani, mencakup Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional.

Kelembagaan petani memiliki peran sebagai media dan wahana komunikasi dan pembelajaran petani (Ruhimat, 2021) sehingga dapat menjadi media untuk menyampaikan pendapat (Barrett et al., 2012). Selain itu, kelembagaan petani juga berperan mendorong partisipasi dan kemandirian petani dalam mengadopsi berbagai inovasi teknologi di bidang pertanian (Bachke, 2019; Moore et al., 2021) sehingga dapat meningkatkan produksi (Bernard and Spielman, 2009) dan efisiensi sumber daya yang dimilikinya (Abdul-Rahaman dan Abdulai, 2018; Hadi et al., 2019; Rustinsyah, 2019).

Dalam praktiknya, kelembagaan petani menghadapi tantangan struktural, seperti fragmentasi lahan, yang membatasi skala dan efisiensi produksi (Fauzan et al., 2023). Masalah ini diperparah oleh minimnya infrastruktur pendukung seperti jalan, fasilitas penyimpanan, dan transportasi, yang membatasi akses pasar dan keberlanjutan finansial (Mayo, 2023). Keterbatasan akses terhadap kredit juga menjadi hambatan dalam adopsi teknologi dan praktik pertanian modern (Tayang et al., 2024). Adopsi teknologi digital juga masih rendah, sementara pertanian menuju ke arah pertanian cerdas (*smart farming*). Kesenjangan teknologi ini membatasi potensi kelembagaan petani dalam mengadopsi inovasi yang penting untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing (Rasyid and Ningsih, 2024). Namun di sisi lain, ketika difungsikan secara optimal, kelembagaan petani dapat mendukung peningkatan efisiensi melalui pelatihan dan transfer teknologi (Ma et al., 2023; Zhang and Wu, 2023; Chen et al., 2022).

Efisiensi kelembagaan petani juga tercermin dari praktik budidaya yang diperkenalkan, seperti penggunaan varietas unggul atau teknik budidaya maju. Struktur organisasi mendukung kekuatan tawar kolektif yang dapat meningkatkan akses pasar dan harga jual (Syafuruddin et al., 2023; Noor et al., 2020). Selain itu, lembaga tani juga memfasilitasi akses kredit dan input pertanian yang diperlukan untuk modernisasi pertanian (Ao et al., 2021; Zhang and Chen, 2022). Peran

kelembagaan tidak hanya teknis, tetapi juga sosial. Mereka mendorong modal sosial di komunitas pedesaan melalui jaringan pertolongan dan budaya inovasi (Cheng et al., 2022; Iqbal and Abbas, 2022). Pembelajaran antarpetani dalam wadah kelembagaan mempercepat adopsi teknologi dan praktik terbaik (Fuady et al., 2021; Kuan et al., 2021). Struktur kelembagaan juga memberikan skala ekonomi yang memungkinkan efisiensi biaya input dan logistik (Wang et al., 2020), serta memperkuat posisi tawar petani dalam penetapan harga (Masanja et al., 2023). Namun demikian, efektivitas kelembagaan bergantung pada tata kelola, keterlibatan anggota, serta akses terhadap pelatihan dan sumber daya. Kelembagaan yang partisipatif dan memiliki sistem tata kelola yang baik cenderung lebih mampu mendorong adopsi inovasi (Stevens et al., 2021). Sebaliknya, jika dukungan pemerintahan lokal dan pelatihan terbatas, efektivitas lembaga ini menjadi terhambat (Aruna et al., 2023).

Tantangan budaya juga menjadi penghambat efektivitas kelembagaan. Banyak petani yang masih enggan mengubah pola budidaya karena kuatnya keyakinan terhadap metode tradisional (Jayme and Lee, 2024). Selain itu, dinamika sosial seperti ketimpangan status sosial dan tingkat pendidikan menciptakan ketimpangan dalam pengambilan keputusan kelembagaan (Lubaale et al., 2024). Hambatan komunikasi karena perbedaan bahasa dan latar belakang etnis juga menjadi faktor penghambat dalam diseminasi informasi (Islam et al., 2023). Sikap skeptis terhadap kelembagaan juga muncul jika manfaatnya tidak langsung terlihat. Ketidakpercayaan ini memicu siklus tidak partisipatif yang melemahkan kapasitas organisasi (Chen, 2024). Aspek gender juga masih menjadi tantangan, di mana perempuan sering kali tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, mengakibatkan ketimpangan akses terhadap teknologi dan pengetahuan (Parreño, 2023).

Kabupaten Jeneponto sebagai sentra pengembangan jagung di Indonesia memiliki potensi strategis yang signifikan dalam pengembangan komoditas ini. Pada tahun 2021, luas lahan jagung mencapai 72.737,30 ha dengan produksi sebanyak 485.078,11 ton dan produktivitas sebesar 7,45 ton/ha. Perlunya dukungan kelembagaan yang kuat dalam pengembangan komoditas jagung di Kabupaten Jeneponto, karena kelembagaan petani mempunyai peran strategis pada hampir setiap tahapan usahatani jagung, mulai dari pengelolaan faktor-faktor produksi, proses produksi, pemanenan, pasca-panen, dan pemasaran hasil (Santoso and Darwanto, 2015). Namun demikian, kelembagaan petani di wilayah ini belum optimal karena kurangnya partisipasi aktif petani, minimnya pengetahuan tentang manajemen produksi dan jaringan pemasaran, serta kecenderungan hanya menjadi penerima bantuan pemerintah secara pasif (Verhofstadt dan Maertens, 2014; Nasikh et al., 2021). Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan kelembagaan petani yang efektif di Kabupaten Jeneponto, agar dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh petani jagung dan meningkatkan efisiensi serta kesejahteraan petani secara berkelanjutan (Bulkis et al., 2020; Arsyad et al., 2021).

Permasalahan yang terdapat dalam kelembagaan petani di Kabupaten Jeneponto adalah fungsi kelembagaan petani sebagai wadah organisasi petani belum berjalan secara optimal; masih minimnya wawasan dan pengetahuan petani terhadap masalah manajemen produksi maupun jaringan pemasaran (Verhofsdad and Meertens, 2014); belum terlibatnya secara utuh petani dalam kegiatan agribisnis (Nasikh et al., 2021), aktivitas petani masih terfokus pada kegiatan produksi (*on farm*) sehingga posisi tawar petani lemah (Ruhimat, 2021). Keberadaan kelembagaan petani tidak lagi dibentuk atas inisiatif petani dalam memperkuat diri, melainkan kebanyakan respon dari program-program pemerintah yang mengharuskan petani berkelompok (Teguh et al., 2022). Kelembagaan petani hanya diposisikan sebagai alat untuk mengimplementasikan proyek (Pillaca and Chavez, 2017). Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kelembagaan petani jagung agar kelembagaan bisa berperan dalam mengatasi berbagai permasalahan petani jagung yang semakin kompleks (Hadi, 2019).

Kelembagaan menjadi fondasi penting yang harus diperkuat untuk mencapai efektivitas pengelolaan usahatani. Brinkerhoff and Goldsmith (1992) mengemukakan bahwa faktor-faktor kelembagaan memegang peranan penting dalam pengelolaan yang bergantung pada kekuatan dan kualitas kelembagaan yang mampu mempengaruhi perilaku masyarakat, dan mendorong untuk melaksanakan kegiatan secara efektif. Penguatan kelembagaan harus dilakukan oleh petani dalam meningkatkan dinamika, kemandirian, dan kinerja kelembagaan petani dalam sebuah usahatani. Selain itu, penguatan kelembagaan petani sangat diperlukan untuk meningkatkan posisi tawar dan daya saing kelompok terhadap pihak eksternal (Mananganta et al., 2019). Penguatan kelembagaan petani dapat menjamin adanya kontinuitas atau kesinambungan pada usaha penyebaran pengetahuan teknis atau teknologi kepada petani dan menyiapkan petani agar mampu bersaing dalam struktur ekonomi yang lebih terbuka.

Empat kriteria agar kelembagaan petani kuat dan mampu berperan aktif dalam memperjuangkan hak-haknya, yaitu: (i) kelembagaan harus tumbuh dari pemikiran petani sendiri; (ii) pengurusnya berasal dari para petani dan dipilih secara berkala; (iii) memiliki kekuatan kelembagaan formal; dan (iv) bersifat partisipatif. Manfaat utama terbentuknya kelembagaan petani adalah untuk mewadahi kebutuhan salah satu sisi kehidupan sosial masyarakat dan sebagai kontrol sosial, sehingga setiap orang dapat mengatur perilakunya menurut kehendak masyarakat (Elizabeth, 2016, Johan et al., 2022, Nguyen et al., 2021).

Berbagai upaya penguatan kelembagaan petani telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia guna meningkatkan taraf hidup petani dan produktivitas pertanian. Upaya ini mencakup penguatan kelembagaan petani dari desa hingga nasional agar menjadi lembaga berbasis profit dan ekonomi yang efektif (Rwamigisa et al., 2018). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan peran kelembagaan dalam menunjang petani melaksanakan usaha taninya secara lebih efektif dan efisien berskala komersil mulai dari penyediaan input produksi, pemeliharaan sampai pascapanen (Wedajo et al., 2019). Melalui peran *stakeholder* yang terlibat di dalam kelembagaan, baik pemerintah ataupun swasta berusaha membantu kelembagaan

petani agar bisa mengoptimalkan penghasilan maupun kesejahteraan petani (Haryanto et al., 2019).

Beberapa lembaga pemerintah dan non-pemerintah secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam kegiatan implementasi, pembuatan kebijakan, pemantauan dan penegakan yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan (Haldar et al., 2021). Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan pengetahuan lokal dan kebijakan tingkat nasional (McNamara and Buggy, 2017; Michalak, 2020). Kebijakan pemerintah dapat berperan dalam mengatasi beberapa masalah yang dihadapi oleh petani (Wheeler and Lobley, 2021). Dukungan penyuluhan, penelitian, peran eksternal, dinamika kelompok, dan partisipasi petani juga berperan dalam kelembagaan petani (Anantanyu, 2011).

Hasil penelitian Anang et al. (2020) menyimpulkan bahwa penguatan kelembagaan petani dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran penyuluh dalam melakukan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kepada kelembagaan petani yang berhubungan dengan aspek manajemen dan kepemimpinan kelembagaan petani. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Santoso and Darwanto (2015) yang menyebutkan bahwa optimalisasi peran pemerintah merupakan salah satu usaha yang harus diprioritaskan dalam penguatan kelembagaan kelompok tani. Salah satu usaha yang dapat dilakukan pemerintah (pusat dan daerah) untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan petani adalah mendorong terjadinya peningkatan kedinamisan dan partisipasi anggota dalam kelembagaan petani (Ruhimat, 2015).

Salah satu elemen penting dalam kelembagaan petani adalah keterlibatan petani, karenanya diperlukan partisipasi petani dalam penguatan kelembagaan (Barret et al., 2012; Taylor et al., 2015). Oleh karena itu perlu dilihat tingkat partisipasi dan bentuk partisipasi petani dalam tahap perencanaan, pelaksanaan serta tingkat partisipasi petani dalam evaluasi program (Methamontri et al., 2022). Penguatan kelembagaan juga membutuhkan dukungan dari institusi lain agar kelembagaan mampu berperan dalam mendorong petani mencapai kemandirian dan keberdayaan (Kruseman et al., 2020).

Strategi penguatan kelembagaan dapat dilakukan dengan melakukan perbaikan terhadap aspek-aspek kelembagaan (Hanna and Wallace, 2022). Kelembagaan petani yang efektif diharapkan mampu memberi kontribusi yang nyata dalam meningkatkan kemandirian petani (Anantanyu, 2011). Kunci keberhasilan kelembagaan yaitu, adanya niat, kemauan, partisipasi, serta kerjasama yg baik dalam menggerakkan sistem usahatani (Clark et al., 2021; Eriksen et al., 2018; Kiptot dan Franzel, 2019; Wedajo et al., 2019). Dengan demikian penguatan kelembagaan akan berkontribusi dalam mendorong kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan petani jagung (Boakye et al., 2021; Montalbano et al., 2018). Kesejahteraan di sini berkaitan erat dengan kebutuhan dasar individu atau keluarga berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya (Bizikova et al., 2020; Skobelev et al., 2019).

Hasil penelitian sebelumnya mengkaji penguatan kelembagaan petani dari salah satu faktor saja, baik internal maupun eksternal kelembagaan petani (Sumane et al., 2018). Padahal, dalam perumusan strategi mempertimbangkan faktor eksternal dan internal kelembagaan petani untuk menghasilkan strategi prioritas yang bersifat komprehensif (Prasetya et al., 2015). Selain itu, hasil penelitian tersebut hanya ditujukan pada program yang harus dilakukan stakeholder di luar kelembagaan petani (pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, penyuluh, dan sebagainya) dalam penguatan kelembagaan petani (Agus et al., 2019, Cao et al., 2020). Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang bersifat komprehensif (mempertimbangkan faktor internal dan eksternal) dalam merumuskan dan menghasilkan strategi prioritas penguatan kelembagaan petani yang dapat digunakan oleh kelembagaan petani dan pihak di luar kelembagaan petani (Dolinska and D'Aguino, 2016, Haidar et al., 2021).

Kelembagaan yang kuat memberikan dampak bagi keberlanjutan kelembagaan. Terdapat tiga elemen mendasar untuk pembangunan dan keberlanjutan, yaitu sumberdaya (*resources*), organisasi (*organizations*) dan norma (*norms*) (Sharma dan Ohama 2007). Organisasi adalah pelaku yang mengelola sejumlah sumberdaya berdasarkan norma-norma tertentu. Organisasi dimaksud terbentuk sebagai hasil konfigurasi tiga sistem yang ada yakni (1) administrasi desa (misal: organisasi pemerintahan), (2) pasar desa (misal: organisasi produsen) dan (3) masyarakat desa. Norma adalah peraturan dan ketentuan yang mengatur masyarakat (Ohama, 2001). Pengembangan dan keberlanjutan proyek dan seluruh masyarakat bergantung pada aturan dan regulasi yang kuat (Ohama, 2001). Sumber daya terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya fisik seperti tanah, hutan, badan air, dan sumber daya keuangan (Ohama, 2001).

Dukungan sumberdaya, kelengkapan struktur organisasi dan aturan main belum menjamin kelembagaan dapat berjalan dan berkembang, terdapat faktor internal, eksternal dan kemampuan pengelola dalam memilih strategi yang dijalankan (Wheeler and Lobley, 2021). Keberhasilan suatu kelembagaan sangat ditentukan oleh strategi yang dijalankan dalam kelembagaan tersebut (Vanger and Nwosu, 2020). Keberlanjutan kelembagaan ditentukan oleh kemampuan lembaga dalam berinteraksi dengan lingkungannya, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal (McNamara and Buggy, 2017). Dari hasil interaksi tersebut menggambarkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, kemudian menyusun strategi-strategi yang akan dijalankan oleh kelembagaan (Clark et al., 2021). Sedangkan kinerja kelembagaan dapat diukur dari output dari lembaga tersebut yaitu sejauhmana kelembagaan tersebut mengelola sumberdaya yang dimiliki untuk menghasilkan output (Beunen et al., 2017). Oleh karena itu, penting dilakukan kajian mendalam untuk merumuskan strategi penguatan kelembagaan petani jagung yang tidak hanya mempertimbangkan faktor internal seperti kapasitas sumber daya manusia dan struktur organisasi, tetapi juga dukungan eksternal dari stakeholder pemerintah, swasta, dan organisasi sosial. Pendekatan yang holistik dan terintegrasi sangat diperlukan untuk memastikan kelembagaan petani di Jeneponto dapat

berperan aktif dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

## 1.2. Rumusan Masalah

Pengembangan kelembagaan petani jagung di Kabupaten Jeneponto selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal meskipun telah banyak upaya dilakukan oleh berbagai pihak. Berbagai kajian mengungkapkan bahwa fungsi kelembagaan petani sebagai wadah organisasi petani masih sangat terbatas (Yuniati, 2017). Keterbatasan ini muncul terutama karena minimnya kesadaran dan pemahaman petani terkait manfaat nyata dari kelembagaan tersebut, khususnya dalam aspek manajemen produksi, pemasaran, dan pengelolaan pascapanen. Kondisi tersebut juga disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar pengurus dan anggota, serta rendahnya partisipasi aktif petani yang berdampak pada lemahnya posisi tawar mereka dalam rantai nilai produk jagung (Verhofstadt dan Maertens, 2014; Nasikh et al., 2021). Petani seringkali hanya memanfaatkan kelembagaan sebagai media untuk memperoleh bantuan dari pemerintah tanpa berupaya secara mandiri untuk memperkuat kelembagaan mereka sendiri (Bernard et al., 2008; Gani et al., 2022).

Permasalahan selanjutnya adalah rendahnya keterlibatan petani secara aktif dalam kegiatan agribisnis yang bersifat komprehensif. Mayoritas petani di Jeneponto masih sangat fokus pada aktivitas on-farm atau produksi saja, tanpa memperhatikan aspek off-farm seperti pemasaran, nilai tambah produk, dan kegiatan ekonomi lainnya yang bisa memperkuat posisi ekonomi petani secara keseluruhan (Ruhimat, 2021). Akibatnya, petani seringkali berada dalam posisi tawar yang lemah di hadapan pedagang perantara maupun pasar. Pola pikir petani yang masih sangat tergantung pada bantuan pemerintah juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan kelembagaan yang mandiri dan berkelanjutan. Fenomena ini secara langsung berdampak pada rendahnya tingkat inovasi dan adaptasi terhadap teknologi baru yang ditujukan untuk peningkatan produktivitas serta efisiensi pengelolaan usahatani jagung (Triguna et al., 2022; Johan et al., 2022).

Faktor internal dan eksternal turut berkontribusi dalam permasalahan kelembagaan ini. Secara internal, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia berupa rendahnya pengetahuan teknis, keterampilan manajerial, dan minimnya partisipasi aktif menjadi hambatan utama dalam memperkuat kelembagaan. Di sisi lain, faktor eksternal seperti keterbatasan akses terhadap informasi, teknologi, serta dukungan stakeholder yang kurang sinergis antara sektor publik, swasta, dan organisasi sosial juga mempersulit penguatan kelembagaan petani secara efektif (Haldar et al., 2021; Wheeler dan Loble, 2021). Dengan demikian, permasalahan-permasalahan ini memerlukan pendekatan holistik dan sistematis yang mampu merumuskan strategi komprehensif berdasarkan pemetaan peran stakeholder, tingkat partisipasi petani, serta evaluasi internal dan eksternal kelembagaan secara menyeluruh untuk mendukung penguatan kelembagaan petani jagung di Kabupaten

Jeneponto. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka beberapa pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian ini:

1. Bagaimana pemetaan *stakeholder* berdasarkan pengaruh dan kepentingannya dalam penguatan kelembagaan petani jagung di Kabupaten Jeneponto?
2. Bagaimana faktor karakteristik petani, dukungan lingkungan eksternal, kebutuhan petani, kualitas penyuluhan pertanian, kedinamisan kelembagaan petani memengaruhi partisipasi petani dan penguatan kelembagaan petani jagung di Kabupaten Jeneponto?
3. Bagaimana strategi penguatan kelembagaan petani jagung di Kabupaten Jeneponto?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka ditetapkan tujuan dari penelitian ini yang hendak dicapai, antara lain:

1. Mengidentifikasi dan memetakan *stakeholder* berdasarkan pengaruh dan kepentingannya dalam upaya penguatan kelembagaan petani jagung di Kabupaten Jeneponto.
2. Menganalisis pengaruh faktor karakteristik petani, dukungan lingkungan eksternal, kebutuhan petani, kualitas penyuluhan pertanian, kedinamisan kelembagaan petani memengaruhi partisipasi petani dan penguatan kelembagaan petani jagung di Kabupaten Jeneponto
3. Merumuskan strategi prioritas yang komprehensif dengan mempertimbangkan faktor internal (kapasitas sumber daya manusia, struktur organisasi, dan norma yang berlaku) dan eksternal (peran stakeholder publik, swasta, dan organisasi sosial) dalam penguatan kelembagaan petani. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kelembagaan dalam mendukung pengembangan usahatani jagung yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan di Kabupaten Jeneponto.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam konteks penguatan kelembagaan tani jagung di Kabupaten Jeneponto.

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini akan menjadi tambahan literatur ilmiah yang relevan dalam bidang penguatan kelembagaan pertanian, khususnya yang berhubungan dengan peran stakeholder dan partisipasi petani dalam konteks pengembangan komoditas jagung. Hasil penelitian juga diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian lanjutan yang berkaitan dengan pengembangan kelembagaan pertanian secara lebih luas dan mendalam.
2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam perumusan kebijakan serta pengambilan keputusan untuk memperkuat

kelembagaan petani jagung, terutama dalam aspek pemberdayaan petani dan optimalisasi peran stakeholder. Selain itu, bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam pengajaran maupun penelitian lanjutan tentang strategi penguatan kelembagaan pertanian. Bagi petani dan masyarakat setempat, penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih baik mengenai pentingnya penguatan kelembagaan petani sebagai sarana meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan petani. Diharapkan hasil penelitian ini akan mampu mendorong partisipasi aktif petani dalam berbagai kegiatan kelembagaan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peran penting kelembagaan dalam mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan di Kabupaten Jeneponto.

### **1.5. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada penguatan kelembagaan petani jagung di Kabupaten Jeneponto, yang merupakan salah satu sentra produksi jagung strategis di Provinsi Sulawesi Selatan. Fokus kajian mencakup identifikasi peran stakeholder, baik dari sektor publik (pemerintah dan penyuluh pertanian), sektor swasta (perusahaan dan pelaku usaha agribisnis), maupun sektor sosial (organisasi masyarakat dan komunitas lokal), yang berpengaruh terhadap penguatan kelembagaan petani jagung. Dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis tingkat partisipasi petani dalam kelembagaan petani yang mencakup Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Kelompok Wanita Tani (KWT), dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

Analisis partisipasi ini meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program, guna mengidentifikasi bentuk dan tingkat keterlibatan petani. Selain itu, penelitian juga mencakup evaluasi faktor internal kelembagaan, yakni kapasitas sumber daya manusia, efektivitas organisasi kelembagaan, serta penerapan norma-norma yang berlaku dalam komunitas petani jagung. Faktor eksternal berupa dukungan dari stakeholder terkait juga akan dianalisis untuk melihat sejauh mana pengaruh dan kepentingannya terhadap penguatan kelembagaan. Kajian ini bertujuan untuk menghasilkan strategi prioritas penguatan kelembagaan petani jagung yang komprehensif, efektif, dan dapat diimplementasikan secara praktis oleh semua pihak yang terlibat dalam upaya pengembangan pertanian di Kabupaten Jeneponto. Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan kesinambungan kelembagaan petani dalam mendukung produktivitas dan kesejahteraan petani jagung.

**Tabel 1.1.** Kelembagaan Petani di Kabupaten Jeneponto

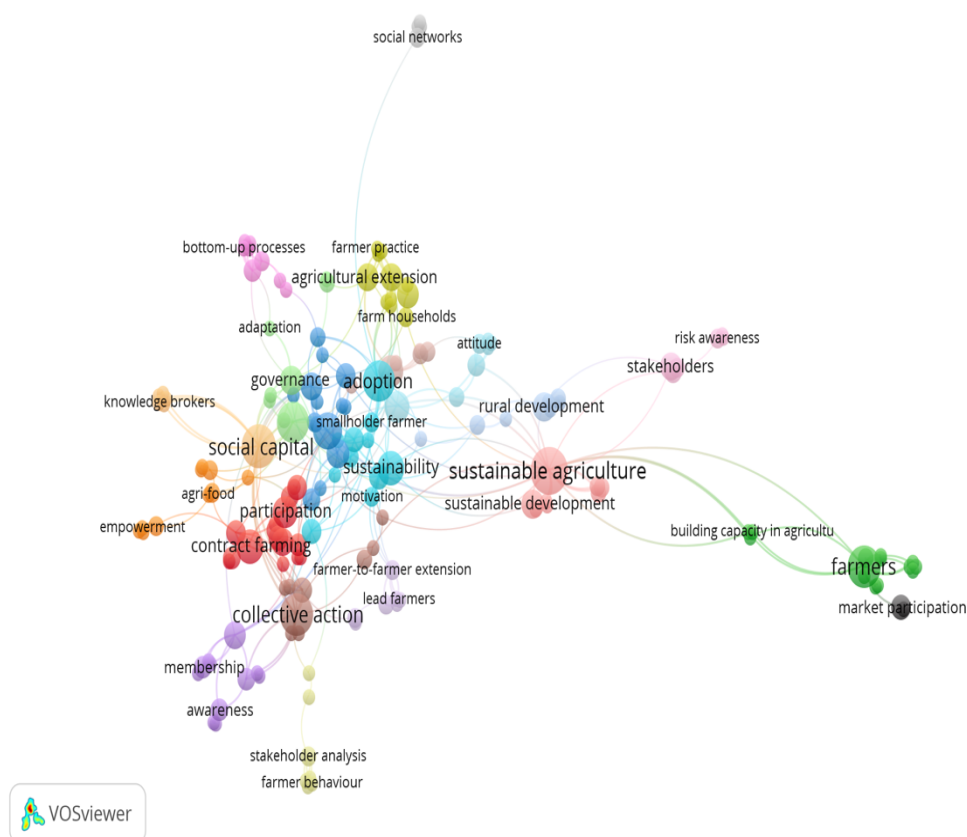
No	Kecamatan	Kelompok Tani					Kelompok Wanita Tani					P3A					Gapoktan	Total
		P	L	M	U	NK	P	L	M	U	NK	P	L	M	U	NK		
1	Arungkeke	2	3	1	0	92	2	0	0	0	2	7	0	0	0	1	7	117
2	Bangkala	321	128	22	1	70	13	0	1	0	2	11	0	0	0	0	13	582
3	Bangkala Barat	60	12	7	0	51	16	0	0	0	0	8	0	0	1	0	13	168
4	Batang	144	4	23	0	17	5	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4	199
5	Binamu	15	1	1	0	13	22	0	0	0	3	1	0	0	0	0	13	69
6	Bontoramba	43	24	3	0	4	15	1	0	0	4	7	0	0	0	0	6	107
7	Kelara	140	41	2	0	96	7	0	1	0	2	0	0	0	3	0	10	302
8	Rumbia	200	38	5	0	62	5	1	1	0	1	1	0	0	0	0	13	327
9	Tamalate	76	16	2	0	24	20	0	1	0	3	0	0	0	0	1	12	155
10	Tarawang	5	1	0	0	24	28	0	1	0	1	0	0	0	0	0	8	68
11	Turatea	267	53	10	4	32	7	0	1	0	1	2	0	0	0	0	11	388
<b>Jumlah</b>		<b>1273</b>	<b>321</b>	<b>76</b>	<b>5</b>	<b>485</b>	<b>140</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>109</b>	<b>2.482</b>

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto, 2022

Keterangan : P : Pemula; L : Lanjut; M : Madya; U : Utama; NK : Non Kelas

## 1.6. Kebaruan Penelitian

Topik penelitian ditentukan berdasarkan hasil analisis bibliometrik dengan penggunaan software VOSviewer. VOSviewer merupakan sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk analisis bibliometrik untuk mengkaji artikel, peneliti, atau publikasi individu, kutipan, bibliografi, kutipan bersama serta hubungan antara penulis satu dengan yang lainnya, sehingga dapat ditemukan gap knowledge dalam satu topik penelitian (Donthu et al., 2021). VOSviewer digunakan untuk membuat peta visualisasi jaringan bibliometric berbagai disiplin ilmu (Liao and Li, 2023). Pembuatan visualisasi menggunakan aplikasi VOSviewer, data dari berbagai publikasi yang telah dipublikasikan dalam kurun waktu 2019 sampai 2022. VOSviewer akan membaca berbagai macam jenis data. Untuk membuat sebuah visualisasi, kita akan dapat menggunakan tiga alternatif antara lain yaitu berdasarkan network data, bibliographic data serta text data. Dalam penelitian ini menggunakan sumber jurnal dari ScienceDirect, Wiley, dan Taylor & Francis.



**Gambar 1.1.** Visualisasi jaringan VOSviewer dengan analisis kata kunci

Berdasarkan Gambar 1.1 diketahui pembuatan visualisasi menggunakan aplikasi Vosviewer, terdapat 389 artikel dianalisis berdasarkan kata kunci strategi penguatan kelembagaan petani, menunjukkan terdapat 19 kluster dengan kluster 1-16 adalah menunjukkan paling banyak diteliti. Adapun topik yang telah banyak diteliti meliputi: *sustainable agriculture* (pertanian berkelanjutan) sudah banyak diteliti dari berbagai pendekatan: teknologi, sosial, ekonomi, lingkungan. Banyak studi yang menekankan pentingnya *social capital* (modal sosial) dan *collective action* (aksi kolektif) dalam memperkuat kelembagaan. Kluster 17 yang ditunjukkan oleh warna hijau dan kluster 18-19 yang ditunjukkan oleh abu mengindikasikan bahwa topik penelitian ini yang masih jarang diteliti karena letaknya berada jauh dari kata kunci dan komposisi jaringan yang kompleksitasnya kurang dibanding kluster 1 hingga kluster 16. *Stakeholder analysis* (analisis pemangku kepentingan) termasuk kata kunci yang topiknya masih kurang diteliti yang memetakan peran aktor secara sistematis dalam sistem kelembagaan petani. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengkaji pemetaan *stakeholder* yang berperan dalam kelembagaan petani jagung untuk menganalisis partisipasi petani dalam kelembagaan serta menetapkan strategi dalam penguatan kelembagaan petani.

**Tabel 1.1.** Gap analysis pada penelitian

No	Uraian	Keterangan
1	Fokus kajian kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebagian besar penelitian hanya membahas kelembagaan petani secara parsial, misalnya pada satu jenis organisasi saja.</li> <li>Belum banyak kajian yang membahas peran stakeholder secara menyeluruh dalam penguatan kelembagaan petani.</li> </ul>
2	Metode analisis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penelitian sebelumnya cenderung menggunakan pendekatan Structural Equation Modeling (SEM) tanpa mempertimbangkan faktor partisipasi petani dalam penguatan kelembagaan.</li> <li>Analisis Interpretative Structural Modeling (ISM) sebelumnya digunakan untuk pengembangan komoditas, namun belum diterapkan dalam merancang strategi kelembagaan petani.</li> </ul>
3	Lokasi penelitian	Kajian kelembagaan petani jagung di Kabupaten Jeneponto masih minim dibanding daerah lain. Padahal, Kabupaten Jeneponto memiliki peran strategis sebagai sentra pengembangan jagung di Indonesia.

Penelitian ini memiliki kebaruan yang signifikan dalam konteks penguatan kelembagaan petani jagung di Kabupaten Jeneponto. Pertama, penelitian ini secara komprehensif melakukan pemetaan stakeholder berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingannya, yang selama ini masih jarang dilakukan secara mendalam dalam kajian penguatan kelembagaan petani. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung hanya membahas aspek kelembagaan petani secara parsial, tanpa mengintegrasikan peran dan hubungan stakeholder secara menyeluruh. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis yang mempertimbangkan secara mendalam tingkat partisipasi petani dalam kelembagaan, yang mencakup berbagai tahapan mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Metode ini memungkinkan identifikasi faktor-faktor yang secara nyata mempengaruhi tingkat partisipasi petani, yang masih belum sepenuhnya diulas dalam kajian sebelumnya. Ketiga, penelitian ini menggunakan pendekatan holistik dengan menggabungkan analisis faktor internal (kapasitas sumber daya manusia, struktur organisasi, dan norma kelembagaan) serta faktor eksternal (dukungan stakeholder dari sektor publik, swasta, dan organisasi sosial). Oleh karena itu, strategi penguatan kelembagaan tidak dapat dilakukan secara sektoral atau sepihak, melainkan memerlukan keterpaduan antara upaya internal (penguatan tata kelola, partisipasi anggota, pelatihan) dan intervensi eksternal (kebijakan, akses pasar, dan teknologi).

Kebaruan lain dari penelitian ini terletak pada pengaplikasian metode interpretative structural modeling (ISM) yang memungkinkan identifikasi hierarki dan hubungan antar elemen strategis dalam kelembagaan secara sistematis. Metode ini belum banyak digunakan dalam konteks kelembagaan petani di Indonesia, terutama dalam sektor jagung. Dengan pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya memberikan deskripsi masalah, tetapi juga solusi terstruktur yang dapat diimplementasikan oleh berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang penting dan praktis, terutama dalam merancang strategi penguatan kelembagaan petani jagung yang efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Jeneponto, sekaligus mengisi celah kajian ilmiah yang selama ini belum banyak dieksplorasi. Kerangka ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi kebijakan dan intervensi pembangunan pertanian berbasis kelembagaan di daerah lain yang memiliki karakteristik serupa dengan Kabupaten Jeneponto

### 1.7. Daftar Pustaka

- Abdul-Rahaman, A. and Abdulai, A., 2018. Do farmer groups impact on farm yield and efficiency of smallholder farmers? Evidence from rice farmers in northern Ghana. *Food Policy* 81, 95–105. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2018.10.007>.
- Addai, K., Temoso, O. and Ng'ombe, J. 2021. Participation in farmer organizations and adoption of farming technologies among rice farmers in Ghana. *International Journal of Social Economics*, 49(4), 529-545. <https://doi.org/10.1108/ijse-06-2021-0337>.

- Agus, F., Andrade, J. F., Rattalino Edreira, J. I., Deng, N., Purwantomo, D. K. G., Agustiani, N. et al., 2019. Yield gaps in intensive rice-maize cropping sequences in the humid tropics of Indonesia. *Field Crops Research* 237, 12–22. <https://doi.org/10.1016/j.fcr.2019.04.006>.
- Al-Kaisi, M. M., Elmore, R. W., Miller, G. A. and Kwaw-Mensah, D., 2015. Extension Agriculture and Natural Resources in the U.S. Midwest: A Review and Analysis of Challenges and Future Opportunities. *Natural Sciences Education* 44(1), 26–33. <https://doi.org/10.4195/nse2014.10.0022>.
- Anang, B. T., Bäckman, S. and Sipiläinen, T. 2020. Adoption and income effects of agricultural extension in northern Ghana. *Scientific African* 7, e00219. <https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2019.e00219>.
- Anantanyu, S. 2011. Kelembagaan Petani: Peran Dan Strategi Pengembangan Kapasitasnya. *SEPA* 7(2), 102–109.
- Ao, G., Liu, Q., Li, Q., Chen, M., Liu, S. and Wu, W. 2021. Organization model, vertical integration, and farmers' income growth: empirical evidence from large-scale farmers in lin'an, china. *Plos One*, 16(6), e0252482. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0252482>.
- Arsyad, M., Nuddin, A., Fahmid, M., Darmawan, S., Aries, D., Pulubuhu, T. et al., 2021. Linkage of Roles Between Institutions for Agricultural Development in Indonesian Border Area. *Agroland* 28(1), 1–16.
- Aruna, M., Unang, U. and Hikmahwidi, R. 2023. Role of farmers' groups in increasing robusta coffee farmers' participation in the village of linggajati, sukaratu district, tasikmalaya regency. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 2(1), 393-406. <https://doi.org/10.55927/eajmr.v2i1.2751>.
- Bachke, M.E., 2019. Do farmers' organizations enhance the welfare of smallholders? Findings from the Mozambican national agricultural survey. *Food Policy*, 89. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2019.101792>.
- Barrett, C. B., Bachke, M. E., Bellemare, M. F., Michelson, H. C., Narayanan, S. and Walker, T. F., 2012. Smallholder participation in contract farming: Comparative evidence from five countries. *World Development* 40(4), 715–730. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2011.09.006>.
- Bernard, T., Collion, M. H., de Janvry, A., Rondot, P. and Sadoulet, E., 2008. Do Village Organizations Make a Difference in African Rural Development? A Study for Senegal and Burkina Faso. *World Development* 36(11), 2188–2204. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2007.10.010>.
- Bernard, T. and Spielman, D. J., 2009. Reaching the rural poor through rural producer organizations? A study of agricultural marketing cooperatives in Ethiopia. *Food Policy* 34(1), 60–69. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2008.08.001>.
- Beunen, R., Patterson, J. and Van Assche, K., 2017. Governing for resilience: the role of institutional work. *Environmental Sustainability* 28, 10–16. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2017.04.010>.
- Bizikova, L., Nkonya, E., Minah, M., Hanisch, M., Turaga, R.M.R., Speranza, C.I. et al., 2020. A scoping review of the contributions of farmers' organizations to

- smallholder agriculture. *Nature Food* 1(10), 620–630.  
<https://doi.org/10.1038/s43016-020-00164-x>.
- Boakye, L.G., Osei, C.K. and Annor, S.Y., 2021. On-farm diversification strategies and improved welfare of the immiserated rural smallholder farmer: Fallacy or realism?. *Cogent Social Sciences* 7(1), 1865609.  
<https://doi.org/10.1080/23311886.2020.1865609>.
- Brinkerhoff, D. W. (1990). *Improving development program performance: Guidelines for evaluators and managers*. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers.
- Brinkerhoff, D.W. and Goldsmith, A.A., 1992. Promoting the Sustainability of Development Institutions: A Framework for Strategy. In *World Development* 20 (3), 369-383.
- Bulkis, S., Rosmana, A., Nuriftitah, Y., Sabang, N. and Azizah, A., 2020. The Role Of Social Capital On Cocoa Agribusiness Development In South Sulawesi Indonesia. *International Journal of Scientific and Technology Research* 9(2), 2769-2775.
- Cao, Y., Zhang, X. and He, L., 2020. Collective Action in maintaining rural infrastructures: cadre-farmer relationship, institution rules and their interaction terms. *Land Use Policy* 99, 105043.  
<https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.105043>.
- Chen, B. 2024. Problems and solutions in chinese agricultural futures market. *Highlights in Business Economics and Management*, 39, 492-496.  
<https://doi.org/10.54097/cwtkwq85>.
- Chen, T., Rizwan, M. and Abbas, A. 2022. Exploring the Role of Agricultural Services in Production Efficiency in Chinese Agriculture: A Case of the Socialized Agricultural Service System. *Land*, 11(3), 347.  
<https://doi.org/10.3390/land11030347>.
- Cheng, C., Gao, Q. and Qiu, Y. 2022. Assessing the ability of agricultural socialized services to promote the protection of cultivated land among farmers. *Land*, 11(8), 1338. <https://doi.org/10.3390/land11081338>.
- Clark, J.K., Jablonski, B.B.R., Inwood, S., Irish, A. and Freedgood, J., 2021. A contemporary concept of the value(s)-added food and agriculture sector and rural development. *Community Development* 52(2), 186–204.  
<https://doi.org/10.1080/15575330.2020.1854804>.
- Dolinska, A. and d'Aquino, P., 2016. Farmers as agents in innovation systems. Empowering farmers for innovation through communities of practice. *Agricultural Systems* 142, 122–130.  
<https://doi.org/10.1016/j.agsy.2015.11.009>.
- Elizabeth, R., 2016. Pencapaian Dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Dan Kelembagaan Pertanian Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Petani Kecil. *UNES Journal of Social And Economics Research* 1(1), 25-35.  
<https://doi.org/10.31933/ujser.1.1.025-035.2016>.
- Eriksen, S., Lutz, C. and Tadesse, G., 2018. Social Desirability, Opportunism and Actual Support for Farmers' Market Organisations in Ethiopia. *Journal of*

- Development Studies 54(2), 343–358.  
<https://doi.org/10.1080/00220388.2017.1299138>.
- Fauzan, M., Akhmadi, H., Thach, K. and Maulidiawati, N. 2023. Technical efficiency and corn farming productivity: a stochastic frontier analysis of small-scale farmer in indonesia. *E3s Web of Conferences*, 444, 02026. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202344402026>.
- Fuady, I. and Sutarjo, M. 2021. Perception and intention in organic agriculture cultivation in north maluku province. *E3s Web of Conferences*, 306, 02014. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202130602014>.
- Gani, A.H., Sa'diyah, A.A. and Nugroho, A.P., 2022. Persepsi Petani Padi Sawah Terhadap Kinerja Penyuluh Pertanian Di Kelompok Tani Sekar Abadi Kota Batu. *Jurnal AGRICA* 15(2), 169–181. <https://doi.org/10.31289/agrica.v15i2.5415>.
- Hadi, S., Akhmadi, A.N. dan Prayuginingsih, H., 2019. Peran Kelompok Tani dan Persepsi Petani terhadap Penerapan Budidaya Padi Organik di Kabupaten Jember. *Jurnal Penyuluhan* 15(2), 154-168.
- Haldar, K., Kujawa-Roeleveld, K., Schoenmakers, M., Datta, D. K., Rijnaarts, H. and Vos, J., 2021. Institutional challenges and stakeholder perception towards planned water reuse in peri-urban agriculture of the Bengal delta. *Journal of Environmental Management* 283, 111974. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.111974>.
- Hanna, C. and Wallace, P., 2022. Planning the urban foodscape: policy and regulation of urban agriculture in Aotearoa New Zealand. *Kotuitui* 17(3), 313–335. <https://doi.org/10.1080/1177083X.2021.1996403>.
- Haryanto, L. I., Masyhuri, M. and Irham, I., 2019. The Policy Analysis Matrix in Measuring Competitiveness of Maize Farming System in Marginal Areas. *Agro Ekonomi* 29(2), 244-260. <https://doi.org/10.22146/ae.35964>.
- Islam, F., Imran, A., Afzaal, M., Saeed, F., Asghar, A., Shahid. et al. 2023. Nutritional, functional, and ethno-medical properties of sweet corn cob: a concurrent review. *International Journal of Food Science & Technology*, 58(5), 2181-2188. <https://doi.org/10.1111/ijfs.16338>.
- Iqbal, M. and Abbas, K. 2022. The impact of institutional credit on agricultural production in pakistan. *The Pakistan Development Review*, 469-485. <https://doi.org/10.30541/v42i4iipp.469-485>.
- Jayadi, F. and Latief, R. 2023. Application of value chain analysis to corn (zea mays) commodities in indonesia: integrative review. *Iop Conference Series Earth and Environmental Science*, 1230(1), 012003. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1230/1/012003>.
- Jayme, A. and Lee, Y. 2024. Determinants of credit source choice by small-scale corn farmers in the philippines. *Journal of International Development Cooperation*, 19(1), 73-94. <https://doi.org/10.34225/jidc.2024.19.1.73>.
- Johan, D., Maarif, M. S. dan Zulbainarni, N., 2022. Persepsi Petani Terhadap Digitalisasi Pertanian untuk Mendukung Kemandirian Petani. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen* 8(1), 203-216. <https://doi.org/10.17358/jabm.8.1.203>.

- Kiptot, E. and Franzel, S., 2019. Stakeholder planning of the institutionalization of the volunteer farmer-trainer approach in dairy producer organizations in Kenya: key steps and supporting mechanisms. *International Journal of Agricultural Sustainability* 17(1), 18–33. <https://doi.org/10.1080/14735903.2018.1558581>.
- Kolade, O. and Harpham, T., 2014. Impact of cooperative membership on farmers' uptake of technological innovations in Southwest Nigeria. *Development Studies Research* 1(1), 340–353. <https://doi.org/10.1080/21665095.2014.978981>.
- Kruseman, G., Bairagi, S., Komarek, A.M., Molero Milan, A., Nedumaran, S. and Petsakos, A., 2020. CGIAR modeling approaches for resource-constrained scenarios: II. Models for analyzing socioeconomic factors to improve policy recommendations. *Crop Science* 60(2), 568–581. <https://doi.org/10.1002/csc2.20114>.
- Kuan, M., Wang, S. and Wang, J. 2021. Investigating the association between farmers' organizational participation and types of agricultural product certifications: empirical evidence from a national farm households survey in taiwan. *Sustainability*, 13(16), 9429. <https://doi.org/10.3390/su13169429>.
- Lubaale, R., Ocan, J. and Adyanga, F. 2024. Exploring the root causes of low household income among smallholder farmers in kamuli district, busoga region, uganda. *East African Journal of Business and Economics*, 7(1), 198-216. <https://doi.org/10.37284/eajbe.7.1.1949>.
- Ma, W., Marini, M. and Rahut, D. 2023. Farmers' organizations and sustainable development: an introduction. *Annals of Public and Cooperative Economics*, 94(3), 683-700. <https://doi.org/10.1111/apce.12449>.
- Masanja, I., Shausi, G. and Kalungwizi, V. 2023. Attitude of farmers and factor associated with farmers attitude towards agricultural extension services provided by private organizations in kibondo district, kigoma region, tanzania. *Asian Journal of Agricultural Extension Economics & Sociology*, 41(10), 556-566. <https://doi.org/10.9734/ajaees/2023/v41i102200>.
- Mayo, R. 2023. Obstacle in corn production and the livelihood activities of smallholder farmers in south central philippines. *Open Journal of Social Sciences*, 11(10), 573-586. <https://doi.org/10.4236/jss.2023.1110032>.
- McNamara, K.E. and Buggy, L., 2017. Community-based climate change adaptation: a review of academic literature. *Local Environment* 22(4), 443–460. <https://doi.org/10.1080/13549839.2016.1216954>.
- Mehraban, N., Kubitza, C., Alamsyah, Z. and Qaim, M., 2021. Oil palm cultivation, household welfare, and exposure to economic risk in the Indonesian small farm sector. *Journal of Agricultural Economics* 72(3), 901–915. <https://doi.org/10.1111/1477-9552.12433>.
- Michalak, D., 2020. Adapting to climate change and effective water management in Polish agriculture – At the level of government institutions and farms. *Ecohydrology and Hydrobiology* 20(1), 134–141. <https://doi.org/10.1016/j.ecohyd.2019.12.004>.

- Montalbano, P., Pietrelli, R. and Salvatici, L., 2018. Participation in the market chain and food security: The case of the Ugandan maize farmers. *Food Policy* 76, 81–98. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2018.03.008>.
- Moore, K., Swisher, M., Koenig, R., Monval, N., Tarter, A., Milord, E. et al., 2021. Capitalizing on the strengths of farmer organizations as potential change agents in Haiti. *Journal of Rural Studies* 85, 68–78. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.04.022>.
- Nasikh, Kamaludin, M., Narmaditya, B.S., Wibowo, A. and Febrianto, I., 2021. Agricultural land resource allocation to develop food crop commodities: lesson from Indonesia. *Heliyon* 7(7), e07520. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07520>.
- Nguyen, T. van, Lv, J.H. and Ngo, V.Q., 2021. Factors determining upland farmers' participation in non-timber forest product value chains for sustainable poverty reduction in Vietnam. *Forest Policy and Economics* 126, 102424. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2021.102424>.
- Noor, N., Ng, B. and Hamid, M. 2020. Forging researchers-farmers partnership in public social innovation: a case study of malaysia's agro-based public research institution. *International Food and Agribusiness Management Review*, 23(4), 579-598. <https://doi.org/10.22434/ifamr2019.0119>.
- Ohama, Y., 2001. *The Participatory Local Social Development (PLSD) Concept and Frame Work.*, Nagoya: Nihon Fukushi University-The Government of Japan.
- Ostrom E., 1990. *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action.* Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Ostrom E., 1992. *Crafting Institutions for Self-Governing Irrigation System.* San Fransisco. ICS Press.
- Ostrom, E., Gardner, R. and Walker, J., 1994. *Rules, Games, and Common-Pool Resources.* Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.. <https://doi.org/10.3998/mpub.9739>.
- Parreño, S. 2023. Analyzing crop production statistics of the philippines using the newcomb-benford law. *Multidisciplinary Science Journal*, 6(6), 2024079. <https://doi.org/10.31893/multiscience.2024079>.
- Pillaca-Medina, S. and Chavez-Dulanto, P.N., 2017. How effective and efficient are social programs on food and nutritional security?: The case of Peru: A review. *Food and Energy Security* 6(4). <https://doi.org/10.1002/fes3.120>.
- Prasetya, T.B., Rakhman, A.K. dan Widyastuti, N., 2022. Strategi Penguatan Kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Kabupaten Gunungkidul. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 9(1), 123-141.
- Rasyid, H. and Ningsih, G. 2024. The role of digital technology in the transformation of agriculture toward smart farming. *Journal of World Science*, 3(1), 1-7. <https://doi.org/10.58344/jws.v3i1.523>.
- Ruhimat, I.S., 2015. Status keberlanjutan usahatani agroforestry pada lahan masyarakat : studi kasus di Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* 12 (2), 99-110.

- Ruhimat, I.S., 2021. Strategi penguatan kelembagaan kelompok tani dalam usahatani agroforestry: kasus kelompok tani Kecamatan Sodonghilir, Tasikmalaya . *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan* 18(1), 27–43. <https://doi.org/10.20886/jpsek.2021.18.1.27-43>.
- Rustinsyah, R., 2019. The significance of social relations in rural development: A case study of a beef-cattle farmer group in Indonesia. *Journal of Co-Operative Organization and Management* 7(2). <https://doi.org/10.1016/j.jcom.2019.100088>.
- Rwamigisa, P.B., Birner, R., Mangheni, M.N. and Semana, A., 2018. How to promote institutional reforms in the agricultural sector? A case study of Uganda's National Agricultural Advisory Services (NAADS). *Development Policy Review* 36(5), 607–627. <https://doi.org/10.1111/dpr.12318>.
- Sharma, J. and Yutaka Ohama., 2007. *Participatory Local Social Development- An Emerging Discipline*. Bharat Book Centre. Lucknow. India.
- Skobelev, P.O., Simonova, E.V., Smirnov, S.V., Budaev, D.S., Voshchuk, G.Y. and Morokov, A.L., 2019. Development of a knowledge base in the “smart farming” system for agricultural enterprise management. *Procedia Computer Science* 150, 154–161. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.02.029>.
- Stevens, J., Nyathi, P. and Salomons, M. 2021. Sustainability of conservation agriculture adoption and the role lead farmers play in zimbabwe. *South African Journal of Agricultural Extension (Sajae)*, 49(2), 1-14. <https://doi.org/10.17159/2413-3221/2021/v49n2a12783>.
- Sudrajat, I. 2020. Role of farmer groups and field agricultural extension officer in the development of organic rice agricultural institutions in boyolali regency, indonesia. *JBAH*. <https://doi.org/10.7176/jbah/10-2-06>.
- Sumane, S., Kunda, I., Knickel, K., Strauss, A., Tisenkopfs, T., Rios, I. et al., 2018. Local and farmers' knowledge matters! How integrating informal and formal knowledge enhances sustainable and resilient agriculture. *Journal of Rural Studies* 59, 232–241. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2017.01.020>.
- Syafruddin, S., Wahyuni, A., Risna, R., & Rahayu, H. (2023). Introduction of new superior varieties and jajar legowo super cultivation technology to increase rice productivity in central sulawesi. *Iop Conference Series Earth and Environmental Science*, 1172(1), 012009. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1172/1/012009>.
- Tayang, W., Devi, M., Devi, H. and Mawblei, C. 2024. Quantitative insights into extension advisory services: enhancing rural livelihoods through evidence-based analysis. *Journal of Experimental Agriculture International*, 46(11), 587-597. <https://doi.org/10.9734/jeai/2024/v46i113080>.
- Taylor, B.M. and Grieken, M.V., 2015. Local institutions and farmer participation in agri-environmental schemes. *Journal of Rural Studies* 37, 10–19. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2014.11.011>.
- Triguna, R., Suharno, S. dan Adhi, A.K., 2022. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Partisipasi Petani Pada Program Upaya Khusus Jagung di Kabupaten

- Pandeglang. *Jurnal Agribisnis Indonesia* 10(1), 142–151. <https://doi.org/10.29244/jai.2022.10.1.142-151>.
- Uphoff, N. 1986. *Local Institutional Development: An Analytical Sourcebook With Cases*. Kumarian Press.
- Vanger, E.T. and Nwosu, B.U., 2020. Institutional parameters that condition farmer–herder conflicts in Tivland of Benue State, Nigeria. *African Security Review* 29(1), 20–40. <https://doi.org/10.1080/10246029.2020.1763413>.
- Verhofstadt, E. and Maertens, M., 2014. Smallholder cooperatives and agricultural performance in Rwanda: Do organizational differences matter?. *Agricultural Economics* 45(S1), 39–52. <https://doi.org/10.1111/agec.12128>.
- Wang, W., Wang, J., Liu, K. and Wu, Y. 2020. Overcoming barriers to agriculture green technology diffusion through stakeholders in china: a social network analysis. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(19), 6976. <https://doi.org/10.3390/ijerph17196976>.
- Wedajo, D.Y., Belissa, T.K. and Jilito, M.F., 2019. Harnessing indigenous social institutions for technology adoption: ‘Afoosha’ society of Ethiopia. *Development Studies Research* 6(1), 152–162. <https://doi.org/10.1080/21665095.2019.1678187>.
- Wheeler, R. and Lobley, M., 2021. Managing extreme weather and climate change in UK agriculture: Impacts, attitudes and action among farmers and stakeholders. *Climate Risk Management* 32, 100313. <https://doi.org/10.1016/j.crm.2021.100313>.
- Zhang, H. and Wu, D. (2023). The impact of rural industrial integration on agricultural green productivity based on the contract choice perspective of farmers. *Agriculture*, 13(9), 1851. <https://doi.org/10.3390/agriculture13091851>.
- Zhang, J. and Chen, Q. (2022). The impact of farmland tenure security on china’s agricultural production efficiency: a perspective of agricultural production factors. *Sustainability*, 14(23), 16266. <https://doi.org/10.3390/su142316266>.

## BAB II. PEMETAAN PEMANGKU KEPENTINGAN YANG TERLIBAT DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PETANI JAGUNG

### A MAPPING OF STAKEHOLDERS INVOLVED IN INSTITUTIONAL STRENGTHENING OF MAIZE FARMERS

#### 2.1. Abstrak

Penguatan kelembagaan petani jagung merupakan strategi penting dalam meningkatkan produktivitas, akses pasar, dan kemandirian petani di daerah sentra produksi seperti Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan stakeholder yang terlibat dalam penguatan kelembagaan petani jagung serta mengevaluasi tingkat pengaruh dan kepentingannya. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif digunakan dengan metode wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan kerangka analisis stakeholder. Hasil analisis menghasilkan klasifikasi 20 *stakeholder* ke dalam empat kategori : *key players*, *subject*, *context setter*, dan *crowd*. Dinas Pertanian, Balai Penyuluhan Pertanian, Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku, dan Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya berperan sebagai *key players* yang memiliki pengaruh dan kepentingan tinggi dalam proses penguatan kelembagaan petani. Sementara itu, sektor swasta dan organisasi masyarakat seperti PT. Jiva Agriculture Indonesia, PT. Bisi International, KTNA, dan perguruan tinggi menunjukkan kepentingan tinggi namun pengaruhnya masih terbatas dalam pengambilan keputusan kelembagaan. Temuan juga menunjukkan bahwa komunikasi yang tidak optimal, lemahnya koordinasi antar instansi, dan kurangnya partisipasi kelompok tani menjadi hambatan utama penguatan kelembagaan. Peran sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sangat potensial untuk diberdayakan melalui pendekatan kolaboratif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan penguatan kelembagaan petani sangat ditentukan oleh sinergi lintas sektor, penyelarasan kebijakan dengan kebutuhan lokal, dan keterlibatan aktif stakeholder. Hasil studi ini memberikan kontribusi penting dalam literatur pembangunan pedesaan dan kelembagaan pertanian, serta menyarankan perlunya kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi jangka panjang.

**Kata Kunci:** kelembagaan petani, stakeholder, jagung, Jeneponto, penguatan kelembagaan

#### 2.2. Pendahuluan

Pertanian memegang peran penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, terutama di wilayah agraris seperti Kabupaten Jeneponto. Upaya peningkatan produksi jagung tidak hanya bergantung pada aspek teknis pertanian, tetapi juga pada sistem kelembagaan yang menopang petani dalam mengakses sumber daya, teknologi, dan pasar (Latifa et al.,

2023). Kelembagaan pertanian memiliki fungsi strategis sebagai struktur tata kelola yang mengatur interaksi antar aktor dan praktik budidaya yang berlangsung di sektor pertanian. Lin et al. (2024) menegaskan bahwa kelembagaan yang efektif dan terstruktur menjadi prasyarat utama dalam mendorong produktivitas pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani. Hal ini sejalan dengan temuan Hryvkivska et al. (2024), yang menyoroti peran kerangka kelembagaan sebagai struktur normatif yang mengaktifkan peluang ekonomi dan mengurangi risiko produksi bagi pelaku pertanian.

Dalam kerangka tata kelola yang baik, kelembagaan pertanian tidak hanya berfungsi sebagai pengatur aturan dan regulasi, tetapi juga menjadi katalis bagi pengembangan inovasi dan penyebaran teknologi pertanian. Hryvkivska et al. (2024) menunjukkan bahwa lembaga yang kuat dapat menciptakan lingkungan yang mendukung praktik inovatif, memperkuat ketahanan terhadap guncangan eksternal seperti perubahan iklim, dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Mardhiah et al. (2023) menekankan peran institusi tradisional dalam industrialisasi pertanian, yang mampu mengintegrasikan praktik-praktik lokal dengan teknik pertanian modern untuk menghasilkan produktivitas berkelanjutan.

Akses terhadap pembiayaan juga merupakan elemen penting yang difasilitasi oleh kerangka kelembagaan. Iqbal and Abbas (2022) menegaskan bahwa kredit kelembagaan memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan produksi pertanian dengan mengatasi kendala modal. Institusi keuangan memungkinkan petani kecil untuk mengakses modal, teknologi, dan praktik yang lebih baik, yang secara langsung berkorelasi dengan peningkatan hasil. Hal ini didukung oleh Abdullahi dan Gupta (2022), yang menunjukkan bahwa institusi keuangan dari berbagai jenis, baik publik maupun swasta, memainkan peran sentral dalam menyediakan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan sektor pertanian.

Pelatihan dan penguatan kapasitas yang diselenggarakan oleh lembaga pertanian juga berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi petani. Iqbal and Abbas (2022) serta Heryanda et al. (2022) menemukan bahwa program pelatihan berbasis kelembagaan meningkatkan keterampilan manajerial petani dan kemampuan mereka dalam mengadopsi teknologi baru. Institusi yang efektif juga mendorong kolaborasi antarpelaku pertanian. Humaidi dan Soedarto (2022) menegaskan bahwa layanan penyuluhan yang kuat meningkatkan koordinasi kelompok tani dan tindakan kolektif yang mendorong efisiensi.

Lembaga yang mendukung model koperasi terbukti memberikan keuntungan dalam akses pasar, harga input, dan pertukaran informasi (S. et al., 2021). Akses pasar menjadi komponen penting dalam meningkatkan produktivitas, dan studi Ali et al. menunjukkan pentingnya jejaring aktor kelembagaan dalam memperluas penyebaran informasi pertanian. Lembaga lokal juga berfungsi sebagai tulang punggung pembangunan pertanian, seperti yang ditunjukkan oleh Budi et al. (2023) dan Romadi et al. (2023), melalui dukungan penyuluhan dan metode teknologi partisipatif. Selain itu, institusi lokal memainkan peran penting dalam memperkuat kohesi sosial dan tindakan kolektif (Nurliza et al., 2020; Nasution et al., 2023). Teori kelembagaan lokal menekankan pentingnya inovasi berbasis lokal, sebagaimana

ditunjukkan oleh Allan et al. (2022) dan Curry (2023), yang menggambarkan bagaimana inovasi yang melibatkan masyarakat, termasuk perempuan petani, berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan keberlanjutan.

Namun, efektivitas lembaga seringkali terkendala oleh akses sumber daya, lemahnya pelatihan, serta keterbatasan dalam menjangkau pasar dan pembuat kebijakan (Romdon et al., 2023; Rizkiyah et al., 2025). Masalah disfungsi struktur lokal dapat menghambat pembentukan perilaku positif di kalangan petani (Nurliza et al., 2020). Sebagai solusi, pendekatan partisipatif dan pengakuan terhadap pengetahuan lokal menjadi kunci untuk memperkuat praktik berkelanjutan (Latifa et al., 2023; Romadi et al., 2023).

Keberhasilan pembangunan sektor pertanian tidak cukup hanya mengandalkan kelembagaan petani, tetapi juga memerlukan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan (Niyazmetov et al., 2021) untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian (Di Iacovo et al., 2017). Tugas penyuluh, peneliti, dan perusahaan pertanian adalah memberikan bantuan kepada petani untuk meningkatkan produksi dalam jangka panjang (Rajala et al., 2021). Penyuluh memberikan strategi yang harus diterapkan petani dalam usahatani mereka, bukan hanya penerapan input bersubsidi (Bertolozzi-Caredio et al., 2021; Witinok-Huber and Radil, 2021). Layanan penyuluhan berdampak pada pengetahuan petani dan kemampuan mereka untuk menerapkan strategi. Secara khusus, layanan konsultasi meningkatkan adopsi dan komunikasi risiko (Eastwood et al., 2019). Penyuluh pertanian mendorong diversifikasi pertanian, kepatuhan terhadap peraturan, dan akses ke subsidi publik (Ochieng et al., 2018).

Kendala komunikasi antar aktor juga menjadi hambatan besar. Getson et al. (2022) menyoroti miskomunikasi yang muncul dalam konteks iklim dan pertanian. Hal ini diperburuk oleh keterbatasan kapasitas aktor lokal dalam mengakses informasi dan pelatihan (Malau et al., 2024). Ibrahim dan Baqutayan (2023) menambahkan bahwa rendahnya kepercayaan akibat inisiatif masa lalu yang gagal menghambat keterlibatan stakeholder. Petani dapat kehilangan kesempatan untuk membangun kapasitas dan dukungan jika tidak ada komunikasi dan keterlibatan yang baik dengan pemangku kepentingan penyuluhan pertanian (Mucoki et al., 2022). Petani tidak dapat mengakses sumber daya dan informasi vital yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan pertanian karena keterbatasan komunikasi.

Koordinasi pemangku kepentingan dalam pertanian merupakan tantangan besar. Kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan dapat diperburuk oleh integrasi yang tidak memadai dan peran yang tidak jelas dalam jaringan pemangku kepentingan. Kegagalan tata kelola juga menjadi akar masalah koordinasi, terutama di negara berkembang. Wu dan Li (2024) menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah lokal sangat penting untuk membangun jejaring kolaboratif. Espig et al. (2022) menekankan bahwa dinamika politik dan sejarah turut membentuk keterlibatan pemangku kepentingan, seringkali menciptakan ketimpangan dan penurunan partisipasi. Untuk meningkatkan produktivitas pertanian, diperlukan

investasi strategis dalam koordinasi di antara para pemangku kepentingan (Phiri et al., 2024). Arsyad (2021), menekankan bahwa koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam penguatan kelembagaan petani harus dilakukan dengan mempertimbangkan posisi lembaga dalam sistem agribisnis, baik sebagai *independent, linkage*, maupun *dependent institutions*.

Kolaborasi antara petani dan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, penyuluh pertanian, dan lembaga keuangan, sangat penting dalam penguatan kelembagaan petani jagung agar dapat meningkatkan kemandirian, produktivitas, dan kesejahteraan petani jagung di Indonesia (Sariati et al., 2023). Perbedaan pemahaman antarpemangku kepentingan mengenai praktik pertanian juga menghambat kolaborasi (Khalid, 2023). Fleksibilitas pendanaan menjadi isu krusial. Nkurunziza et al. (2023) menunjukkan bahwa skema pendanaan kaku seringkali tidak memungkinkan penyesuaian terhadap kebutuhan lokal. Oleh karena itu, mekanisme pembiayaan perlu dirancang ulang agar lebih adaptif. Rahman (2022) serta Ibrahim dan Baqutayan (2023) menyatakan bahwa lemahnya sinergi antarinstansi dan aktor kebijakan menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan ketidakefisienan. Kolaborasi yang buruk seringkali menyebabkan petani tidak menerima dukungan yang cukup untuk kebutuhan mereka, yang merupakan masalah yang lebih luas dengan keterlibatan pemangku kepentingan (Nalumu et al., 2021). Seringkali, intervensi tampak terbagi-bagi, dengan strategi *top-down* yang menghilangkan partisipasi petani yang penting dalam pengambilan keputusan. Ketegangan antara kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial dapat menghambat kolaborasi, sebagaimana dijelaskan oleh Adeyemi et al. (2022). Ketimpangan kekuasaan perlu dikenali agar intervensi strategis dapat mengatasi ketimpangan tersebut. Yobe et al. (2024) dan Ragkos et al. (2021) menekankan pentingnya pemahaman terhadap persepsi stakeholder agar kebijakan lebih inklusif.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam memahami dinamika peran pemangku kepentingan dalam kelembagaan pertanian adalah pemetaan stakeholder. Analisis stakeholder memungkinkan identifikasi sistematis para pemangku kepentingan, penilaian dan perbandingan rangkaian kepentingan, peran dan kekuasaan mereka yang khusus, serta pertimbangan dan investigasi hubungan di antara mereka, termasuk aliansi, kolaborasi, dan konflik yang melekat (Haldar et al., 2021), mengkaji pihak-pihak yang berkepentingan, pihak yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kelembagaan petani, pihak-pihak yang bekerja sama untuk mengatasi masalah dalam kelembagaan (Hayes et al., 2021; Kiptot and Franzel, 2019; Reed et al., 2009).

Pemetaan pemangku kepentingan memungkinkan identifikasi aktor utama dalam sistem pertanian dan bagaimana hubungan serta kepentingan mereka dalam penguatan kelembagaan petani jagung (Schwilch et al., 2012). Langkah pertama dalam pemetaan stakeholder adalah mengidentifikasi aktor utama. Mucoki et al. (2022) menyatakan bahwa pusat panggilan petani efektif menghubungkan petani dengan aktor ekstensi, lembaga keuangan, dan penyedia input. Pentingnya membangun konsensus dan kerangka kerja bersama ditekankan oleh Adeyemi et al. (2022), agar peran masing-masing pihak lebih jelas. Setelah identifikasi, pemetaan

kepentingan dan kekuasaan stakeholder menjadi tahap berikutnya. Khakhula et al. (2023) serta Wang et al. (2020) menunjukkan pentingnya pemetaan ini untuk memahami interaksi dan penyebaran teknologi hijau. Pendekatan partisipatif memperkaya proses ini, sebagaimana diusulkan oleh Ebrahimi et al. (2021) dan Moretti et al. (2021), yang menekankan keterlibatan langsung stakeholder dalam pengembangan teknologi pertanian.

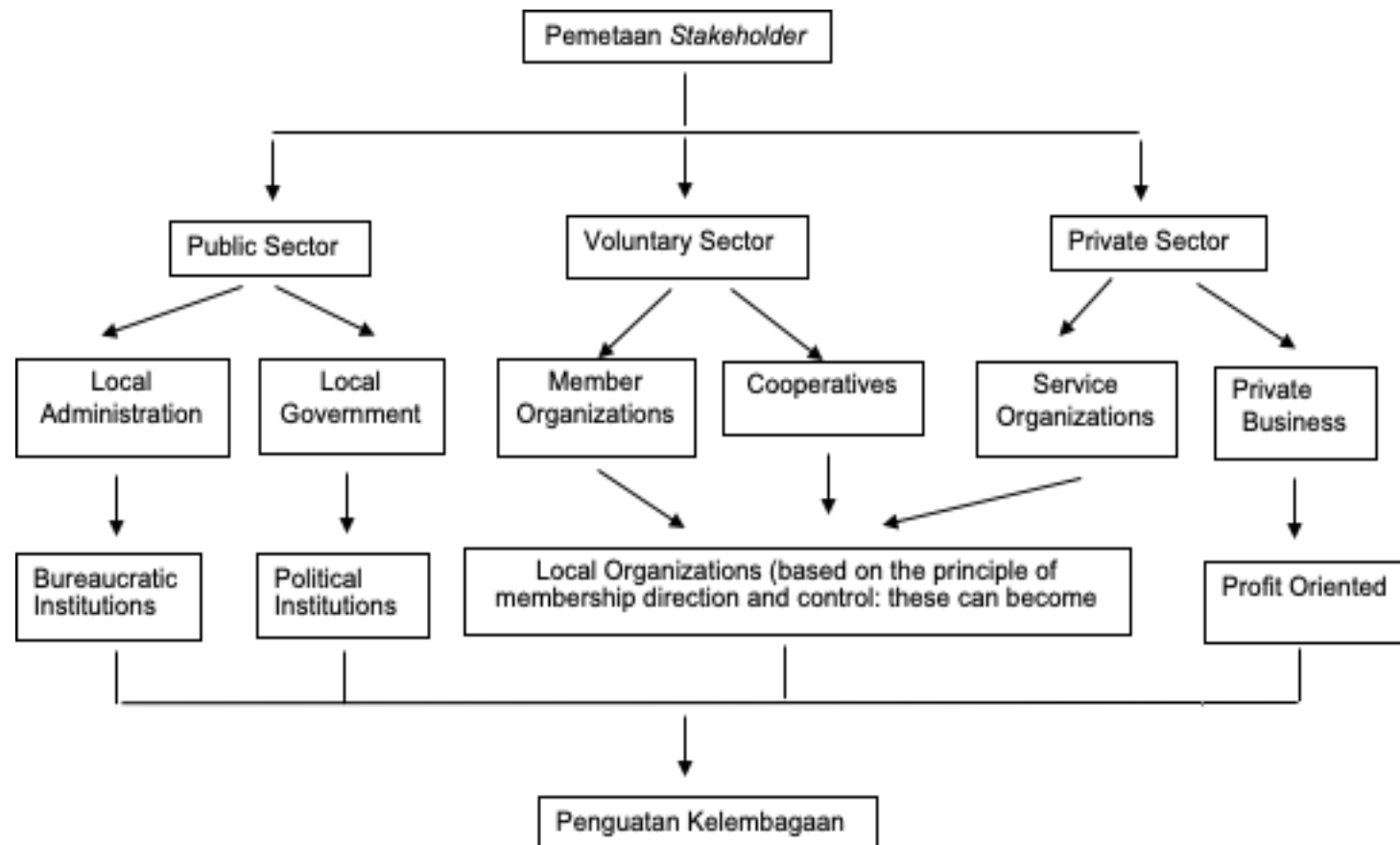
Analisis sistematis dapat menginformasikan desain platform multipihak, sebagaimana ditunjukkan oleh Aremu et al. (2023) dan Nkurunziza et al. (2023), yang menunjukkan hubungan positif antara keterlibatan stakeholder dan kinerja proyek. Pemetaan stakeholder bukan aktivitas sekali jalan, tetapi proses berkelanjutan yang perlu evaluasi dan penyesuaian rutin. Ahmed et al. (2023) dan Tukiran et al. (2023) menegaskan pentingnya mekanisme umpan balik dalam menyempurnakan strategi koordinasi dan keberlanjutan inisiatif pertanian. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan pemetaan pemangku kepentingan guna memahami peran dan kontribusi setiap aktor dalam pertanian jagung (Banda, 2022; Nalumu et al., 2021; Tuna et al., 2019).

Penelitian mengenai pemetaan stakeholder dalam konteks penguatan kelembagaan petani jagung di Indonesia masih terbatas, terutama dalam mengkaji interaksi dan pengaruh dari berbagai sektor, seperti pemerintah, swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada penguatan kelembagaan petani dari sisi internal kelembagaan petani itu sendiri, seperti pembentukan kelompok tani dan koperasi (Rustinsyah, 2019). Namun, belum banyak studi yang secara sistematis menganalisis keterlibatan stakeholder secara menyeluruh, mulai dari *public sector*, *voluntary sector*, hingga *private sector* dalam mendukung kelembagaan petani. Selain itu, kajian mengenai bagaimana pemetaan *stakeholder* dapat digunakan untuk merancang strategi kebijakan penguatan kelembagaan petani jagung masih sangat terbatas. Oleh karena itu, dengan menggunakan kerangka teori kelembagaan lokal (Uphoff, 1986) penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menganalisis pemetaan *stakeholder* dalam penguatan kelembagaan petani jagung. Dengan menggunakan metode analisis *stakeholder* yang lebih sistematis, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan *stakeholder* berdasarkan pengaruh dan kepentingan masing-masing dalam sistem kelembagaan petani jagung di Indonesia. Dengan memahami peran dan hubungan *stakeholder* dalam sistem kelembagaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pertanian yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta memperkuat daya saing petani jagung di Indonesia.

## 2.3. Metode Penelitian

### 2.3.1. Desain Penelitian

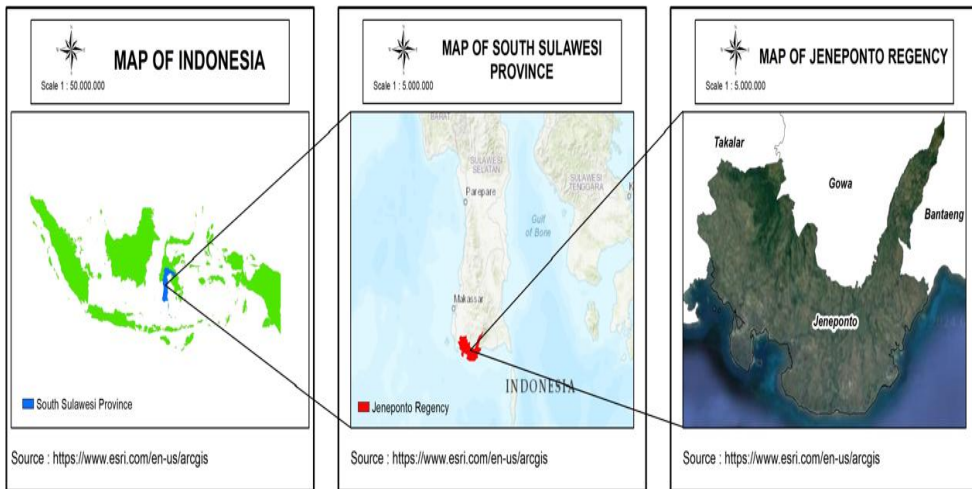
Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau masalah kemanusiaan (Creswell, 2018). Beberapa studi kasus ini diambil dari beberapa pemangku kepentingan yang terkait dalam penguatan kelembagaan petani jagung. Dalam penelitian ini kasusnya adalah kelembagaan petani di Kabupaten Jeneponto, yang dalam hal ini melibatkan *stakeholder* diantaranya pihak petani sebagai pelaku utama dalam pengelolaan kelembagaan, pengusaha (swasta) dan pemerintah sebagai pemangku kepentingan terhadap pengelolaan kelembagaan petani. Kerangka kelembagaan lokal menurut Norman Uphoff berfokus pada bagaimana kelembagaan di tingkat lokal berkembang dan berfungsi untuk mendukung pembangunan masyarakat. Uphoff membedakan kelembagaan menjadi beberapa tingkatan dan jenis, serta menekankan pentingnya peran kelembagaan lokal dalam pembangunan pedesaan dan partisipasi masyarakat. Dalam teori Uphoff (1986), terdapat tingkatan dan fungsi masing-masing lembaga dalam pembangunan pertanian, Kelembagaan yang baik dan kuat tercermin dari adanya interaksi tiga aktor yaitu aktor yang mewakili pemerintah (*public sector*), aktor yang mewakili masyarakat secara individu atau kelompok (*voluntary sector*), dan aktor yang mewakili swasta (*private sector*) ditunjukkan pada gambar 2.1



**Gambar 2.1.** Kelembagaan lokal berdasarkan teori Uphoff (1986)

### 2.3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai Desember 2023 di Kabupaten Jeneponto. Pemilihan Kabupaten Jeneponto sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap produksi jagung di Sulawesi Selatan. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap komoditas ini menjadikan jagung sebagai sektor strategis untuk penguatan kelembagaan petani.



Gambar 2.2. Peta lokasi penelitian

### 2.3.3. Metode Penentuan Informan

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dimana dalam pendekatan kualitatif menggunakan *key informan* sebagai sumber data dan informasi yang dibutuhkan. Penentuan informan pertama menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria adalah informan memiliki pemahaman serta terlibat dalam penguatan kelembagaan petani jagung. Informan berasal dari instansi pemerintah, swasta, dan kelompok masyarakat. Informan dalam penelitian ini merupakan ketua/wakil ketua organisasi maupun staff yang ditunjuk oleh para pemimpin yang dianggap memiliki pemahaman mengenai peran stakeholder yang terlibat dalam penguatan kelembagaan petani jagung di Kabupaten Jeneponto. Pemilihan informan kunci kedua didapatkan dengan teknik *snowball-sampling* berdasarkan rekomendasi dari informan kunci pertama dan seterusnya sehingga data yang dibutuhkan dalam penelitian terkumpulkan. Pendalaman dianggap selesai apabila telah terjadi kejenuhan informasi dari informan kunci yang ditandai dengan pengulangan informasi yang sama.

Data awal penelitian bersumber dari Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Balai Penyuluhan Pertanian Kabupaten Jeneponto sebagai informan kunci pertama, hasil wawancara tersebut akan menunjukkan jumlah *stakeholder* yang

terlibat dalam penguatan kelembagaan petani jagung. Selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh informan, peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data yang lebih lengkap yaitu informan yang berasal dari Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku, Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S), Kelompok Tani, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), distributor pupuk, dan pedagang jagung di tingkat kabupaten.

#### **2.3.4. Metode Pengumpulan Data**

Data-data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dan mendalam (*depth interview*). Bentuk wawancara berupa diskusi mengenai keterlibatan instansi/lembaga serta hubungan yang terjalin antar instansi/lembaga pada program penguatan kelembagaan petani jagung di Kabupaten Jeneponto. Data sekunder diperoleh melalui observasi lapang dan penelusuran dokumen. Observasi lapang ini dilakukan untuk memverifikasi peran stakeholder yang terlibat berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan informan kunci. Penelusuran dokumen dilakukan terhadap Tupoksi, aturan kelembagaan, dokumen perjanjian kerjasama dan koordinasi, serta peraturan perundangan yang dimiliki tiap instansi terkait dengan program penguatan kelembagaan petani. Data sekunder diperoleh dari instansi ataupun lembaga-lembaga terkait, seperti BPS, Dinas Pertanian, Balai Besar Penyuluhan Pertanian (BBPP) Batangkaluku.

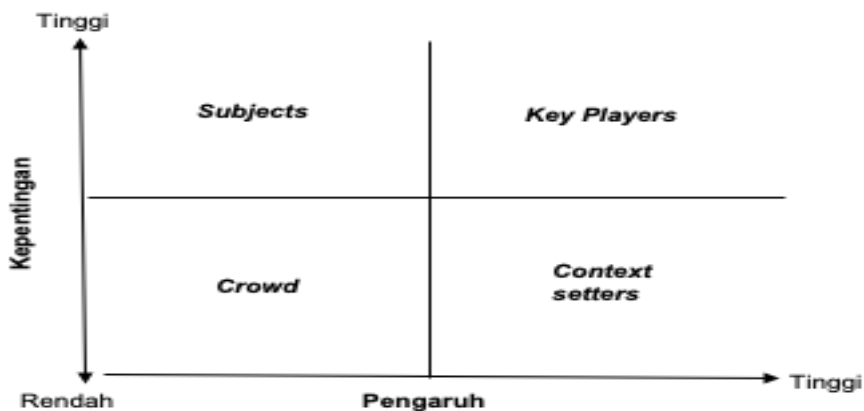
#### **2.3.5. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif menggunakan kerangka instrument analisis *stakeholder*. Data hasil wawancara, observasi, dan data yang berasal dari hasil dokumentasi dan penelusuran dokumen untuk kelembagaan petani jagung di Kabupaten Jeneponto ditabulasikan dan diolah dengan analisis deskriptif serta penentuan pengaruh (*influence*) dan kepentingan (*interest*) dengan membuat skoring. Analisis *stakeholder* digunakan untuk menganalisis data mengenai *stakeholder*. Model analisis *stakeholder* yang digunakan adalah model yang diperkenalkan oleh (Reed et al., 2009) dengan tiga tahapan yang meliputi identifikasi *stakeholder*, klasifikasi *stakeholder*, dan hubungan antar *stakeholder*. Identifikasi bertujuan untuk mengetahui *stakeholder* yang terlibat dalam penguatan kelembagaan petani jagung. *Stakeholders* yang dimaksud dapat berasal dari instansi pemerintah, kelompok swasta dan kelompok masyarakat. Identifikasi dilakukan dengan pengamatan lapang dan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait.

Setelah para *stakeholder* teridentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan klasifikasi *stakeholders* dengan mengelompokkan dan membedakan antar *stakeholder*. Metode analisis menggunakan matriks pengaruh dan kepentingan dengan mengklasifikasikan *stakeholder* ke dalam *key player*, *subject*, *context setter*, dan *crowd*. Penyusunan matriks pengaruh dan kepentingan dilakukan berdasarkan

pada data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan kunci yang ditransformasikan menjadi data berupa skoring dan selanjutnya dikelompokkan menurut klasifikasi *stakeholders* tersebut.

Pengukuran tingkat pengaruh *stakeholder* menggunakan lima variabel yang meliputi kekuatan kondisi, penguasaan sumberdaya strategis, kekuatan dalam pemberian kompensasi, kekuatan organisasi, bentuk keahlian *stakeholder*. Pengukuran tingkat kepentingan setiap *stakeholder* diukur menggunakan lima variabel yang meliputi keterlibatan *stakeholder*, manfaat yang diperoleh *stakeholder*, program kerja *stakeholder*, kewenangan *stakeholder* dan tingkat ketergantungan *stakeholder* dalam penguatan kelembagaan petani jagung (Reed et al., 2009). Hasil klasifikasi *stakeholder* disajikan ke dalam diagram kartesius dengan 4 kuadran yang menginterpretasikan peran dari masing-masing *stakeholder*, yaitu *subject*, *key player*, *context setter*, dan *crowd*, yang disajikan pada Gambar 2.3.



**Gambar 2.3.** Matriks pengaruh dan kepentingan (Reed et al., 2009)

- Kuadran I (*Key Players*) merupakan kuadran yang memiliki posisi paling strategis dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi. *Stakeholders* yang berada pada kuadran ini memiliki peran penting dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan terkait kelembagaan petani jagung.
- Kuadran II (*Subject*) merupakan kuadran dengan tingkat kepentingan yang tinggi tetapi memiliki pengaruh yang rendah. *Stakeholders* pada kuadran ini memerlukan perhatian untuk terus diberdayakan dan dilibatkan dalam kelembagaan petani jagung.
- Kuadran III (*Context Setter*) merupakan kuadran dengan tingkat kepentingan yang rendah namun memiliki pengaruh tinggi. *Stakeholders* yang berada pada kuadran ini pada dasarnya berperan dalam perumusan kebijakan namun tidak banyak terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan.
- Kuadran IV (*Crowd*) merupakan kelompok *stakeholder* yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang rendah. *Stakeholder* yang termasuk ke dalam kuadran ini cenderung terlibat secara pasif dalam penguatan kelembagaan

petani jagung. Monitoring dan evaluasi tidak begitu diperlukan namun dapat dipertimbangkan.

Untuk menganalisis hubungan antar *stakeholder* yang terjalin dalam kelembagaan petani, maka perlu dilakukan analisis yang mendalam untuk melihat peran setiap *stakeholder* dan jaringan yang mereka bangun dengan *stakeholder* lainnya. Pada penelitian ini hubungan *stakeholder* dideskripsikan ke dalam hubungan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan bersama informan kunci.

#### 2.4. Hasil dan Pembahasan

Upaya untuk meningkatkan kapasitas organisasi atau kelompok petani sehingga mereka dapat lebih mandiri, produktif, dan kompetitif dalam menghadapi tantangan di sektor pertanian dikenal sebagai penguatan kelembagaan petani. Tujuan dari penguatan kelembagaan ini adalah untuk meningkatkan akses petani terhadap informasi, teknologi, pasar, dan sumber daya finansial; memperkuat posisi tawar petani dalam rantai nilai pertanian; dan mendorong kolaborasi dan solidaritas antarpetani untuk menghadapi tantangan di sektor pertanian.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan berbagai permasalahan yang terdapat dalam kelembagaan petani jagung di Kabupaten Jeneponto mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan regulasi, koordinasi antar stakeholder, sumber daya manusia, akses ke permodalan, serta infrastruktur dan pemasaran. Meskipun telah ada Peraturan daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 9 Tahun 2019 tentang kelembagaan petani yang digunakan sebagai pedoman yang digunakan dalam kegiatan monitoring pelaksanaan pembinaan kelembagaan petani, melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi atas hasil pembinaan kelembagaan petani di Kabupaten Jeneponto, tetapi pelaksanaannya di lapangan masih lemah. Tidak ada mekanisme yang jelas yang dimiliki pemerintah daerah untuk memastikan bahwa perda tersebut telah diterapkan secara efektif oleh kelembagaan petani dan *stakeholder* lainnya. Banyak petani yang tidak tahu tentang Peraturan Daerah tersebut karena kurangnya sosialisasi. Informan mengatakan bahwa:

*"Pemerintah mengeluarkan Perda terkait pembinaan kelembagaan petani di Kabupaten Jeneponto, tetapi belum diterapkan secara efektif di lapangan. Selain itu, banyak petani tidak tahu tentang perda tersebut. Pemerintah daerah harus lebih aktif berinteraksi langsung dengan petani untuk memberikan penjelasan dan memastikan bahwa perda itu berfungsi sebagai undang-undang resmi"* (AT, Dinas Pertanian, Wawancara 28 Juli 2023).

Berdasarkan informasi dari petani terkait peraturan daerah tentang kelembagaan, menyatakan :

*"Kami tidak pernah mendapatkan informasi dari penyuluh tentang aturan dalam kelompok tani. Kami bergabung di kelompok tani tujuannya untuk mendapatkan bantuan dari Dinas pertanian"* (SH, Petani, wawancara 7 September 2023).

Selain kurangnya pelaksanaan regulasi, koordinasi antara kelembagaan petani dan penyuluh pertanian juga merupakan masalah yang dihadapi petani jagung. Meskipun penyuluh pertanian sangat membantu kelompok tani, tetapi jumlah tenaga penyuluh yang terbatas dan kurangnya komunikasi dan kerja sama yang baik antara penyuluh dan kelembagaan petani. Menurut penyuluh pertanian lapangan:

*“Di lapangan, kami sering kewalahan karena jumlah penyuluh tidak sebanding dengan jumlah kelompok tani yang harus didampingi, kadang-kadang satu penyuluh harus menangani beberapa desa. Selain itu, koordinasi dengan kelembagaan petani belum berjalan dengan baik. Terkadang, mereka tidak terlibat dalam kegiatan yang difasilitasi pemerintah”* (AR, wawancara 12 September 2023).

Beberapa program pemerintah tidak selalu memenuhi kebutuhan dan kondisi petani. Hal ini disebabkan oleh kurangnya keterlibatan petani dalam perumusan kebijakan karena pendekatan kebijakan seringkali bersifat *top-down*, dimana keputusan dibuat tanpa koordinasi dengan petani. Banyak program pemerintah dibuat di tingkat pusat tanpa mempertimbangkan keadaan di lapangan. Akibatnya, kebijakan tersebut mungkin tidak memenuhi kebutuhan khusus petani. Menurut hasil wawancara, menjelaskan:

*“Kami di Dinas Pertanian hanya menjalankan program kerja sesuai dengan arahan dari Kementerian Pertanian yang belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan petani di Kabupaten Jeneponto”* (AT, Wawancara 28 Juli 2023).

Menurut seorang petani di Desa Kayuloe Timur:

*Banyak program bantuan pemerintah muncul tanpa pertanyaan sebelumnya kepada petani. Misalnya, bantuan alat pertanian kadang-kadang tidak sesuai dengan kondisi lahan kami. Pemerintah sering membuat kebijakan dari atas, dan kami di bawah hanya menerimanya, meskipun kami paling memahami kebutuhan di lapangan “* (RA, wawancara 19 Juli 2023).

Efektivitas program juga dipengaruhi oleh masalah koordinasi antar *stakeholder* dalam penguatan kelembagaan petani. Sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah, Bappeda menyadari bahwa sinergi lintas sektor masih kurang, terutama dalam hal komunikasi antara instansi teknis dan pemangku kepentingan di lapangan. Dalam wawancara, menyatakan:

*“Kami melibatkan berbagai OPD terkait dalam perencanaan program untuk kelembagaan petani. Tetapi, tidak semua instansi memiliki data lapangan yang akurat dan terkini, sehingga terkadang program yang telah disusun tidak sesuai dengan kebutuhan petani saat ini”* (SR, Bappeda, Wawancara 23 Agustus 2023).

Koordinasi antar-stakeholder sangat penting untuk memperkuat kelembagaan petani. Akan tetapi, sering menghadapi banyak tantangan. Kelembagaan petani yang kuat memiliki potensi untuk meningkatkan daya tawar petani, meningkatkan akses terhadap sumber daya, dan mempercepat adopsi teknologi pertanian. Namun, kenyataannya terdapat banyak hambatan yang menghalangi koordinasi antara pemerintah, penyuluh, lembaga keuangan, sektor swasta, dan kelembagaan petani.

Dengan jumlah dan kualitas yang terbatas, serta kurangnya dukungan teknis dan finansial, penyuluh pertanian berfungsi sebagai penghubung strategis antara pemerintah dan petani.

*"Salah satu masalah utama dalam penguatan kelembagaan petani adalah kurangnya koordinasi yang efektif antara pemerintah, penyuluh, dan kelembagaan petani. Meskipun program yang telah dirancang bertujuan untuk membantu petani, tetapi implementasinya belum efektif karena kurangnya komunikasi yang terintegrasi antara berbagai pihak terkait. Meskipun kami telah berusaha mengadakan pertemuan dengan stakeholder terkait, masih ada hambatan dalam penyelarasan kebijakan di tingkat pusat dan daerah"* (AT, Dinas Pertanian, wawancara 16 Juli 2023).

Kelembagaan petani memiliki peran dalam peningkatan kesejahteraan petani, pemberdayaan hak petani dan penyediaan akses terhadap modal dan teknologi. Namun, pada implementasinya masih banyak permasalahan yang melatarbelakangi kelembagaan petani kurang berperan efektif dalam ruang lingkup fungsinya. Kebanyakan kelembagaan petani masih menghadapi masalah dalam manajemen kelembagaan, administrasi keuangan bahkan perencanaan usaha. Masih minimnya pelatihan dan pendampingan membuat lembaga petani kurang mampu dalam pengembangan yang profesional. Kesadaran serta keterlibatan anggota di dalam kelembagaan petani seringkali belum optimal. Banyak petani yang hanya jadi anggota demi memenuhi syarat mendapatkan bantuan pemerintah, tetapi tidak aktif dalam kegiatan kelembagaan karena sebagian besar kelompok tani masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah tanpa adanya upaya pemulihan kemandirian lembaga petani. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu penyuluh:

*"Kelembagaan petani memainkan peran penting dalam kesejahteraan mereka. Tetapi, masih banyak kelompok tani tidak memiliki administrasi dalam pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Banyak petani yang menjadi anggota hanya untuk memenuhi syarat dapat mendapatkan bantuan, tetapi mereka tidak berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan kelompok. Hal ini menghambat pertumbuhan kelembagaan petani secara mandiri"* (AS, wawancara 04 Agustus 2023).

Berdasarkan hasil wawancara memberikan informasi bahwa:

*Salah satu kendala utama pada lembaga petani adalah partisipasi anggota yang belum maksimal pada kegiatan kelompok tani. Banyak petani yang hanya bergabung demi mendapatkan bantuan pemerintah, tetapi minim partisipasi pada kegiatan yang seharusnya jadi pendorong kapasitas mereka. Banyak kelompok tani yang belum memiliki sistem administrasi dan keuangan yang baik sehingga sulit terhubung untuk mendapatkan akses permodalan dari bank atau pemerintah"* (AA, Dinas Pertanian, Wawancara tanggal 6 Juli 2023).

Sebagian besar kelompok tani masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah tanpa ada upaya untuk mengembangkan kemandirian. Hal ini juga disampaikan oleh ketua kelompok tani di Kecamatan Binamu:

*"Banyak kelompok tani hanya ikut karena ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah, tetapi setelah mendapat bantuan kelompok menjadi tidak aktif"*

kembali. Pemerintah memberikan bantuan, tapi tidak ada tindak lanjutnya untuk keberlanjutan program yang telah diberikan (SL, wawancara tanggal 12 Juli 2023).

Petani jagung menghadapi berbagai masalah terkait sarana produksi jagung yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensinya. Salah satunya berbagai kendala dalam akses pupuk subsidi yang mereka butuhkan untuk menanam jagung. Para petani sering kali kesulitan mendapatkan pupuk subsidi karena kuota yang diberikan pemerintah tidak cukup dan distribusi yang tidak merata. Ketika musim tanam tiba, pasokan pupuk subsidi sering tidak memadai sehingga para petani harus membeli pupuk non-subsidi dengan harga lebih tinggi atau memberikan takaran lebih sedikit ke tanaman.

*"Kami sebenarnya berusaha menyalurkan pupuk subsidi sesuai dengan ketentuan pemerintah yaitu petani yang boleh menebus pupuk bersubsidi adalah petani yang terdaftar dalam sistem e-RDCK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dan memiliki luas lahan maksimal 2 hektar. Tetapi tidak semua petani terdaftar dalam sistem e-RDCK, sehingga mereka kesulitan mendapatkan pupuk subsidi."* (MT, Distributor Pupuk, wawancara 21 September 2023).

Petani jagung juga sering kesulitan dalam memasarkan hasil panen ke pasar-pasar yang lebih luas. Berbagai permasalahan terkait pemasaran dan rantai pasok menjadi alasan petani tidak dapat bersaing dengan pasar secara mudah. Sebagian besar hasil panen dijual dalam bentuk mentah sehingga nilai jualnya relatif rendah. Selain itu, beberapa petani tersebut memilih menjual ke tengkulak karena tidak mempunyai akses ke pasar sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh informan:

*"Kami terpaksa menjual jagung yang belum dipipil karena tidak ada tempat untuk menyimpan. Jagung kalau disimpan terlalu lama akan rusak atau harganya murah. Jadi, jagung dijual ke pedagang tengkulak walaupun harganya lebih murah, yang jelas kami bisa langsung dapat uang. Kalau mau jual ke industri prosesnya lebih lama dan butuh modal untuk pengeringan."* (RH, Petani, Wawancara 06 September 2023).

Hal yang sama disampaikan oleh petani jagung di Kecamatan Bontoramba.

*"Kami ingin menjual jagung yang sudah dikeringkan agar harganya lebih tinggi, tapi tidak ada alat pengering di desa kami. Kalau mengeringkan sendiri, butuh waktu lama dan tergantung cuaca. Seandainya pemerintah memberikan bantuan alat pengering atau minimal gudang penyimpanan yang memadai, kami bisa menunda penjualan sampai harga stabil"* (AK, Wawancara, 3 Oktober 2023).

Di sisi lain, petani di Desa Paitana mengatakan bahwa petani juga kurang memiliki akses ke pasar yang lebih menguntungkan.

*"Kami tidak tahu bagaimana cara menjual jagung langsung ke pabrik atau industri pakan ternak. Selama ini, tengkulak yang datang ke desa dan kami terpaksa ikut harga yang mereka tentukan. Kalau di jual di Makassar pasti membutuhkan biaya transportasi yang lebih besar karena harus menyewa truk untuk mengangkut hasil panen"* (IK, Wawancara, 14 Desember 2023).

Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan memainkan peran yang sangat penting dalam menjamin distribusi pangan yang lancar. Seorang perwakilan dari lembaga tersebut menjelaskan kesulitan yang dihadapi dalam meningkatkan daya saing petani jagung di pasar:

*“Masalah utama yang dihadapi oleh petani jagung di Kabupaten Jeneponto adalah kesulitan untuk memasuki pasar yang lebih luas. Kebanyakan hasil panen hanya dapat dibeli di pasar lokal atau melalui tengkulak, yang tentunya menawarkan harga yang lebih murah. Kami berusaha untuk membantu pemasaran hasil pertanian, tetapi kami menghadapi masalah infrastruktur dan jaringan pasar yang terbatas”* (AN, Dinas Ketahanan Pangan, wawancara 23 Juli 2023).

Berdasarkan penjelasan mengenai berbagai permasalahan yang terdapat dalam kelembagaan petani jagung di Kabupaten Jeneponto, hasil penelitian ini mengidentifikasi beberapa stakeholder yang berperan dalam kelembagaan petani jagung.

#### **2.4.1. Identifikasi Stakeholder**

Tahap awal penelitian menggunakan metode yang dikembangkan oleh Reed *et al.* (2009) dimulai dengan mengidentifikasi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat. Keterlibatan pemangku kepentingan didasarkan pada kontribusi dan dampak yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kelembagaan petani jagung di Kabupaten Jeneponto. Sebagaimana yang dikatakan oleh informan, bahwa :

*“Dalam program penguatan kelembagaan petani jagung, ada banyak pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah daerah, perbankan, pihak swasta hingga lembaga swadaya masyarakat”* (MI, Kabid Penyuluhan, wawancara 03 Agustus 2023).

Terdapat 20 pemangku kepentingan yang terlibat dalam penguatan kelembagaan petani jagung di Kabupaten Jeneponto. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang telah diverifikasi oleh informan kunci. Wawancara dilakukan terhadap informan kunci, pimpinan lembaga pemerintahan, pihak swasta, serta masyarakat yang terkait dengan kelembagaan petani. Hasil identifikasi *stakeholder* yang terlibat dalam kegiatan penguatan kelembagaan petani disajikan pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1** Identifikasi *stakeholders* yang berperan dalam penguatan kelembagaan petani jagung di Kabupaten Jeneponto

No	Stakeholder	Classification
1	Balai Penyuluhan Pertanian	<i>Public sector</i>
2	Pemerintah Desa	
3	Dinas Pertanian	
4	Dinas Ketahanan Pangan	
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)	
7	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
8	Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku	
9	Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP)	
10	Perbankan	
11	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	<i>Voluntary sector</i>
12	Badan Usaha Milik Desa	
13	Perguruan Tinggi	
14	Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA)	
15	Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S)	
16	PT. Jiva Agriculture Indonesia	<i>Private sector</i>
17	PT. Bisi international Tbk	
18	Distributor Pupuk	
19	Toko Tani	
20	Pedagang Pengumpul	

Sumber : Data primer setelah diolah, 2024.

Berdasarkan Tabel 2.1 *stakeholders* yang terlibat dalam penguatan kelembagaan petani jagung yaitu sepuluh *stakeholder* dari *Public Sector*, tujuh *stakeholder* dari *Voluntary Sector*, dan lima *stakeholder* dari *Private Sector*. Namun peran mereka berbeda satu sama lain.

***Stakeholder Public Sector.*** Memiliki peran penting karena kewenangannya dalam merumuskan berbagai kebijakan dan regulasi untuk penguatan kelembagaan petani jagung. Selain itu, *stakeholder* tersebut juga berperan dalam pengawasan pelaksanaan beberapa program yang telah ditetapkan serta memberikan arahan kebijakan, alokasi sumber daya, dan bantuan teknis kepada petani.

#### 1. Balai Penyuluhan Pertanian

Balai Penyuluhan Pertanian merupakan lembaga yang didalamnya terdapat beberapa Penyuluh Pertanian Lapangan menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh petani dalam pengembangan usahatani jagung. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) memiliki peran penting dalam penguatan kelembagaan petani melalui berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian dan kesejahteraan petani. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui

bahwa program dan kegiatan penyuluh pertanian yang dilaksanakan di BPP dalam menjalankan perannya dalam penguatan kelembagaan petani jagung, yaitu:

a. Pertemuan rutin kelompok tani dan gapoktan

Pada pertemuan rutin yang dilaksanakan setiap bulan atau menyesuaikan dengan kebutuhan petani. Adanya pertemuan kelompok tani untuk meningkatkan kemampuan petani dalam mengakses informasi dan teknologi, dan penguatan kelembagaan petani. Kegiatan penyuluh pertanian merupakan penyampaian materi tentang teknologi budidaya jagung modern, misalnya penggunaan benih unggul, pemupukan berimbang, dan pengendalian hama terpadu (PHT) serta sosialisasi program pemerintah, seperti bantuan benih subsidi, pupuk bersubsidi, Kredit Usaha Rakyat (KUR).

*“Dinas Pertanian mendorong gapoktan dan kelompok tani untuk berkumpul setiap bulan. Pertemuan ini biasanya membahas evaluasi hasil panen sebelumnya, rencana tanam, dan kebutuhan pupuk”* (MI, Dinas Pertanian, wawancara 25 Juli 2023).

Pertemuan rutin merupakan wadah bagi petani untuk melaksanakan kegiatan diskusi mengenai pembelajaran pengalaman dan kendala di lapangan, dan sebagai wadah untuk berbagai informasi. Berdasarkan informasi dari informan, bahwa :

*Pertemuan rutin juga sangat membantu kami memahami cara pemupukan yang tepat agar hasil panen jagung kami meningkat. Penyuluh memberikan panduan langsung yang sebelumnya tidak kami ketahui. Selama ini pemberian pupuk yang kami lakukan berlebihan karena menurut pemahaman kami semakin banyak pupuk yang diberikan maka akan semakin bagus kualitas jagung”* (AM, Petani, wawancara 20 September 2023).

Penyuluh juga menyampaikan informasi kepada petani untuk tidak selalu bergantung pada penggunaan pupuk organik. Karena ketersediaan pupuk bersubsidi terbatas. Penyuluh memberikan pembelajaran kepada petani bagaimana cara membuat pupuk organik dari jerami jagung yang selama ini digunakan. Berdasarkan informasi dari informan:

*“ Kebiasaan yang dilakukan oleh petani setelah panen adalah membakar batang jagung di lahan dengan alasan lahan tersebut akan digunakan kembali untuk menanam. Sehingga kami mengajarkan kepada petani tentang pemanfaatan batang jagung untuk pembuatan pupuk organik sebagai suatu solusi menghadapi keterbatasan pupuk subsidi”* (JN, PPL, wawancara 23 Agustus 2023).

Selain itu, terdapat kegiatan kunjungan lapangan (anjangsana) yang dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Melalui kunjungan ke rumah petani, penyuluh pertanian dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi petani dan kebutuhan petani akan informasi pertanian dalam usaha taninya. Informan menyampaikan :

*” Kami PPL biasanya berkunjungnya sepekan itu sekali untuk satu orang petani. Kalau di perjalanan kami singgah di lahan petani lain. Dalam sehari kami biasa mengunjungi 3 orang petani untuk mengambil dokumentasi kegiatannya mulai*

*dari menanam, memupuk, memelihara, sampai panen (ambil ubinan nya)” (AS, PPL, wawancara 22 Agustus 2023).*

*“Kami mendapat banyak manfaat dari kehadiran penyuluh langsung di lahan. Biasanya penyuluh rutin melaksanakan kunjungan saat musim tanam atau saat kami menghadapi kendala di Lapangan seperti adanya serangan hama terjadi, PPL langsung turun” (RL, Petani, wawancara 25 Agustus 2023).*

*Kegiatan anjingsana ini didukung oleh pemerintah desa. Jika ada jadwal kunjungan PPL, biasanya kami membantu dalam koordinasi dengan ketua kelompok tani. Kami menganggap kegiatan anjingsana ini penting karena menyentuh kebutuhan petani langsung di lapangan (SK, Kepala Desa, Wawancara 27 Agustus 2023).*

- b. Pembinaan kelompok tani dan gapoktan dalam pembuatan konsep kerjasama dengan pihak lain.

Kelompok tani yang sudah melakukan kerjasama dan bermitra usaha mencapai 24% sehingga untuk meningkatkan kelompok tani yang bermitra, penyuluh perlu meningkatkan pembinaan agar kelompok tani melakukan kerjasama dengan pihak lain. Program yang dilakukan oleh penyuluh adalah melakukan kegiatan pendampingan dalam penyusunan konsep kerjasama dengan pihak lain dan penyusunan proposal kerjasama. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa :

*“Pembinaan yang kami terima tidak hanya membahas bagaimana membuat ide kerjasama, tetapi juga bagaimana mengelolanya dengan baik di masa depan. Kami mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana cara menjalin kerjasama dengan perusahaan mitra, manajemen keuangan, dan strategi pemasaran. Peningkatan kemampuan ini sangat penting untuk keberlanjutan gapoktan kami” (SH, Ketua Gapoktan, wawancara 26 Agustus 2023).*

*“Kemitraan ini menguntungkan kedua belah pihak. Petani mendapat kepastian pasar, dan perusahaan mendapat bahan baku dengan kualitas yang lebih baik. Sebagai penyuluh, kami memiliki peran dalam menjembatani kelompok tani dengan mitra potensial. Kami membantu mereka dalam menyusun proposal kerja sama dan memastikan bahwa perjanjian yang dibuat tidak merugikan petani. Namun, masih ada tantangan dalam meningkatkan pemahaman petani mengenai kontrak kerja sama yang adil” (WD, Penyuluh, wawancara 05 September 2023).*

*“Kami berharap kelompok tani dan gapoktan dapat membuat konsep kolaborasi yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang melalui pembinaan yang intensif. Kolaborasi yang baik akan meningkatkan kesejahteraan petani dan memajukan sektor pertanian secara keseluruhan” (MI, Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian, wawancara 06 Juli 2023).*

- c. Penyuluhan pembuatan tata tertib kelompok tani

Masih terdapat 68% anggota kelompok tani tidak aktif dalam penyusunan rencana kegiatan kelompok. Penguatan kelembagaan petani sangat bergantung pada tata tertib dalam kelompok tani. Tata tertib berfungsi sebagai pedoman bersama yang mengatur bagaimana anggota berinteraksi satu sama lain, membagi

tugas, dan melakukan kerja kelompok. Tata tertib yang dirancang secara partisipatif dapat membantu kelompok bekerja sama dengan baik, meningkatkan disiplin, dan menjelaskan hak dan kewajiban setiap anggota terutama dalam penggunaan sarana bersama.

*"Dalam kelompok kami terdapat jadwal penggunaan traktor milik kelompok sehingga semua anggota memiliki kesempatan yang sama dalam menggunakan traktor. Anggota hanya membelikan bahan bakar untuk menggunakan traktor"* (JM, Petani, wawancara 14 September 2023).

Banyak kelembagaan petani yang belum memiliki sistem yang jelas dan tercatat. Hal ini disebabkan oleh kapasitas kelembagaan kelompok tani yang rendah dan belum memahami pentingnya aturan tertulis dalam pengelolaan kelompok, sehingga penyusunan tata tertib dianggap tidak penting. Berdasarkan hasil wawancara, maka kegiatan penyuluhan pembuatan tata tertib ini sangat penting.

*"Penyuluhan mengenai pembuatan tata tertib ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada anggota kelompok tani tentang pentingnya aturan yang jelas dalam menjalankan organisasi. Tata tertib yang baik akan menciptakan ketertiban, keadilan, dan efektivitas dalam setiap kegiatan kelompok"* (KM, PPL, wawancara 13 Agustus 2023).

*"Kami berharap, setelah mengikuti penyuluhan dan memiliki tata tertib yang disepakati bersama, kelompok tani akan menjadi lebih solid, transparan, dan akuntabel. Tata tertib ini akan menjadi landasan yang kuat bagi keberlanjutan dan kemajuan kelompok tani di masa depan"* (AA, Dinas Pertanian, Wawancara 06 Juli 2023).

d. Pelatihan teknik pencatatan administrasi dan jenis-jenis buku

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, diketahui bahwa sebanyak 56% poktan dan gapoktan tidak memiliki pencatatan administrasi dan pembukuan karena mayoritas anggota kelompok tani memiliki pendidikan formal rendah. Banyak anggota yang belum memahami pentingnya pencatatan keuangan secara tertib sebagai bagian dari tata kelola kelompok yang baik. Keterbatasan penggunaan teknologi juga menjadi kendala tersendiri. Sebagian besar kelompok tani masih melakukan pencatatan secara manual menggunakan buku tulis, sehingga menyebabkan dokumen mudah hilang, tidak terdokumentasi dengan baik, dan sulit ditelusuri ketika dibutuhkan kembali. Berdasarkan informasi yang diperoleh:

*"Kelompok tani kebanyakan belum membuat kelengkapan administrasi kegiatan kelompok tani karena sosialisasi yang diberikan PPL kurang mendukung. Seharusnya, dalam pandangan saya sangat penting dilakukan pelatihan dalam hal pencatatan administrasi agar pengurus kelompok bisa paham dan mahir dalam hal administrasi kelompok"* (MI, Dinas Pertanian, Wawancara 13 Juli 2023).

Administrasi kegiatan merupakan penyusunan dan pencatatan data serta informasi, dengan tujuan untuk menyediakan keterangan. Kegiatan kerja sama yang dilakukan anggota kelompok tani berdasarkan pembagian kerja baik itu sebagai

ketua, sekretaris dan bendahara. Administrasi kegiatan sangat penting bagi setiap organisasi kelompok tani yang menunjang kemajuan kelompok tani dimana semua kekurangan dan kelebihan dalam kelompok bisa kita ketahui melalui pembukuan administrasi kegiatan.

*“Kami berharap setelah mengikuti pelatihan, petani dapat melakukan pencatatan administrasi secara mandiri dan teratur. Dengan catatan yang rapi dan akurat, mereka akan lebih mudah membuat laporan keuangan, mengelola aset kelompok, dan membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan informasi yang akurat”* (MI, Dinas Pertanian, wawancara 13 Juli 2023).

*“Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini sangat membantu bagi kami karena mendapatkan informasi tentang cara membuat catatan inventaris aset kelompok. Sampai saat ini, kami tidak memiliki informasi yang jelas tentang alat pertanian yang dimiliki kelompok. Sekarang semuanya tercatat dengan baik, yang memudahkan proses perencanaan dan pemeliharaan alat baru”* (SH, Petani, wawancara 14 Juli 2023).

e. Pelatihan teknik pembuatan rencana usaha

Sebagian besar kelompok tidak tahu bagaimana membuat rencana bisnis yang terstruktur. Namun, rencana usaha sangat penting sebagai pedoman untuk kegiatan kelompok dan sebagai persyaratan administratif untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah dan lembaga keuangan. Banyak kelompok tani tidak memiliki tujuan yang jelas untuk mengembangkan usahanya karena tidak mendapatkan pelatihan atau pendampingan yang diperlukan untuk membuat rencana usaha. Oleh karena itu, pelatihan tentang teknik pembuatan rencana usaha menjadi hal yang sangat strategis untuk memperkuat kelembagaan petani, meningkatkan kemandirian petani, dan meningkatkan dukungan eksternal yang dapat mereka terima. Berdasarkan hasil wawancara, bahwa:

*“Banyak kelompok tani yang tidak paham membuat rencana usaha, terlebih jika ingin mengajukan bantuan atau kebutuhan modal untuk menanam, sehingga perlunya dilakukan pelatihan mengenai teknik pembuatan rencana usaha.”* (IS, PPL, Wawancara 03 Oktober 2023).

*““Kami selama menanam seperti biasanya mengikuti musim. Tanam padi kalau musim hujan, jagung atau palawija kalau kemarau. Belum pernah terpikir untuk menyusun rencana usaha”* (SM, Petani, wawancara 09 Oktober 2023).

*“Cara kami menanam jagung sesuai dengan kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun. Kalau masuk tanam biasanya langsung tanam saja, nanti kalau panen baru dipikir mau dijual ke mana”* (RS, Petani, wawancara 09 oktober 2023).

f. Penyuluhan mengenai akses dalam memperluas jaringan informasi pertanian

Kelompok tani juga menjadi saluran komunikasi utama bagi anggotanya, yang menangani masalah pertanian dan juga memfasilitasi akses ke teknologi pertanian yang lebih luas dan informasi pasar. Di sisi lain, Kelompok tani tertentu berperan dalam implementasi program-program pemerintah tertentu yang menargetkan peningkatan praktik pertanian tertentu melalui distribusi pupuk bersubsidi, penyuluhan teknologi, dan lain sebagainya. Namun, sekitar 88% kelompok tani dan

gapoktan di Kabupaten Jeneponto belum bisa mengakses informasi pertanian melalui media elektronik.

*“Kami belum terbiasa mencari info pertanian menggunakan HP.” Biasanya kami langsung bertanya kepada penyuluh atau kepada petani lain kalau ada hama atau penyakit yang menyerang tanaman kami. Sinyal di desa kadang juga susah, sehingga tidak mendukung untuk mencari informasi pertanian dari internet” (IK, Petani, wawancara 13 Oktober 2023).*

*“Banyak petani di desa kami tidak memiliki akses internet. Akses kami terbatas pada teknologi baru yang dapat membantu. Informasi yang diberikan oleh kelompok tani sangat terbatas, dan kami sering bergantung pada informasi dari sumber luar, seperti penyuluh yang datang sekali sebulan” (AM, Petani, Wawancara 13 Oktober 2023).*

*“Kami menyadari betapa pentingnya meningkatkan akses petani terhadap informasi pertanian, terutama di daerah yang sulit dijangkau. Meskipun penyebaran informasi terutama dilakukan melalui kelompok tani, kami sedang bekerja sama dengan pihak ketiga untuk memberikan pelatihan teknologi dan memperkenalkan penggunaan aplikasi pertanian yang dapat diakses melalui ponsel. Selain itu, tujuan kami adalah untuk meningkatkan partisipasi kelompok tani dalam program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan produksi pertanian” (AA, Dinas Pertanian, wawancara 17 Oktober 2023).*

Dari wawancara menunjukkan bahwa akses dan penggunaan media elektronik untuk informasi pertanian masih sangat minim. Hal ini dipengaruhi oleh sinyal internet di Desa kurang baik. Selain itu, petani belum terbiasa mencari informasi melalui platform digital. Hal ini menyebabkan petani sangat tergantung pada penyuluh pertanian atau sesama petani untuk memperoleh informasi. Padahal, media elektronik seperti aplikasi pertanian, situs web resmi pemerintah, media sosial, dan lain sebagainya dapat memberikan informasi yang cepat dan relevan, terkait cuaca, harga pasar, teknik budidaya, serta program pemerintah. Beberapa hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur teknologi di pedesaan memerlukan peningkatan sehingga mempermudah petani mengakses informasi pertanian.

## 2. Pemerintah Desa

Program kerja pemerintah desa memegang peranan penting dalam memperkuat kelembagaan petani yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas kelompok tani, meningkatkan teknik budidaya, dan mendukung upaya pemasaran hasil pertanian.

*“Kami dari pemerintah desa terus berupaya mendukung kelompok tani jagung, terutama dalam hal kelembagaan. Salah satu program kerja kami adalah memberikan pendampingan dalam pendirian kelompok tani, serta ikut terlibat dalam pengawasan penyaluran bantuan sarana produksi maupun mesin pertanian dari kementerian pertanian maupun aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat” (SK, Kepala Desa, wawancara 26 Juli 2023).*

*“Kami sangat mengapresiasi upaya pemerintah desa untuk memperkuat kelembagaan petani melalui dukungan pelatihan dan dukungan untuk pembentukan kelompok tani yang sangat membantu. Sinergi antara pemerintah*

*desa dan dinas pertanian sangat penting untuk memastikan program pemberdayaan petani berjalan efektif dan tepat sasaran” (MI, Dinas Pertanian, wawancara 31 Juli 2023).*

*“Program pemerintah desa sangat bermanfaat bagi kami. Pelatihan dan pendampingan membuat kami lebih terorganisir dan lebih mahir mengelola kelompok. Bantuan akses ke modal dan sarana pertanian juga sangat membantu, kami berharap bantuan ini dapat berlanjut” (IK, Petani, wawancara 27 Juli 2023).*

Berdasarkan wawancara diperoleh informasi bahwa pemerintah desa memiliki peran strategis dalam mendukung keberlangsungan kelembagaan petani jagung. Beberapa program kerja yang dilakukan antara lain adalah memfasilitasi pelatihan dan pendampingan kelembagaan, terutama dalam hal tata kelola kelompok, penyusunan rencana usaha. Selain itu, Kepala Desa juga berupaya mendorong kelompok tani agar lebih aktif mengakses bantuan dan kemitraan, melalui dukungan administratif seperti penyusunan proposal, legalitas kelompok, dan rekomendasi pendirian kelompok tani. Namun dalam pelaksanaannya, program kerja ini masih menghadapi tantangan seperti kurangnya partisipasi anggota kelompok, keterbatasan dana desa yang harus dibagi untuk berbagai sektor, serta masih adanya kelompok tani yang belum aktif secara kelembagaan. Dengan dukungan kepala desa yang proaktif, kelembagaan petani jagung memiliki potensi untuk lebih berkembang menjadi lembaga ekonomi pedesaan yang kuat dan berdaya saing.

### 3. Dinas Pertanian

Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto khususnya pada Bidang Penyuluhan terdiri dari Kepala Seksi Kelembagaan Penyuluhan, Kepala Seksi Ketenagaan Penyuluhan, Kepala Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan memiliki tugas pokok dalam melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan pelaksanaan penyuluhan pertanian. Peran Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto pada kelembagaan petani jagung adalah menyusun kebijakan dan program penyuluhan pertanian melalui pengembangan metode dan materi penyuluhan pertanian, peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta. Selain itu, memberikan fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani.

Kondisi kelembagaan petani sebagian besar berorientasi hanya untuk mendapatkan fasilitasi pemerintah, belum sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesibilitas terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan usahatani. Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada seperti kelompok tani, Gabungan Kelompok Tani, serta Perkumpulan Petani Pemakai Air dihadapkan pada tantangan ke depan untuk menjadi kelembagaan yang juga berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha yang berbadan hukum atau dapat berintegrasi dalam koperasi yang ada dipedesaan.

Berdasarkan rencana strategis Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto, program kerja yang dilaksanakan untuk mendukung kelembagaan petani, yaitu:

a) Meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa

Lembaga penyuluhan berperan dalam membantu petani dan kelompok tani mengembangkan usahatani jagung yang produktif, efisien, dan berkelanjutan. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai pusat kegiatan penyuluhan, pelatihan, sumber informasi, dan koordinasi kegiatan pemberdayaan petani. Beberapa program kerja yang dilaksanakan BPP seperti sekolah lapang dan pelatihan berbasis kebutuhan petani, dilaksanakan secara terstruktur dan berkelanjutan. Di tingkat desa, peningkatan kapasitas difokuskan pada penyuluh pertanian swadaya dan penyuluh desa, yang menerima berbagai pendampingan dan pelatihan. Dalam hal kedekatan sosial dan pemahaman kontekstual tentang kondisi petani, penyuluh lokal ini memiliki keunggulan. Oleh karena itu, mereka dilatih untuk membantu memperkuat kelembagaan petani melalui program peningkatan kapasitas. Program ini mencakup bidang seperti pengelolaan keuangan, jejaring pasar, teknologi, dan administrasi kelompok. Penyuluh pertanian tidak hanya menyampaikan teknologi tetapi menjadi fasilitator kelembagaan yang membantu petani dan *stakeholder* lainnya.

*“BPP bukan hanya tempat kerja penyuluh, tetapi menjadi pusat informasi, penyuluhan, pelatihan dan penguatan kapasitas petani di tingkat kecamatan sehingga program-program penyuluhan bisa disusun berdasarkan kebutuhan petani di lapangan”* (BH, Dinas Pertanian, wawancara 29 Juli 2023).

*“BPP memiliki peran penting dalam memperkuat kelembagaan petani. Melalui pelatihan manajemen kelompok dan akses informasi pasar, petani jadi lebih mandiri dalam mengelola kelompoknya. Kami dari Dinas Pertanian mendorong setiap BPP Kecamatan untuk menjalin kemitraan dengan P4S, perguruan tinggi, hingga swasta agar fungsinya benar-benar berjalan”* (MI, Dinas Pertanian, wawancara 03 Agustus 2023).

b) Peningkatan kapasitas kelembagaan petani

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sekolah Lapang komoditas jagung, Dinas Pertanian mendorong petani untuk memahami aspek teknis dan manajerial usaha tani jagung secara terpadu. Sekolah lapang diselenggarakan dengan pendekatan partisipatif, di mana petani belajar langsung di lahan bersama penyuluh dan narasumber ahli. Fokus utamanya adalah pada efisiensi budidaya, manajemen kelompok tani, hingga strategi pemasaran hasil.

*“Kami sangat mendukung sekolah lapang dan Bimtek untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan petani,. Sekolah lapang memberi petani kesempatan untuk belajar langsung dari pengalaman, sementara Bimtek mengajarkan petani lebih banyak tentang manajemen dan pengelolaan usaha tani. Kami melihat hasil yang baik di beberapa kelompok tani: mereka memiliki sistem pengelolaan yang lebih baik dan dapat menggunakan teknologi dengan lebih efisien”* (AT, Dinas Pertanian, wawancara 23 Juli 2023).

*“Bimtek yang dilakukan Dinas Pertanian membuka wawasan petani tentang pentingnya pengelolaan kelembagaan. Kelompok tani yang dulu hanya*

*formalitas, kini aktif kembali dan mulai berfungsi sebagai unit usaha bersama” (AS, Penyuluh Pertanian, wawancara 25 Juli 2023).*

*“Pemerintah mengadakan sekolah lapang, yang sangat membantu dalam memberikan pemahaman langsung tentang teknik pertanian yang lebih baik. Selain itu, Bimtek memberi kami pengetahuan baru tentang administrasi dan manajemen kelompok tani. Setelah mengikuti kegiatan tersebut, kami merasa lebih percaya diri dalam mengelola kelompok kami “ (Petani, wawancara 25 Juli 2023).*

Salah satu langkah strategis untuk membangun kelompok tani yang fleksibel, mandiri, dan berdaya saing adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan petani. Dalam program kerjanya, Dinas Pertanian telah menerapkan pendekatan berbasis partisipasi dalam pembelajaran. Beberapa pendekatan ini termasuk Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sekolah Lapang (SL), yang ditujukan untuk petani jagung dan kelembagaan mereka. Pengurus kelompok menghadiri kegiatan Bimtek yang diadakan secara berkala. Tidak hanya teknis budidaya jagung yang diberikan, seperti penggunaan varietas unggul, pemupukan berimbang, dan pengendalian hama terpadu, tetapi juga tentang penguatan kelembagaan, seperti pengelolaan administrasi, rencana kerja kelompok, dan strategi pemasaran berbasis kelompok. Petani memperoleh pengetahuan dan keterampilan manajerial melalui Bimtek, yang akan membantu menjaga keberlanjutan kelompok tani.

Sekolah lapang komoditas jagung dijalankan secara langsung di lahan petani sehingga memberi ruang bagi petani untuk bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan dalam usahatani. Kelompok tani tidak hanya berpartisipasi secara pasif, tetapi juga berpartisipasi secara aktif dalam menyebarkan inovasi, dan membangun komitmen bersama untuk pengelolaan kelembagaan. Kegiatan sekolah lapang akan bermanfaat bagi peningkatan produksi jagung dan meningkatkan peran kelompok tani sebagai lembaga sosial-ekonomi. Setelah mengikuti kegiatan SL atau Bimtek, banyak kelompok dapat membangun rencana kegiatan harian, memperbaiki struktur organisasi, mencatat keuangan kelompok, dan berkolaborasi dengan perusahaan pengolah jagung, lembaga keuangan, dan BUMDes.

#### c) Fasilitasi Kemitraan dan Akses Pasar

Dinas Pertanian juga menjalin kerja sama dengan sektor swasta, seperti PT. Jiva Agriculture Indonesia, PT. Bisi International Tbk, dan perusahaan mitra lainnya, dalam bentuk program kemitraan jagung berbasis kelompok tani. Melalui program ini, kelompok tani memperoleh akses terhadap benih unggul, pupuk, pembiayaan, serta jaminan pembelian hasil panen. Peran dinas pertanian adalah sebagai fasilitator yang memastikan mekanisme kemitraan berjalan sesuai regulasi dan memberikan perlindungan kepada petani.

*“Kami berkoordinasi dengan BPP di tiap kecamatan untuk memperkenalkan PT. Jiva kepada petani jagung. Kegiatan ini dilaksanakan di rumah ketua kelompok tani dan dihadiri oleh anggotanya” (AA, Dinas Pertanian, wawancara 18 November 2023).*

*Salah satu fokus utama Dinas Pertanian dalam memperkuat kelembagaan petani adalah melalui kemitraan dengan pihak swasta untuk mendapatkan*

*akses ke pasar, sehingga kelompok tani di desa kami sekarang memiliki akses ke pasar yang lebih luas. (SK, Kepala Desa, wawancara 15 November 2023).*

*Sekarang kami dapat menjual hasil panen jagung langsung ke pasar yang lebih besar dan mendapatkan harga yang lebih baik melalui kemitraan yang difasilitasi oleh pemerintah. Kami merasa lebih aman dengan jaminan pasar yang sudah terjalin melalui kemitraan, tetapi kami masih membutuhkan pendampingan lebih lanjut mengenai strategi pemasaran dan penggunaan teknologi untuk memperluas pasar kami” (NS, Petani, wawancara 16 November 2023).*

Dinas Pertanian memiliki peran yang sangat strategis dalam membantu petani, khususnya dalam hal kemitraan dan akses pasar, yang merupakan faktor kunci dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Program kerja yang difokuskan pada fasilitasi kemitraan dan meningkatkan akses pasar bertujuan untuk menghubungkan petani dengan pasar yang lebih luas, yang mencakup pasar lokal, nasional, dan internasional.

#### 4. Dinas Ketahanan Pangan

Salah satu program kerja Dinas Ketahanan Pangan adalah mendorong kemandirian dan ketahanan pangan lokal melalui peningkatan kapasitas kelompok tani, khususnya Kelompok Wanita Tani (KWT) serta mengembangkan program pengolahan hasil untuk meningkatkan nilai tambah dan akses pasar bagi KWT. Diharapkan produk jagung tidak hanya dijual dalam bentuk mentah tetapi juga dapat diolah menjadi keripik atau tepung. BumDes dan Dinas Koperasi mendukung program ini melalui fasilitas kemasan, perizinan produk, dan jejaring pemasaran.

*“Tidak hanya produksi yang diperlukan untuk ketahanan pangan, tetapi juga kemandirian. Oleh karena itu, KWT kita kuatkan dari sisi produksi hingga pengolahan hasil, supaya mereka memiliki kontrol atas makanan yang mereka hasilkan” (AN, Dinas Ketahanan Pangan, wawancara 23 Juli 2023).*

Untuk mendukung pengembangan jagung sebagai salah satu bahan pangan strategis, Dinas Ketahanan Pangan berkolaborasi dengan BPP melaksanakan kegiatan sekolah lapang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan anggota KWT mengenai budidaya jagung, termasuk teknik penanaman, pemupukan berimbang, pengendalian hama terpadu, dan manajemen pascapanen.

*“KWT bukan hanya diajarkan cara bertanam jagung dalam program ini, tetapi juga diajarkan cara mengelola hasil panen supaya nilai jualnya meningkat. Dengan demikian, mereka memiliki kemandirian tidak hanya di sawah, tetapi juga di pasar” (JN, PPL, wawancara 23 Agustus 2023).*

Kelompok Wanita Tani (KWT) mempunyai fungsi lain yang sangat penting dalam mendukung suksesnya program penyuluhan pertanian, yaitu pendukung Kelompok Tani. Hal ini dapat dilihat dari informasi materi penyuluhan yang tidak sepenuhnya tersampaikan melalui kelompok tani.

*“Keberadaan KWT sangat membantu kami karena mereka memfasilitasi pertukaran informasi antara kami dan anggota kelompok tani laki-laki. Ibu-ibu ini*

*terlibat lebih aktif dalam pertemuan informal di lingkungan dusun, sehingga informasi penyuluhan lebih cepat tersebar” (AS, PPL, wawancara 22 Agustus 2023).*

*“Kami percaya bahwa kami dapat memajukan sektor pertanian desa kami. Kami tidak hanya belajar sendiri tentang metode pertanian yang efektif, tetapi kami juga aktif berkomunikasi dengan suami dan anggota keluarga laki-laki lainnya dalam kelompok tani. Kami sering membahas materi pelatihan yang kami peroleh dan mencari jalan keluar bersama ketika menghadapi masalah dalam usahatani jagung” (NM, Petani, wawancara 31 Agustus 2023).*

Apabila materi teknis budidaya yang sama disampaikan pula kepada para isteri petani yang tergabung dalam Kelompok Wanita tani (KWT), maka tingkat pelaksanaan materi penyuluhan yang disamaikan melalui poktan akan lebih besar, hal ini dikarenakan para isteri petani juga memahami dan mengerti tujuan materi yang disampaikan melalui poktan, sehingga akan mendukung sang suami untuk melaksanakan apa materi yang disampaikan oleh penyuluh pertanian.

#### 5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Peran Bappeda dalam penguatan kelembagaan petani adalah merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi, merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya, merumuskan rencana tata tanam dengan mempertimbangkan debit yang ada, memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air. Selain itu Bappeda melakukan integrasi kelembagaan koordinasi pengelolaan SDA dan irigasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan hasil wawancara, bahwa :

*“Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Jeneponto, sektor pertanian khususnya penguatan kelembagaan petani jagung telah kami masukkan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Kami memastikan ada integrasi antara program pelatihan, penguatan kelembagaan petani, bantuan sarana prasarana, serta dukungan kelembagaan dari dinas-dinas teknis seperti Dinas Pertanian dan Dinas PUPR” (SR, Bappeda, Wawancara 07 Agustus 2023).*

Meningkatkan kelembagaan petani jagung adalah salah satu prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam desain dan koordinasi program pembangunan sektor pertanian, yang mencakup peningkatan kapasitas kelompok tani jagung, Bappeda bertindak sebagai pengarah dan penghubung antar instansi teknis.

*“Peran Bappeda sangat penting untuk menyesuaikan program kami dengan visi pembangunan daerah yang luas. Mereka membantu kami menemukan area sentra jagung mana yang membutuhkan intervensi khusus berkat perencanaan berbasis data yang mereka lakukan. Selain itu, koordinasi lintas sektor yang difasilitasi oleh Bappeda memastikan bahwa petani jagung akan menerima dukungan dari bidang pertanian serta permodalan, pemasaran, dan infrastruktur” (AT, Dinas Pertanian, wawancara 16 Juli 2023).*

Fungsi lembaga tidak hanya terjadi di tingkat pelaksanaan teknis seperti Dinas Pertanian atau Ketahanan Pangan, tetapi juga berdampak pada kebijakan makro yang dibuat oleh lembaga perencana. Bappeda memastikan adanya dukungan anggaran dan sinergi program antarorganisasi perangkat daerah dengan mengintegrasikan penguatan kelembagaan petani dalam RPJMD.

*“Pemerintah Daerah lebih serius dalam mendukung kelembagaan petani yang ada di Kabupaten Jeneponto dengan adanya dukungan anggaran dan program yang terkoordinasi antar dinas. Kami berharap kelompok tani dan gapoktan lebih maju, mandiri, dan sejahtera”* (RM, Petani, wawancara 24 Juli 2023).

Hal ini menunjukkan bahwa strategi penguatan kelembagaan petani disusun secara sistematis dan terencana dalam dokumen pembangunan jangka menengah. Selain itu, tugas Bappeda meliputi pemantauan dan evaluasi kinerja program untuk mengevaluasi kinerja kebijakan. Ini sangat penting untuk mencegah tumpang tindih antar instansi dan mendorong keberlanjutan program. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Bappeda sangat penting untuk menentukan bagaimana penguatan kelembagaan petani jagung di Jeneponto, karena menggunakan pendekatan perencanaan berbasis data, lintas sektor, dan responsif terhadap kebutuhan petani.

#### 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)

*Water Resources and Irrigation Sector Management Program* (WISMP) adalah program nasional untuk pengelolaan sumber daya air dan sektor irigasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan dana pinjaman luar negeri (Bank Dunia) oleh empat OPD pelaksana (BAPPEDA, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas PUPR). Tujuan dari program ini adalah untuk menjamin ketersediaan air irigasi yang berkelanjutan. Salah satu program kerja Dinas PUPR adalah Pemberdayaan Kelembagaan P3A melalui Bimbingan Teknis tentang pemberdayaan kelembagaan P3A untuk membantu mewujudkan sistem pengelolaan air irigasi yang baik dan berkelanjutan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan pengurus P3A dalam mengelola lembaga sehingga pengelolaan irigasi dapat membantu kemajuan pertanian menuju swasembada pangan.

*“Kami di Dinas Pertanian sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Dinas PUPR untuk mendorong lembaga P3A melalui Bimbingan Teknis. P3A adalah mitra strategis kami di tingkat petani dalam pengelolaan air irigasi. Semakin kuat kelembagaan P3A, semakin efisien sistem irigasi yang mendukung produktivitas pertanian. Pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR memberikan pengetahuan teknis tentang pengelolaan air, perawatan jaringan irigasi, dan aspek organisasi dan administrasi kepada pengurus dan anggota P3A. Kegiatan ini sangat membantu petani dalam menjamin ketersediaan air yang adil dan berkelanjutan untuk tanah mereka. Kami sering bekerja sama dengan Dinas PUPR untuk memastikan bahwa materi bimbingan pertanian sesuai dengan kebutuhan petani dan program pertanian yang sedang berlangsung”* (SK, Dinas Pertanian, wawancara 06 Juli 2023).

Program penguatan kelembagaan P3A yang telah dilaksanakan di Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto adalah Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PIP) bagi P3A, yang mencakup pelatihan, pemberdayaan, dan pembenahan kelembagaan P3A dalam pengelolaan irigasi. Tujuannya adalah agar anggota P3A memperoleh pengetahuan dan keterampilan teknis yang lebih baik, sehingga kelembagaan petani pemakai air menjadi kuat, mandiri, dan berkelanjutan.

*“Sebagai PPL yang langsung berinteraksi dengan petani dan anggota P3A di lapangan, saya melihat manfaat dari Bimtek yang diadakan oleh Dinas PUPR. Pentingnya pengelolaan air secara kolektif dan terencana menjadi lebih jelas bagi petani. Mereka lebih aktif berpartisipasi dalam musyawarah pembagian air, bekerjasama membersihkan saluran air, dan melaporkan kerusakan pada saluran air.. Selain itu, bimbingan ini membantu pengurus P3A menjadi lebih mampu mengelola lembaga mereka secara mandiri dan bertanggung jawab. Karena P3A yang kuat menjadi mitra yang efektif dalam memberikan informasi dan teknologi terkait pengelolaan air irigasi kepada seluruh anggota kelompok tani”* (AR, wawancara 12 September 2023).

Dinas PUPR Jeneponto berkomitmen untuk mendukung tugas P3A dalam menjamin ketersediaan air irigasi yang berkelanjutan. Pada akhirnya, ini akan meningkatkan hasil pertanian dan kesejahteraan petani di daerah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua P3A, bahwa :

*“Dinas PUPR mendorong penguatan kelembagaan P3A melalui pelatihan dan pendampingan teknis, agar petani bisa lebih mandiri dalam mengelola irigasi secara berkelanjutan. Sebelum mengikuti Bimtek dari Dinas PUPR, kami seringkali bingung bagaimana mengatur pembagian air yang adil, terutama selama musim kemarau. Setelah mengikuti Bimtek, kami juga belajar bagaimana membuat jadwal pembagian air yang disepakati bersama dan bagaimana memelihara saluran irigasi agar tidak cepat rusak”* (NR, Wawancara 19 Agustus 2023).

Memperbaiki infrastruktur irigasi dan meningkatkan kapasitas kelembagaan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) adalah salah satu program kerja Dinas PUPR. Tujuan dari perbaikan jaringan irigasi adalah untuk memastikan ketersediaan air, terutama selama musim tanam jagung. Selain berkonsentrasi pada aspek fisik, Dinas PUPR juga berperan aktif dalam meningkatkan kemampuan pengurus P3A melalui pelatihan dan pendampingan. Tujuannya adalah untuk menciptakan kelembagaan petani yang tidak hanya dapat menggunakan infrastruktur yang ada, tetapi juga dapat beroperasi sendiri dan menjaga sistem irigasi. Jadi, jika terjadi kerusakan kecil pada saluran irigasi, anggota P3A, yang dananya diperoleh dari sumbangan petani jagung yang mengalir sawahnya dengan air irigasi, akan memperbaikinya. Petani sekarang bukan hanya pengguna air tetapi juga pengelola, yang membuat pengelolaan irigasi lebih efektif dan berkelanjutan.

## 7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Komisi II DPRD Kabupaten Jeneponto melakukan banyak hal untuk membantu memperkuat kelembagaan petani jagung melalui fungsi legislatif, pengawasan, dan anggaran. Pokok-pokok Pikiran (pokir) DPRD adalah usulan rencana pembangunan

yang dibuat oleh anggota DPRD setelah mengumpulkan aspirasi masyarakat melalui reses dan rapat dengar pendapat. Kemudian dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam bentuk program dan kegiatan. Penjaringan aspirasi masyarakat dapil masing-masing berfungsi sebagai masukan dalam perumusan kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang selaras dengan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pokir diberikan kepada petani untuk berbagai program, termasuk pembelian peralatan pertanian dan pembangunan sumur bor. Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Jenepono memiliki potensi besar untuk membantu meningkatkan pertanian, terutama bagi petani jagung, yang merupakan komoditas unggulan daerah. Sebagian besar petani mengatakan bahwa Pokir telah membantu mereka mendapatkan berbagai sumber daya produksi, seperti alat dan mesin pertanian. Proses budidaya dan pascapanen telah terbukti lebih mudah dengan bantuan traktor tangan, pompa air, dan mesin perontok jagung yang diusulkan oleh Pokir.

Selain itu, infrastruktur seperti jalan usaha tani dan saluran irigasi yang dibangun oleh Pokir juga membantu petani jagung. Jalan tani yang dibangun di beberapa desa membantu petani mengangkut hasil panen jagung mereka. Ini secara langsung meningkatkan efektivitas distribusi dan mengurangi biaya operasional. Selain itu, para anggota DPRD mengusulkan pelatihan pertanian aplikatif melalui pokir. Pelatihan pengelolaan tanaman jagung terpadu, yang mencakup pengendalian hama terpadu dan teknik pemupukan berimbang, telah diberikan kepada beberapa kelompok tani. Pelatihan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian atas usulan DPRD. Pengetahuan petani akan ditingkatkan melalui kegiatan ini, yang juga akan meningkatkan produktivitas lahan.

*"Kami pernah dapat bantuan benih jagung lewat program Pokir dari dewan. Benihnya bagus, hasil panen kami waktu itu naik hampir dua kali lipat dibanding biasanya"* (IW, Petani, wawancara 24 Oktober 2023).

*"Dulu jalan ke kebun susah dilewati, tetapi setelah ada jalan usaha tani yang dibangun lewat Pokir, sekarang kami jadi gampang mengangkut jagung"* (ST, Petani, wawancara 03 November 2023).

*"Melalui Pokir DPRD, kami bisa mengadakan pelatihan budidaya jagung modern. Petani jadi tahu cara mengatur jarak tanam dan pakai pupuk secara efisien"* (AS, PPL, wawancara 15 November 2023).

Pokir juga digunakan untuk memberikan bantuan benih jagung berkualitas tinggi dan pupuk bersubsidi. Bantuan ini menurunkan biaya produksi dan meningkatkan hasil panen petani. Hasil panen jagung hibrida yang diberikan oleh program Pokir hampir dua kali lipat dari musim sebelumnya, kata salah satu petani di Kecamatan Bangkala. Secara keseluruhan, Pokir dapat berfungsi sebagai alat strategis untuk menghubungkan kebutuhan nyata petani dengan program pembangunan pemerintah daerah jika digunakan dengan transparan dan tepat sasaran. Namun,

keberhasilannya sangat bergantung pada pelaksana yang jujur dan kelompok tani yang terlibat aktif dalam proses perencanaan.

Namun, ada dugaan bahwa Pokir DPRD Jeneponto disalahgunakan, terutama menjelang pemilihan legislatif dan pilkada. Pokir digunakan untuk kepentingan pribadi atau politik. Bisa jadi proyek Pokir adalah sarana untuk kampanye terselubung di mana anggota DPRD mengklaim keberhasilan proyek sebagai hasil kerja mereka sendiri. Jika anggota DPRD atau anggota keluarga mereka terlibat dalam pelaksanaan proyek Pokir, ada kemungkinan mereka memiliki konflik kepentingan.

DPRD Kabupaten Jeneponto melaksanakan fungsi pengawasan salah satunya melalui pengawasan Harga Pokok Penjualan (HPP) jagung untuk melindungi petani lokal dari fluktuasi harga yang tidak menguntungkan dan menjamin keberlanjutan usaha tani mereka. Selain itu, kehadiran anggota DPRD dalam program penanaman jagung serentak menunjukkan kolaborasi antara pemerintah dalam memajukan sektor pertanian, khususnya dalam meningkatkan produktivitas jagung.

*“Kami melakukan kegiatan reses di Dapil masing-masing untuk mendengar langsung keluhan serta usulan dari petani. Banyak petani yang mengeluhkan harga jual jagung yang diterima sangat rendah dan tidak sebanding dengan biaya yang mereka keluarkan untuk kegiatan budidaya jagung. Selain itu, petani juga mengeluhkan masalah kelangkaan pupuk dan keterbatasan bantuan yang diberikan oleh Dinas Pertanian”*(DP, DPRD, wawancara 13 November 2023).

*“Informasi yang diberikan oleh Komisi II DPRD mengenai kebutuhan petani di lapangan sangat membantu dalam merancang program-program yang tepat dalam menjawab permasalahan yang dihadapi petani serta bersinergi dengan program dari Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan, untuk menyusun perencanaan pembangunan sektor pertanian yang lebih tepat sasaran”* (SR, Bappeda, Wawancara 07 Agustus 2023).

*“Bagi Dinas Ketahanan Pangan, informasi dari Komisi II DPRD sangat penting dalam merumuskan kebijakan terkait stabilisasi harga, ketersediaan pangan, dan penanganan kerawanan pangan di tingkat petani. Kami menerima informasi riil tentang kondisi lapangan terkait panen, gagal panen, dan akses petani ke pasar. Dengan mengetahui situasi petani dari Komisi II, kami dapat membuat program yang lebih responsif dan efisien untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani”* (AN, Dinas Ketahanan Pangan, wawancara 23 Juli 2023).

Komisi II DPRD Kabupaten Jeneponto bertugas mendorong kebijakan harga komoditas yang adil bagi petani dan mengawasi pelaksanaan program bantuan dan pelatihan yang diberikan kepada kelompok tani. Selain itu, Komisi II berfungsi sebagai penghubung antara keinginan petani dan lembaga teknis pelaksana di lapangan, seperti Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan. Melalui rapat dengar pendapat dan kunjungan kerja, DPRD dapat memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar membantu petani dan memenuhi kebutuhan di lapangan.

#### 8. Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku (BBPP)

Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku sebagai salah satu UPT Pusat Pelatihan - Badan Penyuluhan Dan Pengembangan SDM Pertanian

(BPPSDMP), memainkan peran penting dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pertanian melalui pelatihan petani dan penyuluhan pertanian lapangan. Pelatihan yang dilaksanakan adalah Pelatihan Kewirausahaan Agribisnis Komoditas Jagung. Pelatihan kewirausahaan agribisnis ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas petani dalam berwirausaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan para petani ke depannya dapat memahami lebih detail terkait materi-materi kewirausahaan agar biasa di peraktekkan dilapangan sebaik mungkin sehingga bisa melahirkan wirausahaan dalam sektor pertanian. Berdasarkan informasi yang diperoleh:

*“Pelatihan kewirausahaan mendorong inovasi dan nilai tambah komoditas jagung, dengan memberikan contoh keberhasilan pengolahan jagung menjadi produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi diberikan kepada petani, memungkinkan mereka untuk tidak hanya bergantung pada harga jual pipilan. Oleh karena itu, mereka memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapatan lokal dan menciptakan lapangan kerja baru. Kami percaya bahwa kewirausahaan agribisnis yang kuat akan memberikan petani kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan di Kabupaten Jeneponto”* (FY, BBPP Batangkaluku, Wawancara, 29 Juli 2023).

*Setelah mengikuti pelatihan kewirausahaan agribisnis jagung pikiran kami lebih terbuka. Kami dulu hanya menanam dan menjual jagung pipilan. Sekarang kami mulai berpikir tentang mengolah jagung menjadi produk lain yang memiliki nilai tambah, seperti keripik jagung. Dengan pelatihan ini, kami dapat menghitung biaya produksi, menemukan pasar yang lebih luas, dan bahkan mengemas barang yang menarik. Ini membuka peluang baru untuk meningkatkan pendapatan”* (KS, Petani, Wawancara 11 Agustus 2023).

*“Salah satu upaya untuk membantu petani Jeneponto agar tidak hanya menjadi produsen bahan baku tetapi juga pengusaha agribisnis yang sukses adalah melalui pelatihan kewirausahaan agribisnis komoditas jagung. Kami berharap petani dapat meningkatkan nilai tambah produk jagung mereka, memperluas akses pasar, meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka, dan memajukan sektor pertanian dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh”* (MI, Dinas Pertanian, wawancara 06 Juli 2023).

Tujuan BBPP Batangkaluku adalah untuk meningkatkan kualitas petani dalam berwirausaha sehingga mereka dapat meningkatkan kesejahteraan. Selain itu tujuannya adalah untuk menghasilkan wirausaha agribisnis yang mahir, mandiri dan sejahtera. Pelatihan kewirausahaan agribisnis, khususnya untuk pemuda di pedesaan, dapat membantu mengembangkan perekonomian. Pelatihan kewirausahaan juga diharapkan dapat meningkatkan keinginan untuk berwirausaha. Petani dapat belajar tentang penguatan kelembagaan dan pola bisnis dari pelatihan ini, khususnya dalam pertanian tanaman jagung.

#### 9. Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP)

Salah satu tugas Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Selatan adalah memastikan bahwa standar instrumen pertanian lokal diterapkan dan didistribusikan. Hal ini dapat membantu petani meningkatkan produktivitas pertanian

mereka. BPSIP didukung dengan keberadaan instalasi penerapan standar instrumen pertanian (IP2SIP) yang salah satunya berada di Kabupaten Jeneponto, memiliki kebun percobaan yang terletak di Kelurahan Tolo Selatan Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. IP2SIP Kabupaten Jeneponto berfokus pada peningkatan jumlah benih yang terstandar, Ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan petani, penangkar, dan stakeholder lainnya sehingga agar benih dapat tersedia secara konsisten, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat guna.

Keberhasilan usaha tani, khususnya dalam budidaya jagung, sangat dipengaruhi oleh ketersediaan benih. Hasil wawancara menunjukkan bahwa IP2SIP Kabupaten Jeneponto memiliki peran strategis untuk mendukung ketersediaan benih jagung bagi petani. IP2SIP berfungsi sebagai penghubung antara petani, BPP, dan Dinas Pertanian dalam pengadaan dan distribusi benih.

*“Peran IP2SIP Kabupaten Jeneponto cukup besar dalam mendukung ketersediaan benih jagung, terutama melalui koordinasi dengan dinas terkait dan penyaluran benih kepada kelompok tani,” (AR, Penyuluh, Wawancara 02 Oktober 2023).*

*Untuk mendukung ketersediaan benih jagung berkualitas di Jeneponto, IP2SIP berperan dalam pengujian kualitas benih. Dengan adanya standar yang jelas, kami dapat memastikan bahwa benih yang beredar di kalangan petani memenuhi persyaratan kualitas. Ini mendorong penangkar benih lokal untuk menghasilkan benih yang lebih baik, sehingga petani memiliki akses ke benih unggul yang dapat ditanam” (AT, Dinas Pertanian, Wawancara 28 Juli 2023).*

IP2SIP juga bekerja sama dengan pihak BPP dalam proses pendataan kebutuhan benih dan memastikan bahwa distribusi benih berjalan sesuai rencana. Hal ini penting untuk menghindari keterlambatan penanaman dan mengurangi risiko gagal tanam akibat keterlambatan input. Dalam hal terjadi kendala, IP2SIP disebutkan turut membantu percepatan solusi melalui koordinasi lintas sektor.

*“Kalau ada kekurangan benih atau keterlambatan distribusi, biasanya kami langsung koordinasi dengan mereka” (AR, Penyuluh, Wawancara 02 Oktober 2023).*

IP2SIP tidak hanya berperan sebagai penyedia informasi dan inovasi, tetapi juga menjadi aktor penting dalam mendukung ketersediaan sarana produksi, khususnya benih jagung, bagi kelompok tani di Kabupaten Jeneponto. Namun demikian, efektivitas peran tersebut masih sangat bergantung pada sinergi antara lembaga, ketepatan pendataan, serta keterlibatan aktif kelompok tani dalam menyampaikan kebutuhannya.

*“Adanya standar kualitas benih, memberikan keamanan kami dalam penggunaan benih. Dengan jaminan mutu yang jelas, kami lebih percaya menggunakan benih lokal dari penangkar di Jeneponto. Kami dapat merencanakan penanaman dengan lebih baik dan mengurangi risiko gagal tumbuh dengan mengetahui kadar air benih dan potensi daya tumbuhnya yang sesuai standar” (AK, Petani, wawancara 22 Agustus 2023).*

## 10. Perbankan

Program pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kartu Tani berfokus pada distribusi input pertanian dan permodalan. KUR pertanian adalah kredit yang diberikan oleh perbankan kepada petani individu maupun kelompok tani (poktan dan gapoktan) yang memiliki usaha produktif tetapi belum memiliki akses formal ke perbankan. Kredit ini dapat digunakan untuk modal kerja atau investasi dalam budidaya jagung. Petani yang tergabung dalam kelompok tani dapat menggunakan kartu tani untuk menebus pupuk bersubsidi secara tepat sasaran. Selain itu, kartu tani juga dapat digunakan untuk bertransaksi secara finansial, seperti menabung dan menerima bantuan pemerintah. Petani yang terdaftar dalam kelompok tani yang dapat mengakses manfaat kartu tani, sehingga mendorong petani untuk berpartisipasi lebih aktif dalam kelembagaan pertanian.

*"KUR dan Kartu Tani adalah dua program strategis pemerintah yang sangat mendukung penguatan kelembagaan petani jagung. KUR memberikan akses permodalan yang penting untuk pengembangan usaha, sementara Kartu Tani menjamin ketersediaan input produksi yang terjangkau. Kombinasi kedua program ini mendorong petani untuk bergabung dalam kelompok tani agar lebih mudah mengakses fasilitas tersebut, sekaligus memperkuat struktur organisasi dan kerja sama di antara mereka"* (AA, Dinas Pertanian, wawancara 13 Agustus 2023).

Kombinasi antara KUR dan Kartu Tani meningkatkan struktur kelembagaan petani jagung dan meningkatkan efisiensi distribusi input pertanian yang efektif dan tepat sasaran. KUR memberikan akses permodalan yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi. Petani jagung dimotivasi oleh keduanya untuk bergabung dengan kelembagaan formal untuk memperkuat struktur sosial dan ekonomi mereka.

*"Selama ini, program KUR sangat membantu petani jagung dalam memperoleh modal usaha. Namun, pihak bank biasanya lebih percaya kalau pengajuan dilakukan lewat kelompok tani. Jadi secara tidak langsung, ini mendorong petani untuk aktif dalam kelembagaan. Begitu juga dengan Kartu Tani, petani harus tergabung dalam kelompok tani agar bisa menebus pupuk bersubsidi"* (SL, PPL, wawancara 28 Agustus 2023).

Petani jagung di Kabupaten Jeneponto telah dibantu secara strategis oleh Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kartu Tani. Perbankan lebih mudah menerima pengajuan KUR dari petani jika dilakukan melalui kelompok tani. Hal ini menunjukkan bahwa legalitas dan keberadaan kelembagaan petani menjadi syarat utama untuk akses permodalan.

*"Kelompok tani kami sangat terbantu dengan program KUR untuk mendapatkan modal usaha dengan bunga yang lebih rendah. Dulu kami sering kesulitan mendapatkan pinjaman atau berurusan dengan rentenir. Kami dapat mengembangkan usahatani jagung dengan adanya KUR yang akan digunakan untuk membeli bibit dan pupuk, dan bahkan membeli alat pertanian yang akan digunakan secara bersama dalam kelompok"* (SH, Petani, wawancara 28 Juli 2023).

Syarat utama untuk mendapatkan pupuk bersubsidi melalui mekanisme Kartu Tani adalah petani harus terdaftar dalam kelompok tani. Oleh karena itu, program ini secara tidak langsung membantu membangun dan memperkuat struktur kelompok tani yang lebih aktif dan administratif.

*"Kartu Tani sangat memudahkan kami dalam mendapatkan pupuk bersubsidi. Prosesnya jadi lebih transparan dan tepat sasaran. Dulu, seringkali ada kelangkaan atau penyelewengan pupuk. Sekarang, dengan Kartu Tani, setiap anggota kelompok memiliki hak yang jelas untuk mendapatkan pupuk sesuai dengan kebutuhan lahan mereka yang terdaftar di e-rdck"* (MS, Petani, wawancara 28 Juli 2023).

Transformasi dari petani individu menjadi petani yang terorganisasi dalam kelembagaan formal didorong oleh sinergi antara program KUR dan Kartu Tani. Ini meningkatkan efektivitas distribusi bantuan, meningkatkan transparansi pengelolaan sumber daya, dan memperkuat posisi petani dalam pemasaran.

**Stakeholder Voluntary Sector.** Terdiri dari organisasi yang didirikan oleh masyarakat maupun organisasi di bidang pendidikan. *Stakeholder* ini berkontribusi terhadap pembangunan pertanian berkelanjutan dan memberdayakan petani, dan menawarkan dukungan teknis, instruksi, ketersediaan sumber daya, dan arahan kepada petani dalam melaksanakan berbagai program pemerintah pusat dan daerah yang terkait dengan penguatan kelembagaan petani.

#### 1. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

LSM memiliki peranan sebagai penghubung antara petani dan pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto. LSM menjadi wadah penampung aspirasi petani. Dalam hal ini, keberadaan LSM untuk membantu petani dalam memastikan bahwa bantuan pertanian disalurkan dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas serta tidak adanya pihak-pihak yang memanfaatkan bantuan yang seharusnya diberikan kepada petani untuk kepentingan kampanye politik, sehingga distribusi dapat dilakukan secara adil dan transparan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu LSM:

*"Pentingnya transparansi dan keadilan dalam proses penyaluran bantuan pertanian agar semua pihak bisa mendapatkan akses yang sama tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politis. Sehingga pemerintah perlu mengeluarkan surat edaran yang mengatur dan memberikan pedoman yang jelas mengenai penyaluran bibit di Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto. Dengan adanya surat edaran tersebut, diharapkan semua stakeholders, termasuk Dinas Pertanian dan pihak-pihak yang terlibat, dapat mengawasi dan memastikan bahwa bantuan tersebut disalurkan dengan tepat"* (SS, Wawancara 17 Desember 2023).

*"LSM membantu menyampaikan kebutuhan kami kepada pemerintah daerah. Kami petani kecil merasa sulit untuk didengarkan. Namun, dengan bantuan LSM, kami sekarang dapat berbicara langsung dengan dinas terkait dan bahkan dengan anggota dewan. Selain itu, mereka menawarkan bantuan dalam mendapatkan informasi tentang program-program pemerintah dan bagaimana mendapatkan bantuan"* (RH, Petani, wawancara 13 Oktober 2023).

LSM berfungsi sebagai penghubung antara petani dan pengambil kebijakan. Mereka melakukan advokasi ke lembaga pemerintah seperti Dinas Pertanian, DPRD, atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk memastikan suara petani mendapat perhatian selama proses perumusan kebijakan, penganggaran, dan pembagian bantuan pertanian. Berdasarkan wawancara, menyampaikan bahwa :

*“Kami sangat mengapresiasi peran LSM dalam memberdayakan petani, khususnya dalam pembentukan dan penguatan kelompok tani jagung. Keberadaan LSM di lapangan sangat membantu karena mereka dapat menjangkau petani secara langsung dan menyampaikan aspirasi mereka yang mungkin tidak disampaikan secara formal kepada kami. Kehadiran mereka di lapangan membantu pemerintah dalam sosialisasi program dan memantau penyaluran bantuan pemerintah kepada petani”* (MI, Dinas Pertanian, Wawancara 25 Oktober 2023).

Meskipun LSM dapat membantu petani dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah, tidak semua LSM melakukannya dengan baik. Keberadaan LSM berdampak negatif pada petani dan pemerintah daerah. Petani banyak mengeluh tentang ketergantungan yang tidak sehat terhadap LSM. Beberapa LSM menyatakan keberadaan mereka sebagai "jembatan" antara kelompok tani dan pemerintah atau pihak ketiga, tetapi dalam praktiknya mereka bertindak sebagai perantara proyek yang menguntungkan individu. Padahal bantuan seharusnya diberikan secara langsung dan gratis kepada penerima, petani sering diminta memberikan imbalan atau "jatah" dari bantuan yang mereka terima dengan alasan sebagai kompensasi untuk jasa pengurusan.

Selain itu, hubungan antara petani dan pihak dinas terkait kadang-kadang terganggu karena keberadaan LSM yang terlalu keras dalam menyuarakan kritik terhadap pemerintah. Sebagian petani menjadi curiga atau bahkan menolak program pemerintah yang sebenarnya bertujuan untuk memberdayakan mereka karena cerita-cerita negatif yang disampaikan oleh LSM. Meskipun tidak ada bukti penyalahgunaan, kelompok tani kadang-kadang mengabaikan program bantuan karena dianggap sebagai "proyek politik". Beberapa LSM melakukan pendekatan intensif kepada kelompok tani menjelang pemilihan umum atau pilkada untuk mendukung kandidat tertentu. Situasi ini menyebabkan perselisihan dalam kelompok tani dan mengganggu stabilitas program pertanian.

*“Kami tidak menentang keberadaan LSM, tetapi ada beberapa dari mereka yang sering membuat laporan tanpa memberikan klarifikasi. Dalam beberapa kasus, itu hanyalah tekanan politik menjelang pilkada”* (AR, PPL, wawancara 14 September 2023).

*“LSM mengatakan mereka akan mengawasi proyek, tetapi mereka akhirnya meminta uang dari proyek irigasi. Mereka mengancam akan melapor ke media apabila permintaannya tidak dituruti”* (SK, Kepala Desa, wawancara 21 September 2023).

Pemerintah juga menghadapi masalah dengan LSM yang sering melaporkan dugaan pelanggaran atau penyalahgunaan tanpa bukti kuat. Pejabat dan aparat desa takut dilaporkan ke penegak hukum karena laporan yang berlebihan dan tidak berdasar. Akibatnya, mereka enggan membuat keputusan strategis atau melibatkan petani dalam kegiatan tertentu. Hal ini menyebabkan program pembangunan pertanian secara keseluruhan kurang efektif. Secara umum, LSM harus menjadi mitra kritis dan solutif bagi pemerintah dan petani. Namun, jika mereka tidak dikelola dengan baik, keberadaan mereka dapat menghambat proses pemberdayaan dan pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan.

## 2. Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga memiliki peran strategis dalam mendukung penguatan kelembagaan petani jagung. Melalui berbagai program kerja, BUMDes dapat berfungsi sebagai penyedia layanan usaha tani dan penopang kelembagaan ekonomi petani di tingkat desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi desa dengan menjadi pusat jaringan bisnis yang menghubungkan kelompok tani dengan pasar, lembaga keuangan, dan sumber daya produksi. Di beberapa desa di Kabupaten Jeneponto, ada upaya untuk mengintegrasikan BUMDes dan kelompok tani sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha tani secara kolektif dan berkelanjutan. Beberapa kerjasama yang dilakukan salah satunya adalah BUMDes, yang berfungsi sebagai penyedia sarana produksi pertanian seperti pupuk, benih, dan pestisida, yang dibeli secara kolektif oleh kelompok tani melalui sistem pembayaran fleksibel. Ini membantu petani mendapatkan input pertanian dengan harga yang lebih murah dan kualitas yang lebih terjamin. Sebaliknya, kelompok tani berfungsi sebagai pasar tetap bagi unit usaha perdagangan BUMDes.

*“BumDes membantu kami dalam mendapatkan sarana produksi, seperti pupuk dan benih. Kami merasa sangat terbantu, meskipun tidak langsung melalui pinjaman tunai, tetapi melalui kerja sama dalam pembelian sarana produksi. Selain itu, masyarakat desa sebagian menerima manfaat BumDes, termasuk dukungan untuk kegiatan pertanian”* (IK, Petani, wawancara 02 Agustus 2023).

BUMDes berperan sebagai penggerak utama dalam memperkuat sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani secara keseluruhan. BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang berperan penting dalam pengembangan agribisnis di tingkat desa. Di Kabupaten Jeneponto terdapat 83 BUMDes yang bergerak di bidang pemasaran, simpan pinjam, perdagangan, industri rumah tangga, distributor pupuk bersubsidi, penjualan sarana produksi pertanian. Peran BUMDes yang bergerak di bidang pertanian adalah menyediakan pupuk yang dibutuhkan oleh petani. BUMDes bertanggung jawab dalam mendistribusikan pupuk kepada petani, mereka dapat menggunakan sistem penjualan langsung, tujuannya agar petani dapat memperoleh pupuk dengan mudah. Selain itu, BUMDes juga menyediakan sarana produksi berupa benih dan pestisida yang dibutuhkan oleh petani, sehingga memudahkan petani dalam memenuhi kebutuhan sarana produksi. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa, menyatakan bahwa:

*“Kami dorong BUMDes untuk bersinergi dengan kelompok tani, karena kami ingin petani tidak hanya produksi tapi juga punya kekuatan kelembagaan. BUMDes punya posisi strategis untuk membantu petani dari sisi usaha, termasuk akses permodalan yang mudah dan membeli hasil panen jagung petani secara langsung”* (SK, Wawancara tanggal 26 juli 2023).

*“Memberikan kemudahan akses bagi petani dalam memperoleh input produksi yang berkualitas merupakan salah satu manfaat BumDes. PPL dapat bekerja sama dengan BumDes untuk memastikan petani mendapatkan pupuk, pestisida, dan benih unggul yang disarankan. Selain itu, dengan adanya BUMDes dapat mengurangi ketergantungan petani pada tengkulak dan praktik penjualan input yang tidak menguntungkan”* (AR, PPL, Wawancara 30 Juli 2023).

BUMDes juga dapat berperan sebagai lembaga keuangan mikro desa yang memberikan pinjaman usaha tani berbunga ringan kepada petani. BUMDes dapat mengelola kredit dengan lebih baik karena mereka melakukan pengawasan bersama dengan perangkat Desa. Selain itu, beberapa BUMDes mulai mengembangkan unit usaha perdagangan hasil pertanian yang membantu petani memasarkan hasil panen secara kolektif, sehingga memperkuat posisi tawar petani karena mereka tidak lagi bergantung sepenuhnya pada tengkulak. Kelompok tani memperoleh kepastian pembeli dan harga yang lebih kompetitif. Kerja sama antara BUMDes dan kelompok tani atau gabungan kelompok tani (gapoktan) juga dilakukan dalam bentuk pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha tani. Melalui kegiatan ini, kelompok tani tidak hanya diperkuat secara kelembagaan, tetapi juga ditingkatkan kapasitasnya dalam menjalankan usaha secara lebih profesional dan berorientasi pasar. BUMDes tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan ekonomi, tetapi juga sebagai mitra pembangunan pertanian yang mendukung kemandirian kelompok tani dan ketahanan pangan desa.

### 3. Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung kelembagaan petani jagung yang tidak hanya terbatas pada aspek pendidikan akademik, tetapi juga melalui program-program pengabdian kepada masyarakat, penelitian terapan, serta kerja sama dengan pemerintah daerah. Program penelitian bertujuan untuk menghasilkan teknologi pertanian yang lebih ramah lingkungan dan hemat biaya. Penelitian-penelitian ini sering digunakan sebagai referensi untuk program pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Misalnya, studi tentang teknik pengelolaan lahan yang lebih efisien atau inovasi dalam peralatan pertanian yang dapat menurunkan biaya produksi dan meningkatkan hasil panen. Dengan demikian, perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai institusi pendidikan tetapi juga berfungsi sebagai katalisator perubahan yang mendorong perbaikan sektor pertanian di Kabupaten Jeneponto.

*“Perguruan tinggi memainkan peran penting dalam melakukan penelitian tentang masalah yang dihadapi petani jagung, termasuk aspek kelembagaan. Penelitian mereka dapat membantu kami membuat kebijakan dan program yang*

*lebih tepat sasaran untuk membantu kelompok tani. Selain itu, mahasiswa yang berpartisipasi dalam program pengabdian masyarakat seringkali turun langsung ke lapangan untuk mendampingi dan memberikan pengetahuan kepada petani, yang sangat membantu dalam meningkatkan kemampuan mereka” (AT, Dinas Pertanian, Wawancara 27 Juli 2023).*

Salah satu program yang memberikan dampak signifikan adalah Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik yang difokuskan pada sektor pertanian. Dalam program KKN ini, mahasiswa terlibat langsung dalam pendampingan kelompok tani dalam berbagai hal, seperti membantu dalam pencatatan administrasi, membuat rencana usaha tani, dan membantu menggunakan teknologi pertanian yang dapat mempercepat dan mempermudah proses produksi.

*“Kami sangat menyambut baik kedatangan mahasiswa dan dosen ke desa kami untuk membantu petani jagung. Mereka memberikan wawasan baru tentang metode pertanian yang lebih canggih dan efisien. Petani kami sekarang mengetahui bibit unggul, metode pemupukan yang tepat, dan cara yang lebih baik untuk memberantas hama dan penyakit, sehingga hasil panen petani dapat meningkat” (SK, Kepala Desa, wawancara 26 Juli 2023).*

Dari wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa, memberikan penilaian positif terhadap peran mahasiswa KKN:

*“Program kerja yang dilaksanakan setelah dilakukannya observasi oleh anak-anak KKN di beberapa dusun dan mendapati adanya masalah terkait dengan kelembagaan kelompok tani yaitu, masih lemahnya pengetahuan terkait standar kelompok tani yang ideal”(II, Wawancara 19 Oktober 2023).*

Perguruan tinggi memainkan peran penting dalam meningkatkan kemampuan petani, baik dalam hal keterampilan teknis pertanian maupun manajemen dan pengelolaan organisasi pertanian. Sinergi antara perguruan tinggi, petani, dan pemerintah daerah memperlihatkan bahwa kolaborasi ini dapat menciptakan ekosistem pertanian yang lebih berkelanjutan dan berkembang.

#### 4. Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA)

Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) berfokus pada kegiatan sosial ekonomi di sektor pertanian, perikanan dan kehutanan. KTNA mengembangkan budaya agribisnis pedesaan yang berwawasan lingkungan dan berbasis pedesaan. Sebagai mitra pemerintah, KTNA yang terdiri dari gabungan kelompok tani (Gapoktan), mendorong pertumbuhan sektor pertanian, kelautan dan perikanan serta masyarakat kehutanan, peternakan, dan perkebunan. Petani dan nelayan menghadapi tantangan yang semakin besar dalam menangani dan memasarkan produk mereka di era pembangunan yang semakin kompleks dan kompetitif. KTNA membantu menyebarkan informasi, mendorong inovasi teknologi, dan membantu program pemerintah di tingkat lapangan. KTNA membantu pemerintah menjalankan program pembangunan pertanian, perkebunan dan perikanan serta memberikan petani penyuluhan dan pemahaman.

*“Bagi kami penyuluh di lapangan, KTNA menjadi mitra penting karena banyak petani yang terhubung dengan mereka. Kami sering bekerja sama dengan*

*pengurus KTNA untuk menyebarkan informasi tentang teknologi pertanian baru, melaksanakan pelatihan, dan menemukan petani yang berpotensi untuk menyebarkan informasi pertanian di kelompok mereka masing-masing” (AS, PPL, wawancara 21 September 2023).*

Melalui berbagai intervensi berbasis edukasi, kolaborasi, dan dukungan kebijakan pemerintah, program kerja KTNA membantu memperkuat kelembagaan petani jagung. Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa program kerja KTNA membantu kelompok tani jagung menjadi lebih mampu dan lebih mandiri.

*“Di Dinas Pertanian, kami mengakui peran KTNA sebagai organisasi representatif petani. Dengan bantuan mereka, kami dapat menemukan kebutuhan nyata petani jagung di lapangan dan membuat program pemberdayaan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, KTNA sering terlibat dalam proses penyusunan kebijakan pertanian di tingkat daerah, sehingga kebijakan yang dibuat lebih memenuhi kebutuhan petani” (AA, Dinas Pertanian, Wawancara 27 September 2023).*

Pengurus KTNA kabupaten mengungkapkan bahwa upaya kemitraan dan dukungan kebijakan pemerintah yang difasilitasi oleh KTNA membantu petani mendapatkan akses ke pasar dan program pemerintah.

*“Kelompok tani jagung jadi lebih baik dalam hal budidaya, pemasaran, sampai ke pengelolaan organisasi. Karena kurangnya informasi dalam mengakses program pemerintah. Kami membantu petani mendapatkan akses pupuk subsidi, benih unggul, bahkan kredit usaha tani. Tapi semua itu butuh kelompok yang kuat dan tertib” (AM, Pengurus KTNA, wawancara tanggal 21 September 2023).*

Banyak kelompok tani jagung sekarang menjadi lembaga profesional, bahkan mampu mendapatkan pembiayaan formal seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Mereka sebelumnya tidak memiliki struktur organisasi dan sistem pencatatan keuangan yang baik. Selain itu, KTNA mengadakan pertemuan dengan petani dan studi banding ke daerah. Studi banding ini memungkinkan kelompok tani untuk belajar dari keberhasilan kelembagaan petani di daerah lain. Proses ini menciptakan jejaring kelembagaan dan kesadaran kolektif, mempercepat adopsi inovasi. Kelompok tani jagung yang sebelumnya tidak memiliki informasi atau akses terhadap bantuan benih, pupuk bersubsidi, alat dan mesin pertanian (alsintan), kini dapat memanfaatkan KTNA sebagai jembatan komunikasi antara petani dan pemerintah.

##### 5. Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S)

P4S dibentuk berdasarkan Permentan Nomor 33/Permentan/SM230/7/2016, tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya. P4S adalah lembaga masyarakat yang dimiliki dan dikelola petani langsung, baik secara perorangan maupun kelompok, untuk meningkatkan peran aktif dalam pembangunan pertanian dengan meningkatkan sumber daya manusia pertanian seperti pelatihan, penyuluhan, dan pendidikan. Beberapa peran P4S yaitu (1) meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, (2) menyebarkan dan menyampaikan

informasi tentang teknologi agribisnis, (3) membantu dalam penerapan teknologi, (4) mengembangkan metode pembelajaran melalui metode percontohan, (5) membantu penyuluhan pertanian dan (6) menumbuhkan semangat kepemimpinan dan membantu memenuhi kebutuhan petani.

*“P4S merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam kegiatan pelatihan dan pemberdayaan petani. P4S yang dikelola oleh petani sendiri memiliki keunggulan dalam hal kedekatan dengan petani lain dan pemahaman tentang kondisi lokal. Kami sering melibatkan P4S dalam program pelatihan kami karena mereka memiliki jejaring petani yang kuat dan mampu menyampaikan materi pelatihan secara efektif”* (MI, Dinas Pertanian, wawancara 12 September 2023).

P4S sangat strategis untuk meningkatkan sumber daya manusia petani di masa depan. Karena itu, petani sangat mengapresiasi peran kelembagaan pertanian ini. P4S Merapi di Desa Rumbia Kabupaten Jeneponto memiliki peran dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia petani untuk menghasilkan petani yang kompetitif di masa depan. P4S menjadi tempat belajar petani. Prinsip dasar P4S adalah keswadayaan untuk mengembangkan dan menjaga kemandirian melalui kemampuan memecahkan masalah baik teknis, sosial maupun ekonomi, dan demokrasi dalam melaksanakan setiap kegiatan pengelolaan dan penggunaan jasa kesepakatan dan keterlibatan bersama secara aktif. Hasil wawancara informan menguraikan :

*“P4S bagi kami seperti sekolah jagung nonformal. Materi pelatihan P4S sangat praktis dan sesuai dengan masalah yang kami temui di lapangan. Kami diajarkan bagaimana memilih bibit yang baik, bagaimana menggunakan pupuk yang tepat, dan bagaimana melawan hama penyakit yang sering menyerang jagung. Pengetahuan ini dapat diterapkan di kebun kami sendiri”* (CM, Petani, wawancara 24 Agustus 2023).

P4S membantu kelembagaan petani jagung secara strategis melalui berbagai program kerja yang berfokus pada pemberdayaan, partisipasi, dan pendidikan. Tujuan program ini adalah untuk memperkuat kelembagaan kelompok tani dan meningkatkan kemampuan individu petani. Salah satu bentuk intervensi yang paling efektif adalah memberikan pelatihan dalam teknik budidaya jagung yang mengandalkan inovasi dan teknologi modern yang ada di daerah tersebut.

*“Keberadaan P4S sangat membantu dalam membentuk kemandirian kelompok tani, khususnya di komoditas jagung. Tidak hanya pelatihan budidaya, tetapi juga instruksi tentang cara petani mengelola kelompoknya dengan lebih profesional dan teratur. P4S memberikan pelatihan kepada petani. Kelompok tani yang ikut program mereka umumnya lebih aktif, terutama dalam memanfaatkan teknologi pertanian dan akses pasar. Ini menyebabkan kelompok tani menjadi lebih kuat dalam menghadapi persaingan pasar”* (PPL, wawancara 05 September 2023).

Pelatihan ini tidak hanya memberi petani pengetahuan praktis, tetapi juga mendorong perubahan perilaku dalam mengelola usaha tani. Secara tidak langsung meningkatkan fungsi kelompok tani sebagai tempat untuk belajar dan berbagi informasi. Selain itu, pendekatan sekolah lapang usahatani memungkinkan petani untuk secara aktif mencatat, menganalisis, dan mengevaluasi apa yang mereka

lakukan dalam pertanian. Program kerja P4S meningkatkan kemampuan teknis petani dan memperkuat kelembagaan. Program-program ini menjadi dasar untuk membangun kelembagaan petani jagung yang fleksibel, inklusif, dan berkelanjutan.

**Stakeholder Private Sector** adalah terdiri dari pengusaha sarana produksi dan pedagang hasil pertanian. *Stakeholder* ini dapat meningkatkan akses petani terhadap sumber sarana produksi seperti benih jagung, pupuk organik dan pupuk kimiawi, obat-obatan pertanian dan teknologi yang dapat diterapkan. Selain itu, keberadaan *stakeholder* tersebut memberikan kemudahan bagi petani dalam memasarkan hasil panen mereka.

#### 1. *PT. Jiva Agriculture Indonesia*

Memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan kepada petani berbasis aplikasi, yang mencakup empat layanan untuk petani jagung: membeli hasil panen petani; menjual sarana produksi pertanian (benih, pupuk, dan pestisida); memberikan saran untuk meningkatkan hasil panen dari tim agronomi yang dapat diakses melalui aplikasi; memberikan pinjaman dimuka kepada petani untuk membeli sarana pertanian.

*“Kemitraan antara PT. Jiva dan petani mempermudah tugas kami sebagai PPL. PT. Jiva memiliki tim ahli agronomi yang juga turun ke lapangan dan memberikan bimbingan teknis kepada petani. Ini sangat membantu kami dalam mentransfer teknologi dan praktik pertanian yang baik secara lebih efektif. Kelembagaan petani juga menjadi lebih kuat karena mereka memiliki akses langsung ke pengetahuan dan teknologi dari PT. Jiva”* (WD, PPL, wawancara 09 Oktober 2023).

PT. JIVA memungkinkan petani melakukan pengajuan dimuka untuk membeli sarana produksi melalui sistem pinjaman. Penggunaan aplikasi sahabat jiva yang dapat diunduh melalui aplikasi *PlayStore* untuk mengidentifikasi petani dengan NIK, nama, alamat, dan luas lahan. PT. JIVA kemudian menentukan apakah petani disetujui untuk pengajuan. Pembayaran dilakukan melalui akun virtual, dan pembelian jagung dilakukan melalui aplikasi dengan bantuan sahabat JIVA. JIVA akan menimbang jagung petani secara akurat dan memberikan harga jagung berdasarkan kadar air. Sahabat JIVA, juga dikenal sebagai pengepul jagung JIVA, membantu menyiapkan truk, alat *drossing* (pemipil) jagung dan buruh yang seluruh biayanya ditanggung oleh JIVA. Berdasarkan hasil wawancara dengan Petani, diperoleh informasi:

*“Aplikasi sahabat jiva sangat membantu untuk menjual jagung dengan timbangan yang jujur dan harga yang lebih tinggi dari harga pasaran. Selain itu, kami juga dapat membeli sarana produksi saat musim tanam dan membayarnya setelah panen ”* (RH, Wawancara 31 Agustus 2023).

Untuk mendukung keberlanjutan dan kemandirian petani jagung, PT. Jiva Agriculture Indonesia telah mengembangkan berbagai program kerja. Program-program ini membantu memperkuat kelembagaan petani secara langsung maupun tidak langsung. Melalui penerapan pendekatan berbasis teknologi dan kemitraan,

kelompok tani ini dapat meningkatkan efisiensi produksi, keterhubungan pasar, dan kapasitas kelembagaan. Di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, kemitraan usaha tani jagung hibrida adalah salah satu program yang paling berhasil. Penggunaan benih unggul, pendampingan teknis selama masa tanam, dan skema pembelian hasil panen secara langsung ditawarkan oleh pola kemitraan PT. JIva. Pola ini meningkatkan peran kelompok tani dalam mengatur produksi dan pemasaran serta menjamin pendapatan petani tetap stabil.

*“PT. Jiva berperan dalam membuka akses pasar yang lebih luas dan stabil bagi hasil panen jagung kami, karena mereka memiliki jaringan dengan industri pakan ternak dan pengolahan jagung lainnya. Dengan adanya kepastian pasar dan harga yang lebih baik melalui kemitraan ini, kelompok tani kami lebih termotivasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi secara bersama-sama, yang memperkuat posisi tawar kelompok kami”* (RM, Petani, wawancara 24 Juli 2023).

Salah satu langkah penting yang memperkuat kelembagaan petani adalah program pembelian hasil panen langsung dari petani ke pabrik. Program ini mengubah kelompok tani menjadi stakeholder utama dalam penyaluran input produksi dan pengelolaan hasil panen bersama. PT. Jiva memberikan skema pembiayaan usaha tani, tetapi hasil panen harus dijual melalui saluran distribusi perusahaan. Kelompok tani sangat membantu program ini, terutama dalam hal mengelola bonus dan insentif pengiriman awal, mengawasi distribusi sarana produksi, dan memverifikasi peserta. Dengan demikian, kelompok tani berfungsi sebagai lembaga ekonomi dan tempat untuk mengatur dan menjual hasil pertanian.

*“Dulu kita menjual jagung ke tengkulak, harganya tidak menentu. Tapi sejak ikut program Jiva, kita bisa jual langsung ke pabrik. Pembayarannya juga cepat, dan kelompok kami dapat bonus karena kirim lebih awal. Kelompok tani sekarang berfungsi sebagai tempat simpan uang untuk kas dan merencanakan untuk membeli alat panen bersama”* (MS, petani, wawancara 31 Agustus 2023).

Salah satu inovasi teknologi PT. Jiva adalah aplikasi sahabat jiva, yang membantu mempercepat transformasi digital di tingkat petani. Aplikasi sahabat jiva telah mendorong kelompok tani untuk beralih ke sistem pencatatan digital dan pengelolaan informasi berbasis data, dan menawarkan mereka kemampuan untuk melakukan konsultasi online dengan penyuluh swasta. Secara kelembagaan, kelompok tani diminta untuk membentuk struktur kepengurusan yang lebih aktif dan responsif terhadap kemajuan teknologi dan pasar. PT. Jiva meningkatkan produktivitas petani secara individu dan memperkuat struktur kelembagaan petani dengan meningkatkan kemampuan organisasi, memberikan autonomi dalam mengelola input dan output, dan membangun hubungan dengan pasar, lembaga keuangan, dan penyedia teknologi. Sistem agribisnis yang inklusif bergantung pada kelembagaan petani, dan model kemitraan ini akan bertahan.

## 2. PT. Bisi International Tbk

Sebagai produsen benih jagung hibrida terbesar di Indonesia, PT. BISI International, Tbk. berkomitmen mendukung swasembada jagung melalui program kemitraan jagung (*corn partnership*). Untuk mendukung konsep kemitraan, model

*three parted* digunakan. Tiga pihak tersebut adalah PT. BISI International Tbk, PT. Charoen Pokphand Indonesia (CPI) dan petani mitra (*Contact Grower*). PT. BISI berkolaborasi dengan petani mitra untuk menanam jagung di Kabupaten Jeneponto. Para petani akan menerima pinjaman benih jagung hibrida berkualitas tinggi dari BISI melalui kemitraan. Varietas jagung yang ditawarkan adalah varietas yang benar-benar dibutuhkan oleh para petani dan cocok dengan lahan dan mudah ditemukan.

*“PT. Bisi membantu mengembangkan komoditas jagung di Kabupaten Jeneponto melalui program kemitraan. Mereka membantu petani tidak hanya dengan menyediakan benih berkualitas tinggi, tetapi juga dengan memberikan teknologi dan pengetahuan kepada mereka melalui berbagai program pelatihan. Dengan mendapatkan akses ke informasi dan praktik pertanian terbaik, keterlibatan PT. Bisi secara tidak langsung meningkatkan kapasitas dan kelembagaan petani”* (MI, Dinas Pertanian, Wawancara 25 Oktober 2023).

*“PT. Bisi mendorong kelompok tani yang lebih kuat melalui program kemitraan mereka, seringkali meminta petani untuk bergabung dalam kelompok agar lebih mudah memberikan bimbingan dan penyaluran benih. Ini secara tidak langsung meningkatkan struktur organisasi dan kerjasama antar petani dalam satu kelompok”* (AR, PPL, wawancara 30 Oktober 2023).

PT. BISI adalah perusahaan pembenihan yang memberikan pinjaman kepada petani dalam bentuk paket kemitraan yang mencakup boom jagung, anti gulma, dan benih jagung yang unggul. PT. BISI juga menyediakan *agrochemical* lainnya, seperti herbisida, pestisida, fungisida, dan insektisida, untuk membantu petani mitra meningkatkan produksi dan kualitas jagung mereka. PT. BISI tidak hanya menyiapkan kebutuhan material tetapi juga membantu mulai dari persiapan lahan, budidaya, dan pembagian hasil panen. Dengan demikian, sesuai dengan persyaratan PT. Charoen Pokphand Indonesia, para petani dapat mencapai hasil panen yang ideal dan berkualitas. Semua benih, pestisida, dan pupuk harus dibayar setelah panen atau setelah penjualan hasil panen dipotong. Sebagai mitra perusahaan, PT. Charoen Pokphand Indonesia akan membeli jagung petani dengan harga pasar saat pengiriman. Selain itu, lebih aman dan menguntungkan karena pembayarannya dilakukan dihari yang sama. Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa :

*“Sejak bermitra dengan PT. Bisi, hasil panen kami jauh lebih baik. Kami diberi benih jagung Bisi 2 dan Bisi 18, yang tahan kering dan hasilnya tinggi. Selain itu, petugas dari Bisi juga rutin datang memberikan arahan soal pemupukan dan pengendalian hama”* (CM, Petani, wawancara 26 Oktober 2023).

*“Dulu kami jalan sendiri, pas panen harga rendah karena jual ke tengkulak. Tapi sejak ikut program kemitraan, hasil panen dibeli langsung oleh mitra perusahaan. Kelompok juga lebih aktif karena semua harus koordinasi soal jadwal tanam dan panen”* (MS, Petani, wawancara 26 Oktober 2023).

*“Yang paling terasa itu bantuan benih dan jaminan pasar. Kami tidak takut rugi karena hasil panen ada yang tampung. Kelompok kami juga mulai disiplin, karena kalau mau ikut program harus ada pencatatan dan rapat rutin”* (AK, Petani, wawancara 26 Oktober 2023).

### 3. Distributor Pupuk

Distributor yang bertanggung jawab atas distribusi pupuk bersubsidi yang diatur oleh pemerintah, berperan langsung dalam menjaga kelompok tani tetap legal dan tertib. Distributor hanya dapat memberikan pupuk kepada kelompok tani yang memenuhi persyaratan kelembagaan, seperti terdaftar dalam sistem Simluhtan dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), dan secara aktif terlibat dalam kelompok tani. Kelompok tani secara langsung memperkuat struktur organisasinya sebagai akibat dari situasi ini.

*"Kami sering mengadakan pertemuan dengan kelompok tani untuk melakukan sosialisasi mengenai pendataan e-RDKK untuk mendapatkan pupuk bersubsidi serta menjelaskan mengenai aturan dalam penyaluran pupuk bersubsidi yang hanya diberikan untuk luas lahan maksimal 2 hektar" (AS, PPL, wawancara 15 Agustus 2023).*

*"Kami hanya memberikan pupuk kepada kelompok yang aktif. Jika tidak ada pengurus, catatan lahan, atau masuk ke Simluhtan, kami tidak dapat melayani. Oleh karena itu, kelompok tani sekarang bertanggung jawab atas administrasinya dengan lebih serius" (MT, Distributor Pupuk, wawancara 07 September 2023).*

Pupuk bersubsidi dapat diberikan kepada kelompok yang memenuhi syarat kelembagaan. Distributor mengharapkan adanya struktur organisasi kelompok tani yang aktif dan formal. Ini mendorong kelompok tani untuk membuat keputusan bersama, mencatat, dan berkumpul secara teratur.

*"Kami selalu kesulitan dalam memperoleh pupuk bersubsidi. Ketika sudah memasuki waktu pemupukan, kadang pupuk tidak tersedia di kios pengecer, alasan mereka karena adanya keterlambatan dalam pendistribusian pupuk ke kios pengecer. Pernah juga kami mendapatkan pupuk yang 1 karung itu dibagi-bagi ke dalam kemasan liter karena jumlah yang datang jumlahnya terbatas sehingga untuk meratakan pembagian pupuk, makanya dikemas ulang ( Petani, wawancara 26 Agustus 2023).*

Keterlibatan distributor pupuk merupakan faktor penting dalam hal penyediaan input secara teknis serta sebagai pendorong untuk meningkatkan kelembagaan petani secara keseluruhan. Distributor pupuk membantu memperkuat kelembagaan petani dalam memastikan ketersediaan input dan membentuk perilaku kelembagaan yang lebih bekerja sama, bertanggung jawab, dan fleksibel dalam jangka panjang.

### 4. Toko Tani

Toko Tani memudahkan petani mendapatkan sarana produksi berkualitas tinggi. Keberadaan toko tani untuk petani di Kabupaten Jeneponto akan membantu petani mendapatkan peralatan pertanian yang murah dan dapat diakses kapan saja. Kebutuhan sarana pertanian yang cukup, mudah, dan murah akan memastikan bahwa pekerjaan petani memberikan hasil yang optimal. Petani juga memiliki semua peralatan pertanian yang diperlukan, sehingga produk pertanian yang mereka hasilkan memiliki kualitas terbaik.

*“Saya percaya bahwa keberadaan toko tani terutama yang dikelola oleh BUMDes memberikan kemudahan bagi petani untuk membeli pupuk, benih, dan pestisida. Petani tidak perlu lagi jauh-jauh ke Ibukota Kabupaten untuk membeli sarana produksi karena sudah tersedia di Desa dan bisa juga diutang” (SK, Kepala Desa, wawancara 27 Agustus 2023).*

*“Kelembagaan petani secara tidak langsung diperkuat oleh keberadaan toko tani yang menyediakan sarana produksi berkualitas tinggi dan sesuai rekomendasi. Petani cenderung mendapatkan hasil panen yang lebih baik ketika mereka mendapatkan bibit unggul, pupuk yang tepat, dan pestisida yang efektif” (WD, PPL, wawancara 10 Oktober 2023).*

Toko tani menyediakan benih jagung, pupuk, dan pestisida yang berkualitas tinggi dengan harga terjangkau, yang berdampak langsung pada peningkatan produktivitas petani jagung, yang membuat mereka berperan strategis dalam memperkuat kelembagaan petani jagung. Toko tani sering bekerja sama dengan kelompok tani dalam pendistribusian sarana produksi, yang memperkuat posisi kelompok tani di sisi kelembagaan. Kelompok tani dapat merencanakan kebutuhan saprotan secara kolektif dan mendapatkan harga yang lebih kompetitif dengan adanya toko tani.

*“Dengan adanya toko tani di Desa memudahkan kami untuk mendapatkan benih, pestisida dan pupuk. Biasanya kami perlu memesan jauh-jauh hari dan harganya juga mahal. Selain itu, penjual di toko tani selalu memberikan penjelasan tentang cara pemakaian pestisida yang benar dan jenis pestisida yang ampuh untuk memerangi hama atau penyakit yang menyerang tanaman jagung” (RH, Petani, wawancara 24 Oktober 2023).*

#### 5. Pedagang Pengumpul

Pedagang pengumpul membeli hasil panen jagung dari petani yang ada di desa dan kemudian menjualnya lagi untuk mendapatkan keuntungan. Petani yang membutuhkan uang untuk kegiatan usahatani dan kebutuhan mendesak, mereka dapat meminta pinjaman dari pedagang yang memiliki modal besar. Petani biasanya lebih suka meminjam modal kepada pedagang pengumpul daripada bank yang disalurkan melalui program kredit usaha tani. Petani mengatakan bahwa prosedur untuk mendapatkan kredit sangat sulit bagi mereka. Namun, jika petani meminjam modal kepada pedagang, prosesnya dapat lebih cepat tanpa adanya persyaratan yang memberatkan petani. Pedagang memberikan kemudahan kepada petani dalam pemasaran hasil panen karena pedagang langsung mendatangi rumah petani untuk membeli hasil panen petani. Selain itu, pedagang menyiapkan alat *Corn Sheller* (mesin pemipil jagung).

*“Pedagang sangat membantu saya yang modalnya kurang untuk membeli sarana produksi karena mereka memberikan pinjaman uang untuk membeli sarana produksi, tetapi dengan persyaratan hasil panen jagung harus kami jual kepada pedagang dengan harga yang ditentukan secara sepihak oleh mereka” (DT, Petani, wawancara 24 Oktober 2023).*

*‘Pedagang pengumpul membantu petani menjual hasil panen mereka, terutama bagi petani kecil. Di sisi lain, karena petani sering bergantung pada pedagang*

*pengumpul, mereka sering menurunkan harga di tingkat petani. Pinjaman dari pedagang pengumpul dapat menjadi solusi cepat untuk masalah modal, tetapi petani harus hati-hati dengan persyaratannya. Kami terus mendorong petani untuk mendapatkan modal dari lembaga keuangan resmi dan memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam pemasaran” (WD, PPL, wawancara 10 Oktober 2023).*

*‘Kami menyadari bahwa pedagang pengumpul memainkan peran penting dalam mengumpulkan hasil panen petani, terutama di daerah dengan jaringan pasar yang terbatas. Namun, kami juga terus berupaya untuk memperkuat kelembagaan petani agar mereka dapat memasarkan hasil panen mereka secara kolektif dan mendapatkan harga yang lebih baik. Dalam hal modal, kami juga mensosialisasikan akses ke KUR dan program pembiayaan pertanian lainnya untuk membuat petani tidak terlalu bergantung pada modal dari pedagang pengumpul’ (AA, Dinas Pertanian, wawancara 13 Oktober 2023).*

Petani lebih memilih meminjam modal dari pedagang pengumpul daripada lembaga keuangan formal seperti bank karena peran utama pedagang pengumpul mempermudah akses modal yang dibutuhkan petani untuk melanjutkan usahatani mereka. Banyak petani menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan karena prosedur yang rumit dan persyaratan yang ketat dari program Kredit Usaha Rakyat. Di sisi lain, pedagang pengumpul menawarkan solusi yang lebih cepat dan mudah, tanpa syarat yang memberatkan. Pedagang pengumpul bertindak sebagai penyedia modal yang sangat dibutuhkan petani, terutama petani kecil yang sulit mendapatkan sumber pembiayaan lain.

Pedagang pengumpul membantu petani dengan pemasaran hasil panen selain membantu dalam permodalan. Petani tidak perlu khawatir tentang distribusi atau mencari pembeli karena pedagang biasanya datang langsung ke rumah mereka untuk membeli hasil panen jagung mereka. Hal ini sangat membantu, terutama bagi petani yang tinggal jauh dari pusat pasar atau tidak memiliki sarana transportasi yang memadai. Seperti yang diungkapkan oleh seorang petani :

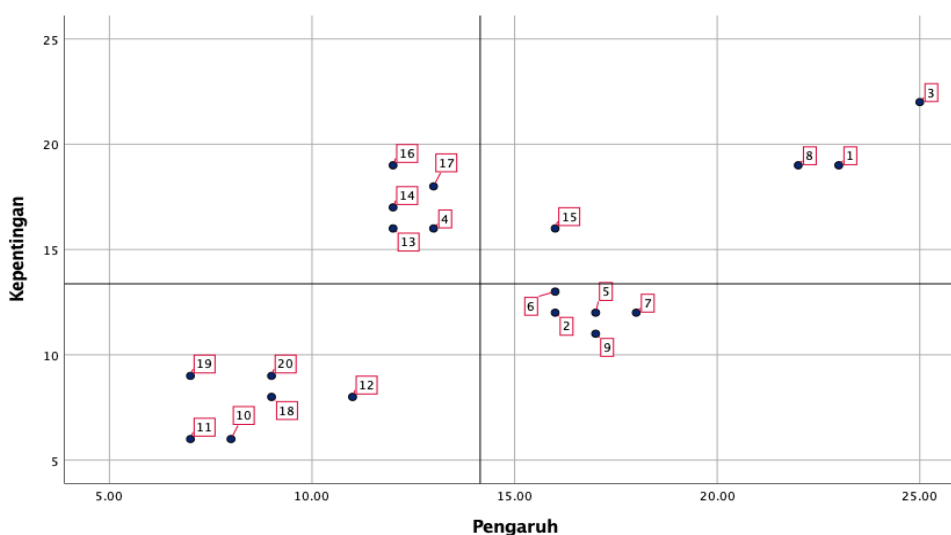
*“Setelah panen pedagang selalu datang ke rumah membeli jagung sehingga kita tidak repot lagi menyewa mobil untuk menjual hasil panen ke kota. Selain itu, pedagang menyediakan mesin pemipil jagung yang memudahkan kami karena hanya membutuhkan waktu beberapa jam jagung sudah selesai dipipil dan uangnya langsung kami terima” (Petani, wawancara 24 oktober 2023).*

#### **2.4.2. Pengaruh dan Kepentingan Stakeholder**

Analisis stakeholder bertujuan untuk memahami aktor-aktor yang terlibat dalam penguatan kelembagaan petani jagung di Kabupaten Jeneponto, serta bagaimana tingkat pengaruh dan kepentingan masing-masing stakeholder dalam proses tersebut. Metode yang digunakan mengacu pada pendekatan Matriks Pengaruh dan Kepentingan dari (Reed et al., 2009), serta teori kelembagaan lokal (Uphoff, 1986). Menurut Reed et al. (2009), stakeholder dapat dipetakan berdasarkan dua dimensi utama, yaitu: pengaruh (*power*) yaitu kemampuan aktor untuk mempengaruhi kebijakan atau proses dan kepentingan (*interest*) yaitu tingkat keterlibatan dan kepedulian terhadap isu yang dibahas. Sementara itu, Uphoff (1986) menekankan

bahwa keberhasilan pembangunan berbasis masyarakat sangat tergantung pada kekuatan kelembagaan lokal, yang dibentuk melalui interaksi antar aktor lokal, baik formal maupun informal, serta tingkat partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi program.

Hasil analisis *stakeholder* diklasifikasikan menurut tingkat pengaruh dan kepentingan dengan menggunakan matriks menurut Reed et al. (2009) dapat dilihat pada Gambar 2.4. Matriks pengaruh dan kepentingan *stakeholder* tersebut menunjukkan bahwa masing-masing *stakeholder* memiliki klasifikasi peran dalam penguatan kelembagaan petani jagung di Kabupaten Jeneponto yang berbeda sesuai dengan tingkat pengaruh (wewenang/kemampuan/kekuatan) dan kepentingannya (minat/kepedulian) (Reed et al., 2009).



**Gambar 2.4** Pengaruh dan kepentingan *stakeholder* dalam penguatan kelembagaan petani jagung

Keterangan : 1= BPP; 2= Pemerintah Desa; 3= Dinas Pertanian; 4= Dinas Ketahanan Pangan; 5= Bappeda; 6= Dinas PUPR; 7= DPRD; 8= BBPP Batangkaluku; 9= BRMP; 10= Perbankan; 11= LSM; 12= BUMDes; 13= Perguruan Tiggi; 14= KTNA; 15= P4S; 16= PT. Jiva Agriculture Indonesia; 17= PT. BISI; 18= Distributor Pupuk; 19= Toko Tani; 20= Pedagang Pengumpul.

Matriks pengaruh dan kepentingan *stakeholder* menunjukkan bahwa masing-masing *stakeholder* memiliki klasifikasi yang berbeda sesuai dengan tingkat pengaruh dan kepentingannya dalam penguatan kelembagaan petani jagung di Kabupaten Jeneponto. Penjelasan secara rinci dari matriks pengaruh dan kepentingan *stakeholders* adalah sebagai berikut:

### 1. **Crowd**

Dalam kerangka analisis *stakeholder* berdasarkan matriks pengaruh dan kepentingan (Reed et al., 2009), kelompok *stakeholder* yang dikategorikan sebagai "crowd" adalah mereka yang memiliki tingkat pengaruh dan kepentingan yang

rendah terhadap isu tertentu. Dalam konteks penguatan kelembagaan petani jagung di Kabupaten Jeneponto, *stakeholder* yang tergolong dalam kelompok *crowd* memiliki peran yang cenderung pasif, meskipun kehadiran mereka tetap memberikan kontribusi, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap sistem kelembagaan petani. *Stakeholder* dalam kategori *crowd* yang diidentifikasi dalam penelitian ini mencakup: lembaga perbankan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), distributor pupuk, toko tani, dan pedagang pengumpul. Kelompok ini, meskipun kontribusinya tidak dominan dalam aspek kebijakan dan pengambilan keputusan, tetap perlu dilibatkan secara strategis untuk membangun sistem kelembagaan petani yang lebih komprehensif dan inklusif.

Lembaga keuangan seperti bank memainkan peran dalam menyediakan akses permodalan bagi petani melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan sistem Kartu Tani. Namun, meskipun berperan dalam penyediaan sumber daya finansial, lembaga perbankan tidak secara aktif terlibat dalam pembinaan kelembagaan petani. Menurut Addai et al. (2021), akses terhadap permodalan menjadi faktor penting dalam memperkuat kapasitas kelembagaan petani, tetapi efektivitasnya tergantung pada sejauh mana kelompok tani mampu memenuhi persyaratan administratif dan memiliki rekam jejak kelembagaan yang terpercaya. Di Jeneponto, banyak petani mengaku masih mengalami kesulitan dalam mengakses KUR karena proses pengajuan yang rumit, minimnya literasi keuangan, dan belum adanya pendampingan dari lembaga keuangan. Oleh karena itu, lembaga perbankan perlu dilibatkan lebih aktif dalam pelatihan manajemen keuangan kelompok tani, serta menyusun skema pembiayaan mikro yang lebih ramah terhadap kondisi sosial-ekonomi petani kecil.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sering kali menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, termasuk petani, dalam menjembatani kepentingan serta menyuarakan aspirasi masyarakat akar rumput. Di Jeneponto, LSM diketahui aktif membantu petani dalam advokasi bantuan, sosialisasi program, dan pemantauan pelaksanaan distribusi sarana produksi. Namun, kontribusi LSM dalam penguatan kelembagaan seringkali tidak konsisten dan tergantung pada proyek pendanaan tertentu. Hayes et al. (2021) menyoroti bahwa keberadaan LSM dapat menjadi katalisator perubahan jika dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis komunitas. Dalam praktiknya, sebagian LSM di Jeneponto hanya muncul menjelang momen politik atau proyek, dan tidak memiliki program jangka panjang untuk pembinaan kelembagaan petani. Agar lebih efektif, LSM perlu didorong untuk berperan dalam fasilitasi penguatan kelembagaan berbasis nilai-nilai partisipatif, bukan hanya advokasi bantuan temporer.

BUMDes berfungsi sebagai lembaga ekonomi desa yang dapat menjadi penyedia jasa dan produk bagi petani. Beberapa BUMDes di Jeneponto diketahui telah menyediakan sarana produksi seperti pupuk dan benih, bahkan berperan sebagai distributor pupuk bersubsidi. Meskipun BUMDes memiliki potensi besar dalam mendukung kelembagaan petani, hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar BUMDes belum terintegrasi dengan kelompok tani secara kelembagaan. Tuna et al. (2019) menyebutkan bahwa kolaborasi antara lembaga

desa dan kelembagaan petani mampu mendorong tumbuhnya model bisnis desa berbasis pertanian yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas manajerial BUMDes serta sinergi program dengan kelompok tani agar keberadaan BUMDes tidak hanya sebagai unit ekonomi, tetapi juga sebagai mitra kelembagaan petani.

Distributor pupuk bertanggung jawab menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani melalui mekanisme Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Keterlibatan distributor dalam penguatan kelembagaan petani terjadi secara tidak langsung, karena mereka mensyaratkan legalitas dan administrasi kelompok untuk memperoleh pupuk. Namun, karena orientasi distributor lebih bersifat komersial, mereka cenderung tidak terlibat dalam proses pembinaan kelompok tani. Berdasarkan studi oleh Bizikova (2020), distribusi input pertanian dapat menjadi sarana pembinaan kelembagaan jika diintegrasikan dengan pelatihan, monitoring, dan penguatan kapasitas organisasi petani. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengarahkan distributor bekerja sama dengan penyuluh dan Dinas Pertanian dalam melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada kelompok tani mengenai mekanisme pengadaan input secara kelembagaan.

Toko tani, khususnya yang dikelola oleh BUMDes atau kelompok masyarakat, merupakan outlet penting dalam menyediakan sarana produksi pertanian secara terjangkau dan mudah diakses. Keberadaan toko tani di beberapa desa di Jeneponto terbukti mampu membantu petani dalam memperoleh benih unggul, pestisida, dan pupuk dengan harga yang kompetitif. Namun, toko tani masih beroperasi dalam skala kecil dan belum terintegrasi dalam sistem kelembagaan petani yang kuat. Studi Ochieng et al. (2018) menunjukkan bahwa keberadaan toko tani menjadi efektif jika dikelola oleh kelompok tani secara kolektif, sehingga dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dan memperkuat struktur organisasi petani. Oleh karena itu, toko tani perlu diarahkan untuk menjadi bagian dari model usaha kelompok tani atau koperasi petani yang berbasis kelembagaan.

Pedagang pengumpul memiliki peran penting dalam rantai pasok jagung karena mereka menjadi pembeli utama hasil panen petani. Di Jeneponto, sebagian besar petani masih menjual hasil panennya kepada pedagang pengumpul karena keterbatasan akses pasar. Meskipun dianggap sebagai solusi cepat dalam pemasaran hasil panen, hubungan petani dengan pedagang seringkali bersifat subordinatif, dengan harga yang ditentukan secara sepihak dan praktik pembiayaan yang bersifat eksploitatif. Seperti disampaikan oleh Eastwood et al. (2019), struktur pasar yang tidak adil dapat menghambat penguatan kelembagaan karena petani kehilangan posisi tawar. Dalam hal ini, perlu intervensi kebijakan dari pemerintah daerah untuk menata sistem tata niaga jagung agar lebih menguntungkan bagi petani dan mendorong terbentuknya koperasi tani sebagai alternatif pemasaran kolektif.

## 2. *Context Setter*

Merupakan *stakeholder* yang memiliki pengaruh yang tinggi tetapi kepentingan rendah terhadap suatu isu, dalam hal ini penguatan kelembagaan petani jagung. Dalam kerangka analisis *stakeholder* menggunakan matriks pengaruh dan kepentingan (Reed et al., 2009), kelompok ini memiliki kapasitas untuk memengaruhi kebijakan dan proses kelembagaan namun belum menunjukkan keterlibatan aktif dalam pengembangan kelembagaan petani. Keberadaan mereka penting untuk diperhatikan karena keputusan atau kebijakan yang diambil oleh kelompok *context setter* dapat memberikan dampak signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap keberhasilan program penguatan kelembagaan petani.

Berdasarkan hasil pemetaan *stakeholder* dalam penelitian ini, terdapat lima institusi yang dikategorikan sebagai *context setter* dalam penguatan kelembagaan petani jagung di Kabupaten Jeneponto, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP). Kelima institusi ini memiliki kewenangan struktural dan sumber daya yang besar namun menunjukkan tingkat kepentingan yang belum optimal terhadap isu kelembagaan petani.

Pemerintah Desa sebagai lembaga pemerintahan terdekat dengan petani, pemerintah desa memiliki otoritas dalam menetapkan prioritas pembangunan desa, mengalokasikan anggaran dana desa, serta mengesahkan pembentukan dan legalitas kelompok tani melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Desa. Meski demikian, fokus program pemerintah desa sering kali lebih terarah pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan pelayanan sosial dibandingkan penguatan kelembagaan petani secara sistematis. Menurut Suradisastra (2016), keberhasilan kelembagaan petani sangat ditentukan oleh dukungan regulatif dan administratif dari pemerintah desa. Pemerintah desa berpotensi menjadi fasilitator utama dalam membangun sinergi antar kelompok tani dan mendukung keberlanjutan program pertanian jika diarahkan dengan tepat. Namun, lemahnya kapasitas perencanaan dan minimnya partisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) untuk isu pertanian menyebabkan sektor kelembagaan petani kurang terakomodasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa dan penyusunan prioritas pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan petani.

Bappeda memiliki fungsi strategis dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), menyelaraskan program lintas sektor, serta mengalokasikan sumber daya anggaran daerah untuk mendukung program prioritas. Kewenangan Bappeda dalam mengintegrasikan isu kelembagaan petani ke dalam dokumen perencanaan pembangunan sangat menentukan arah kebijakan sektoral di daerah. Namun, dalam praktiknya, isu penguatan kelembagaan petani sering kali dipandang sebagai sub-tema dari pembangunan pertanian secara umum. Hal ini sejalan dengan temuan Di Iacovo et al. (2017) yang menyebutkan bahwa

institusi perencanaan cenderung mengutamakan program makro berbasis indikator ekonomi, sementara aspek sosial kelembagaan petani dipandang sebagai urusan teknis OPD sektor pertanian. Tanpa adanya tekanan dari aktor utama atau bukti dampak langsung terhadap indikator makro, maka kepentingan Bappeda terhadap penguatan kelembagaan cenderung rendah. Oleh karena itu, penting untuk mendorong advokasi berbasis data dan pelibatan kelompok tani dalam forum konsultasi publik perencanaan pembangunan agar isu kelembagaan mendapatkan porsi yang layak dalam perencanaan daerah.

Dinas PUPR bertanggung jawab dalam penyediaan infrastruktur dasar, termasuk irigasi dan jalan usaha tani yang menjadi elemen penting dalam mendukung produktivitas pertanian. Meskipun dinas ini tidak secara langsung terlibat dalam pembinaan kelompok tani, keberadaan dan kualitas infrastruktur yang mereka bangun berpengaruh langsung terhadap efektivitas kerja kelembagaan petani. Dalam konteks program *Water Resources and Irrigation Sector Management Program* (WISMP) yang dijalankan di Kabupaten Jeneponto, Dinas PUPR turut melibatkan kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) untuk mendukung pengelolaan irigasi secara partisipatif. Hal ini menunjukkan bahwa dinas ini memiliki peran strategis yang belum sepenuhnya dimaksimalkan dalam pemberdayaan kelembagaan petani. Phiri et al. (2024) menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor, terutama antara sektor infrastruktur dan pertanian, sangat penting dalam mewujudkan pertanian yang berdaya saing dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu ada kerangka kerja lintas sektor yang menjamin sinergi perencanaan dan pelaksanaan program antara Dinas PUPR dan Dinas Pertanian.

Sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki tiga fungsi utama: legislasi, penganggaran, dan pengawasan. DPRD berperan dalam menetapkan peraturan daerah, menyetujui anggaran program, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Pokok-pokok pikiran DPRD (Pokir) yang dihasilkan melalui reses merupakan salah satu instrumen untuk menyalurkan aspirasi petani, termasuk dalam penguatan kelembagaan. Namun, penelitian menunjukkan bahwa Pokir DPRD kerap dimanfaatkan untuk tujuan politik jangka pendek dan belum sepenuhnya diarahkan pada pengembangan kelembagaan yang berkelanjutan (Pedersen et al., 2022). Selain itu, meskipun anggota DPRD melakukan kunjungan lapangan dan mendengar aspirasi petani, tidak semua aspirasi tersebut diterjemahkan ke dalam kebijakan atau program yang konkret. Untuk meningkatkan kepentingan DPRD terhadap kelembagaan petani, diperlukan mekanisme pengawasan dan pelaporan dampak program yang lebih transparan dan berbasis indikator kelembagaan. Interaksi yang lebih intensif antara DPRD dan kelompok tani juga dapat memperkuat fungsi representasi mereka sebagai penyambung aspirasi masyarakat pertanian.

BRMP memiliki peran penting dalam standardisasi dan penyediaan sarana produksi pertanian, khususnya benih dan alat mesin pertanian. Dalam penelitian ini, BRMP disebut sebagai *context setter* karena memiliki pengaruh tinggi dalam menjamin ketersediaan input pertanian berkualitas, namun belum menunjukkan

keterlibatan sistematis dalam penguatan kelembagaan petani. BRMP melalui instalasi IP2SIP di Jeneponto memfasilitasi pengadaan dan distribusi benih jagung unggul. Akan tetapi, pola hubungan antara BRMP dan kelompok tani bersifat transaksional dan tidak menyangkut aspek penguatan institusi petani secara kelembagaan. Johnson et al. (2015) menyebutkan bahwa pendekatan teknologi harus diiringi oleh penguatan kapasitas organisasi petani agar inovasi dapat diadopsi secara luas dan berkelanjutan. Oleh karena itu, BRMP perlu memperluas mandatnya dengan membangun sistem pelatihan, pendampingan, dan integrasi distribusi benih yang melibatkan kelembagaan petani secara aktif.

Dengan mendorong keterlibatan yang lebih besar dari context setter, penguatan kelembagaan petani jagung di Kabupaten Jeneponto dapat lebih sistematis, inklusif, dan berkelanjutan. Kunci keberhasilannya terletak pada pengakuan bahwa institusi-institusi ini, meskipun tidak secara langsung bergerak di bidang pertanian, tetap memiliki pengaruh besar dalam menentukan efektivitas sistem kelembagaan petani di tingkat lokal.

### **3. Subject**

Dalam upaya memperkuat kelembagaan petani jagung di Kabupaten Jeneponto, keterlibatan para pemangku kepentingan dalam kelompok *subject* adalah sangat penting meskipun pengaruh mereka dalam proses pengambilan keputusan rendah dan kepentingan tinggi terhadap keberhasilan kelembagaan petani. Mereka berperan dalam mendorong inovasi, pendampingan teknis, penguatan kapasitas kelembagaan, dan dukungan terhadap keberlanjutan usaha tani, namun seringkali tidak dilibatkan secara struktural dalam forum pengambilan kebijakan. *Stakeholder* yang termasuk dalam kelompok *subject* adalah Dinas Ketahanan Pangan, Perguruan Tinggi, Kontak Tani Nelayan Andalan, PT. Jiva Agriculture Indonesia, PT. Bisi International. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Kumar et al. (2021) bahwa pemetaan stakeholder berdasarkan kepentingan dan pengaruh sangat penting untuk menentukan strategi kolaborasi yang tepat dalam pembangunan pedesaan. Stakeholder dalam kelompok *subject* dapat menjadi penggerak perubahan apabila diberikan ruang partisipasi dalam pengambilan keputusan, difasilitasi oleh pemerintah daerah, dan didukung oleh mekanisme kolaboratif.

Secara keseluruhan, kelompok *subject* menyimpan potensi strategis dalam penguatan kelembagaan petani jagung melalui kapasitas teknis, transfer pengetahuan, jejaring sosial dan ekonomi, serta dukungan terhadap pemberdayaan petani. Diperlukan pendekatan kebijakan yang tidak hanya mengakui keberadaan mereka, tetapi juga menginstitusionalisasi kontribusi mereka melalui pembentukan forum lintas kelembagaan, pendanaan kolaboratif, dan peningkatan kapasitas partisipatif. Dengan demikian, kolaborasi antara *stakeholder subject* dengan aktor utama dalam kelembagaan akan memperkuat kemandirian kelembagaan petani dan mendorong ketahanan pangan yang berkelanjutan di Kabupaten Jeneponto. Kelompok ini terdiri atas *stakeholder* yang memiliki kepentingan tinggi terhadap

keberhasilan kelembagaan petani, namun belum memiliki pengaruh signifikan dalam memengaruhi kebijakan atau pengambilan keputusan kelembagaan.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto menempati posisi penting dalam kelompok ini, khususnya karena perannya dalam menjaga stabilitas dan ketahanan pangan lokal. Program-program dinas ini meliputi koordinasi dengan kelompok tani, gapoktan, dan instansi terkait program penguatan cadangan pangan, distribusi pangan, hingga pelatihan teknologi pertanian. Meskipun demikian, keterbatasan kewenangan dalam merancang kebijakan strategis menyebabkan pengaruhnya terbatas. Hasil penelitian Romadi et al. (2023) menunjukkan bahwa lembaga teknis seperti ini dapat lebih berperan bila dilibatkan secara aktif dalam perencanaan lintas sektor.

Perguruan tinggi memiliki potensi besar dalam mendukung penguatan kelembagaan petani melalui hasil penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat, namun pengaruhnya terhadap kebijakan kelembagaan masih rendah. Hambatan ini berkaitan dengan keterbatasan pendanaan dan tidak adanya mekanisme formal untuk integrasi hasil riset ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Studi Budi et al. (2023) mengungkapkan bahwa potensi akademisi dalam pembangunan pertanian akan lebih optimal jika dibangun kanal komunikasi reguler dengan pemangku kepentingan daerah.

Berbagai program penelitian dan pengabdian masyarakat menunjukkan kepentingan perguruan tinggi yang relevan dengan kebutuhan petani, terutama dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui transfer pengetahuan dan inovasi. Pengaruh perguruan tinggi terhadap kelembagaan petani masih rendah karena perguruan tinggi tidak dapat melaksanakan program yang dilaksanakan lembaga pemerintah, kegiatan perguruan tinggi tergantung pada pendanaan riset dan pengabdian yang terbatas serta tidak ada forum komunikasi formal antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah, sehingga rekomendasi atau hasil penelitian akademik tidak selalu dimasukkan ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Perguruan tinggi tetap menjadi *stakeholder* penting dalam pemberdayaan petani, meskipun tidak memiliki pengaruh langsung secara birokrasi. Apabila pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto menggunakan temuan penelitian dalam menyusun strategi pembangunan pertanian di daerah, penguatan kelembagaan petani akan lebih efektif.

KTNA sangat mendukung pemberdayaan petani, tetapi belum terlibat dalam proses pengambilan keputusan strategis. Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) adalah organisasi petani yang memiliki peran kuat dalam pemberdayaan melalui pelatihan dan advokasi, namun masih bergantung pada dukungan pemerintah karena tidak memiliki otoritas kebijakan. Penelitian Humaidi dan Soedarto (2022) menegaskan bahwa organisasi petani memiliki pengaruh signifikan dalam penyebaran informasi teknologi dan penguatan kelembagaan jika dilibatkan dalam proses kebijakan secara struktural.

KTNA bertujuan untuk meningkatkan kapasitas petani secara keseluruhan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, teknis budidaya, dan advokasi kebijakan. KTNA memiliki pemahaman yang kuat tentang kondisi nyata di lapangan sehingga berusaha meningkatkan solidaritas petani, menyebarkan informasi teknologi, dan menumbuhkan semangat kerja sama dalam pengelolaan usaha tani jagung melalui pertemuan rutin, forum musyawarah, dan kegiatan pelatihan. Akan tetapi, KTNA masih memiliki pengaruh yang lemah dalam menentukan kebijakan kelembagaan, meskipun memiliki akses langsung ke petani dan menjadi sumber aspirasi. Hal ini disebabkan karena KTNA tidak memiliki kewenangan untuk mengatur anggaran atau melakukan intervensi teknis sehingga mereka sangat bergantung pada dukungan dari pemerintah.

PT.Jiva membantu petani jagung melalui penyediaan sarana produksi, pelatihan budidaya, dan akses pemasaran. Sebagai pihak swasta, PT. Jiva memiliki kekuatan teknis dan ekonomi yang lebih besar dibandingkan penguatan lembaga yang seringkali melibatkan masalah sosial dan kebijakan yang berada di luar cakupan langsung perusahaan. Namun, karena tingkat kepentingan yang tinggi, PT. Jiva memiliki potensi besar untuk menjadi mitra strategis dalam memperkuat kelembagaan petani. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan komunikasi dan kerja sama PT.Jiva dengan *stakeholder* yang memiliki pengaruh yang lebih besar, seperti Dinas Pertanian, Penyuluh Pertanian. PT. Jiva dapat mendukung penguatan kelembagaan petani jagung secara berkelanjutan yang diperoleh dari informasi terbaru tentang perkembangan kelembagaan dan terlibat dalam proses koordinasi, meskipun mereka belum memiliki peran dominan dalam pengambilan keputusan.

PT. Bisi International adalah stakeholder yang memiliki kepentingan tinggi namun pengaruh yang rendah dalam penguatan kelembagaan petani jagung. Ini terlihat dari komitmen perusahaan dalam menyediakan benih unggul, pendampingan teknis, dan dukungan dalam meningkatkan produktivitas petani. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis, PT. Bisi memiliki kepentingan langsung terhadap keberhasilan petani jagung sebagai konsumen produk mereka. PT. Bisi masih memiliki sedikit dampak pada struktur kelembagaan petani, meskipun memiliki peran dalam bidang teknologi budidaya. Dalam konteks bisnis, perusahaan ini biasanya berinteraksi secara langsung dengan petani. Namun, mereka tidak secara langsung terlibat dalam keputusan strategis kelembagaan seperti membuat kebijakan kolektif, perencanaan program, atau aturan kelompok tani. Selain itu, perusahaan tidak dapat mendorong perubahan kelembagaan secara struktural karena memiliki hubungan yang bersifat kontraktual atau informal dengan petani. Perlu ada upaya dari pihak-pihak yang berpengaruh lebih besar, seperti dinas pertanian atau kelembagaan petani itu sendiri, untuk membuka ruang kolaborasi yang lebih formal. PT. Bisi dapat menjadi mitra potensial dalam memperkuat kelembagaan petani, khususnya dalam hal transfer teknologi, pelatihan, dan akses ke sarana produksi. Pelibatan aktif perusahaan ini akan meningkatkan kerja sama antar stakeholder dan memperkuat keberlanjutan institusi petani jagung lokal.

Sektor swasta melalui PT. Jiva Agriculture Indonesia dan PT. Bisi International memiliki peran penting dalam membantu petani melalui penyediaan sarana produksi dalam melaksanakan usahatani, karena pihak perusahaan memberikan pinjaman sarana produksi kepada petani yang pembayarannya dilakukan setelah panen. Selain itu, perusahaan juga memberikan kemudahan kepada petani dalam memasarkan hasil panen dan harga beli jagung yang ditetapkan oleh perusahaan sesuai harga yang berlaku di pasaran sehingga akan memberikan keuntungan bagi petani. Dukungan berupa pembiayaan input pertanian serta jaminan pembelian hasil panen memudahkan petani dalam perencanaan usaha tani. Meskipun demikian, relasi kemitraan yang bersifat transaksional dan belum terlembaga secara formal membatasi kemampuan mereka untuk berperan dalam pembentukan kebijakan kelembagaan. Studi Wibowo et al. (2022) menyarankan transformasi kemitraan agribisnis menjadi kolaborasi jangka panjang yang inklusif dan berbasis pemberdayaan kelembagaan petani. Secara keseluruhan, kelompok subject menyimpan potensi strategis dalam penguatan kelembagaan petani jagung melalui kapasitas teknis, transfer pengetahuan, dan jaringan ekonomi. Maka, kebijakan pembangunan kelembagaan perlu diarahkan untuk mendorong peran aktif mereka melalui integrasi dalam forum komunikasi lintas lembaga, pengakuan peran non-pemerintah, dan fasilitasi kolaborasi jangka panjang yang setara dan inklusif.

#### **4. Key player**

Merupakan *stakeholder* yang menempati posisi strategis karena memiliki pengaruh dan kepentingan yang tinggi dalam keberhasilan penguatan kelembagaan petani jagung. Berdasarkan hasil pemetaan yang menggunakan pendekatan matriks pengaruh dan kepentingan (Reed et al., 2009), empat institusi utama dikategorikan sebagai *key players* dalam konteks penguatan kelembagaan petani jagung di Kabupaten Jeneponto: Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku, dan Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S). Peran dan intervensi dari keempat institusi ini sangat dominan baik dalam aspek kebijakan, implementasi program, hingga peningkatan kapasitas kelembagaan petani.

BPP berperan sebagai ujung tombak dalam pemberdayaan kelembagaan petani di tingkat kecamatan. Sebagai lembaga yang menaungi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), BPP menjalankan fungsi penting dalam diseminasi inovasi teknologi, peningkatan kapasitas petani melalui pendekatan sekolah lapang, serta mendorong partisipasi petani dalam perencanaan dan pelaksanaan program kelembagaan. Kegiatan rutin seperti pertemuan kelompok tani, anjungsana lapangan, dan pelatihan manajemen kelompok memperlihatkan keterlibatan aktif BPP dalam mendampingi petani secara langsung. Studi oleh Eastwood et al. (2019) dan Ochieng et al. (2018) juga menegaskan bahwa peran penyuluh sangat menentukan dalam mempercepat adopsi teknologi dan keberlanjutan kelompok tani. Keberadaan BPP turut mewujudkan peran kelembagaan petani sebagai entitas pembelajar dan produktif (Mucoki et al., 2022).

Sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, Dinas Pertanian memiliki kewenangan untuk menyusun, mengelola, dan mengimplementasikan kebijakan strategis yang menysasar kelompok tani. Dalam kerangka teori kelembagaan (Uphoff, 1986), Dinas Pertanian merupakan institusi pengambil keputusan (*decision-making institution*) yang memiliki kekuatan pengaruh tinggi karena mengatur pembinaan, fasilitasi bantuan, serta pelibatan petani dalam berbagai skema kemitraan dan akses pasar. Dinas ini mengembangkan model intervensi berbasis kebutuhan lokal melalui kegiatan Sekolah Lapang, Bimbingan Teknis (Bimtek), serta penguatan organisasi kelompok tani menjadi badan usaha yang lebih profesional. Penelitian oleh Banda (2022) dan Sariati et al. (2023) menunjukkan bahwa kehadiran dinas pertanian daerah yang adaptif sangat mendukung ketahanan kelembagaan petani melalui kebijakan inklusif dan kolaboratif.

Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku merupakan unit pelaksana teknis pusat dari Kementerian Pertanian yang memiliki mandat dalam pengembangan sumber daya manusia pertanian berdasarkan Permentan Nomor: 37/PERMENTAN/SM.120/8/2018, yaitu, pelatihan kepada petani meliputi pelatihan kepemimpinan dan manajemen, serta pelatihan teknis komoditas pertanian. Salah satu cara dalam meningkatkan kapasitas SDM pertanian (non aparatur) adalah dengan menumbuhkembangkan Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S). Di Kabupaten Jeneponto, BBPP Batangkaluku menjadi aktor penting dalam memperkuat kapasitas petani melalui pelatihan berbasis kompetensi, termasuk pelatihan kewirausahaan agribisnis komoditas jagung. Tujuannya adalah membekali petani dengan keterampilan manajerial, kemampuan pemasaran, dan inovasi pascapanen yang mendorong nilai tambah. Hasil penelitian oleh Bertolozzi-Caredio et al. (2021) dan Rajala et al. (2021) mendukung bahwa pelatihan berbasis agribisnis sangat efektif dalam mengubah kelembagaan petani menjadi lembaga usaha yang mandiri dan tangguh secara ekonomi

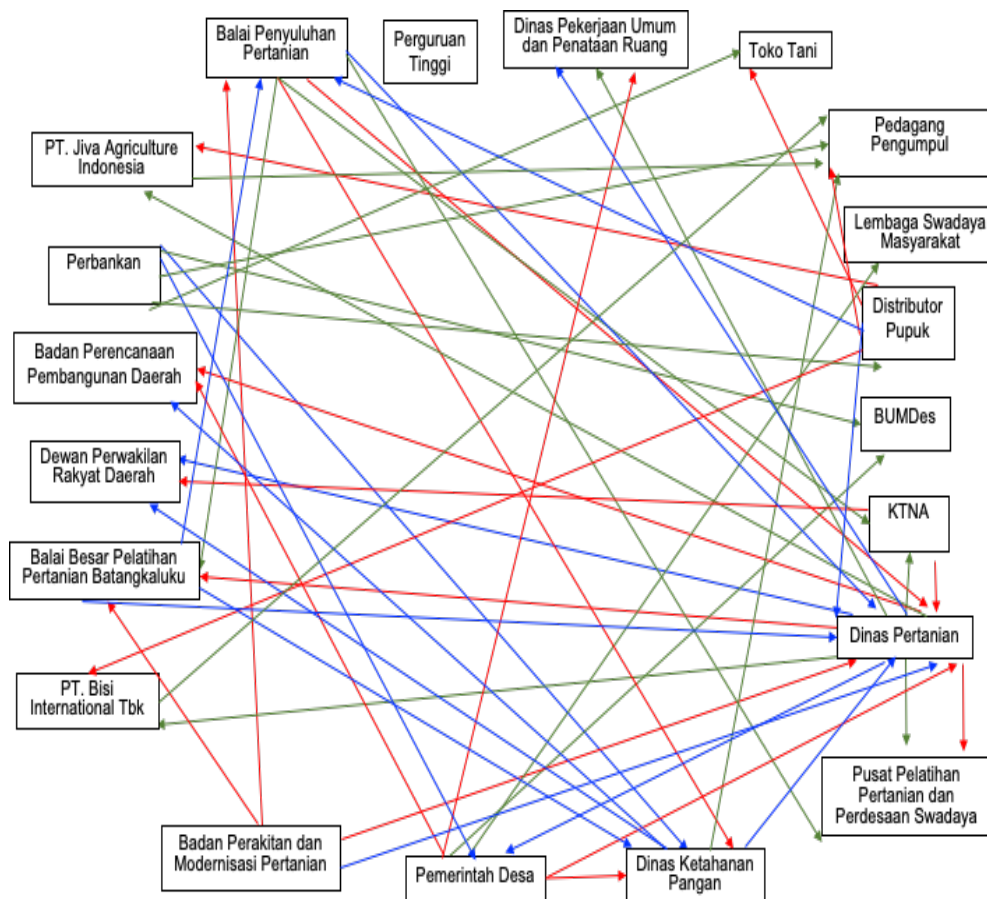
Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) adalah lembaga pelatihan berbasis masyarakat yang dikembangkan secara partisipatif oleh petani, untuk petani. Dengan pendekatan keswadayaan dan prinsip pembelajaran kontekstual, P4S memberikan pelatihan teknis budidaya, manajemen kelompok, hingga kepemimpinan organisasi. Di Kabupaten Jeneponto terdapat P4S Merapi yang berlokasi di Kecamatan Rumbia. P4S adalah para petani maju dan berhasil yang diharapkan dapat mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki kepada petani sekitarnya, sehingga keberadaannya benar-benar dapat mendorong percepatan kebutuhan tuntutan peningkatan kapasitas SDM petani. Menurut Hayes et al. (2021), P4S berperan dalam menjembatani kebutuhan petani dan kebijakan publik dengan menyampaikan inovasi teknologi secara praktis dan lokal. Di Kabupaten Jeneponto, P4S menjadi aktor pelengkap penting dari struktur kelembagaan pertanian karena menjangkau petani yang berada di luar jangkauan institusi formal. Keberadaan P4S juga memperkuat jaringan komunikasi horizontal antar kelompok tani (Reed et al., 2009).

Keempat institusi ini menunjukkan peran aktif dan berkelanjutan dalam meningkatkan fungsi kelembagaan petani. Melalui sinergi antara aktor teknis (BPP

dan Dinas Pertanian), pelatihan nasional (BBPP), dan penguatan berbasis komunitas (P4S), kelembagaan petani jagung di Kabupaten Jeneponto memiliki fondasi yang kokoh untuk berkembang menjadi sistem yang mandiri, tangguh, dan responsif terhadap dinamika pertanian modern. Keterlibatan mereka sebagai *key players* telah dibuktikan secara empiris dalam mendukung produktivitas, adaptasi teknologi, dan daya saing kelembagaan petani (Addai et al., 2021; Aminah et al., 2024; Phiri et al., 2024).

### 2.4.3. Hubungan Stakeholder

Dalam penelitian ini menyajikan peta visual interaksi *stakeholder* dalam kelembagaan petani jagung di Kabupaten Jeneponto. Tiga dimensi hubungan utama yang dianalisis adalah komunikasi, koordinasi, dan kerja sama, yang merepresentasikan intensitas dan arah relasi antar aktor berdasarkan kepentingan dan pengaruh mereka.



Keterangan : merah :komunikasi, biru: koordinasi, hijau : kerjasama

**Gambar 2.5** Peta hubungan antar *stakeholder* dalam kelembagaan petani

## 1. Komunikasi

Komunikasi merupakan landasan dari hubungan kelembagaan antar *stakeholder* dalam pembangunan pertanian, khususnya dalam penguatan kelembagaan petani jagung. Relasi komunikasi antar berbagai aktor yang saling terhubung dalam sistem kelembagaan di Kabupaten Jeneponto. Relasi ini terbentuk karena adanya kebutuhan untuk menyamakan persepsi, mengintegrasikan peran, serta menyusun strategi bersama dalam mendukung kapasitas kelembagaan petani. Sebagaimana diuraikan oleh Leeuwis and Van den Ban (2004), komunikasi dalam sistem pertanian tidak bersifat linier, tetapi interaktif, partisipatif, dan dipengaruhi oleh konteks sosial-politik. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana komunikasi berjalan di antara para aktor berikut.

### 1) BPP ↔ Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) menjadi simpul komunikasi yang penting antara lapangan dan instansi teknis pemerintah. Penyuluh menyampaikan laporan penyuluhan dan kendala petani kepada Dinas Pertanian, sekaligus memberikan data mengenai cadangan pangan serta harga jagung kepada Dinas Ketahanan Pangan. Komunikasi ini penting untuk menjaga sinkronisasi antara kondisi lapangan dan intervensi kebijakan. Menurut Eastwood et al. (2019), komunikasi berbasis data lapangan dari penyuluh meningkatkan efisiensi alokasi program dan responsivitas kebijakan pertanian. Perlu diperkuat sistem informasi terintegrasi agar komunikasi tidak hanya bersifat laporan periodik, tetapi dapat dipantau secara *real-time*.

### 2) Pemerintah Desa ↔ Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Bappeda, Dinas PUPR

Komunikasi antara Pemerintah Desa dan OPD menjadi penting dalam menyinergikan program pembangunan desa dan kabupaten. Pemerintah Desa aktif mengusulkan pembangunan infrastruktur pendukung kelembagaan tani, seperti jalan usaha tani, melalui mekanisme perencanaan partisipatif dan forum Musrenbang. Komunikasi ini bersifat vertikal dan horizontal sekaligus, mencerminkan model kolaboratif antara level desa dan kabupaten. Menurut Reed et al. (2009), komunikasi lintas level yang efektif meningkatkan legitimasi program dan memperluas basis dukungan masyarakat. Namun, masih diperlukan peningkatan kapasitas komunikasi Pemerintah Desa agar dapat menyuarkan kebutuhan petani secara lebih sistematis.

### 3) Dinas Pertanian ↔ BBPP Batangkaluku dan P4S Merapi

Komunikasi ini difokuskan pada identifikasi kebutuhan pelatihan, penyusunan materi, dan penguatan struktur organisasi kelompok tani. Prosesnya mencakup pertukaran data kelompok tani, penyusunan kurikulum pelatihan, hingga diskusi informal mengenai kelemahan kelembagaan. Hal ini sejalan dengan konsep "*participatory curriculum development*" (Hayes et al., 2021), yang mendorong materi pelatihan dirancang berdasarkan konteks lokal. Komunikasi teknis ini perlu diformalisasi dalam forum rutin, agar pembaruan pelatihan lebih adaptif terhadap dinamika pertanian jagung di Jeneponto.

- 4) BBPP ↔ Perguruan Tinggi ↔ BRMP ↔ Dinas Pertanian ↔ BPP  
 Komunikasi pada BBPP Batangkaluku bertujuan membangun jaringan pengetahuan yang mengalir dari lembaga riset ke pelatihan, hingga ke petani. Sinergi ini memperkuat adopsi inovasi melalui pengintegrasian hasil riset ke dalam kurikulum pelatihan dan penyuluhan. Forum ilmiah, pelatihan lanjutan, dan kunjungan lapang menjadi media komunikasi utama. Bertolozzi-Caredio et al. (2021) menunjukkan bahwa integrasi riset dengan pelatihan pertanian meningkatkan efisiensi adopsi inovasi di tingkat petani. Komunikasi multiarah ini perlu terus diperkuat melalui platform kolaboratif antara aktor riset, pelatihan, dan penyuluhan.
- 5) KTNA ↔ Dinas Pertanian, Bappeda, DPRD  
 Komunikasi antara KTNA dan pemerintah daerah bersifat advokatif, menyalurkan aspirasi petani melalui forum resmi seperti Musrenbang dan audiensi dengan legislatif. KTNA memainkan peran sebagai penyambung suara petani, terutama dalam isu regulasi dan program pembangunan pertanian. Peran ini mendukung temuan Phiri et al. (2024) yang menyebutkan pentingnya organisasi petani dalam mengawal kebijakan agar berpihak kepada petani. Komunikasi advokatif perlu dilengkapi dengan data dan bukti dampak agar memiliki kekuatan pengaruh dalam forum kebijakan.
- 6) Distributor pupuk ↔ PT. Jiva *Agriculture* Indonesia, PT. BISI *International*, pedagang pengumpul, toko tani  
 Komunikasi yang terjalin bersifat pasar, menyangkut informasi produk, teknik budidaya, harga, dan kualitas hasil. Hubungan ini penting dalam membentuk persepsi petani terhadap input dan hasil panen, tetapi cenderung tidak simetris. Menurut Ochieng et al. (2018), hubungan pasar yang tidak diimbangi dengan komunikasi edukatif dapat memperlemah kelembagaan petani. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu difasilitasi untuk membangun komunikasi berbasis kemitraan jangka panjang, bukan sekadar relasi transaksi

## 2. Koordinasi

Koordinasi antar stakeholder merupakan dimensi penting dalam keberhasilan program penguatan kelembagaan petani jagung di Kabupaten Jeneponto. Koordinasi yang terjalin antar berbagai aktor, termasuk dinas teknis, pemerintah desa, lembaga pelatihan, lembaga keuangan, dan distributor input pertanian. Dalam konteks sistem kelembagaan pertanian, koordinasi mencakup keselarasan kebijakan, penyusunan program bersama, pengalokasian peran dan tanggung jawab, serta integrasi data dan sumber daya (Reed et al., 2009).

## 1) BPP ↔ Dinas Pertanian

Koordinasi antara Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dengan Dinas Pertanian berlangsung secara rutin dan sistematis. Fungsi utama dari hubungan ini adalah untuk menyelaraskan arah kebijakan penyuluhan dengan program pertanian kabupaten. Melalui pertemuan teknis triwulanan dan penyusunan program penyuluhan, penyuluh menerima arahan kebijakan dan merumuskan strategi penyuluhan yang kontekstual dengan kebutuhan petani. Koordinasi juga mencakup supervisi lapangan, di mana penyuluh dan pejabat Dinas bersama-sama melakukan pemantauan penerapan hasil penyuluhan. Menurut Di Iacovo et al. (2017), koordinasi lapangan seperti ini penting untuk membangun umpan balik dua arah antara petani dan pembuat kebijakan.

## 2) Dinas Pertanian ↔ Pemerintah Desa

Dinas Pertanian berkoordinasi dengan Pemerintah Desa untuk menentukan kelompok tani sasaran program. Koordinasi ini memastikan bahwa kelompok tani yang dipilih memiliki struktur organisasi yang aktif dan membutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan. Pemerintah Desa juga menyediakan fasilitas pertemuan antara kelompok tani dan OPD teknis. Koordinasi desa-kabupaten ini mencerminkan pentingnya konektivitas antar level pemerintahan, sebagaimana diungkapkan oleh Uphoff (1986), yang menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan lokal tergantung pada hubungan fungsional antara pemerintah pusat, daerah, dan desa.

## 3) Dinas Pertanian ↔ Bappeda, PUPR, DPRD

Koordinasi antar Dinas Pertanian, Bappeda, Dinas PUPR, dan DPRD bersifat strategis dan multilevel. Dinas Pertanian menyampaikan usulan program kelembagaan melalui Bappeda pada forum Musrenbang. Koordinasi dengan PUPR menyangkut infrastruktur pendukung pertanian seperti jalan usaha tani dan irigasi. Sedangkan koordinasi dengan DPRD dilakukan untuk advokasi anggaran dan dukungan kebijakan. Reed et al. (2009) menegaskan bahwa koordinasi antar institusi perencana, pelaksana, dan pengambil keputusan politik adalah faktor penentu dalam penguatan kelembagaan sektor publik.

## 4) Dinas Ketahanan Pangan ↔ Dinas Pertanian, Bappeda, DPRD

Dinas Ketahanan Pangan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk memastikan stabilitas pasokan jagung. Bersama Bappeda dan DPRD, Dinas ini merumuskan kebijakan dan mengadvokasi legislasi terkait ketahanan pangan. Fungsi pelaksana teknis, perencana, dan pengawas kebijakan terdistribusi secara jelas. Model ini selaras dengan teori governance network (Provan and Kenis, 2008) di mana efektivitas sistem koordinasi tergantung pada klarifikasi peran dan struktur komunikasi yang terbuka.

## 5) BRMP ↔ Dinas Pertanian

Balai Riset dan Modernisasi Pertanian (BRMP) berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dalam mengintegrasikan teknologi hasil riset ke kelompok tani. Dinas Pertanian memilih kelompok tani untuk uji coba dan bersama BRMP mengevaluasi efektivitas teknologi tersebut. Menurut Hayes et al. (2021),

koordinasi antara lembaga riset dan pelaksana program sangat penting dalam mendorong inovasi pertanian yang relevan secara lokal.

- 6) BBPP Batangkaluku ↔ BPP, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan  
BBPP Batangkaluku melalui program READSI bekerja sama secara intensif dengan BPP, Dinas Pertanian, dan Dinas Ketahanan Pangan. Koordinasi dilakukan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemberdayaan ekonomi petani. Studi Addai et al. (2022) menyebutkan bahwa pendekatan koordinatif dalam pelatihan, penyuluhan, dan program pemberdayaan menghasilkan dampak lebih kuat terhadap penguatan kelembagaan lokal.
- 7) Bank ↔ Pemerintah Desa, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan  
Koordinasi lembaga keuangan dengan pemerintah desa dan OPD teknis berperan dalam penyaluran KUR pertanian. Pemerintah Desa mengidentifikasi petani sasaran, Dinas Pertanian membantu penyusunan rencana usaha tani, dan Dinas Ketahanan Pangan memvalidasi kesesuaian sasaran. Model koordinasi ini memungkinkan efisiensi penyaluran KUR dan pemanfaatan kartu tani sebagai alat kendali input. Phiri et al. (2024) menyarankan bahwa sistem keuangan mikro yang terintegrasi dengan kelembagaan lokal mampu meningkatkan kemandirian petani.
- 8) Distributor Pupuk ↔ BPP dan Dinas Pertanian  
Koordinasi dalam distribusi pupuk dimulai dari penyusunan RDKK oleh kelompok tani, validasi oleh penyuluh, dan rekapitulasi kebutuhan oleh Dinas Pertanian. Hasil ini diberikan kepada distributor sebagai dasar penyaluran. Dinas dan distributor juga melakukan evaluasi bersama di tingkat pengecer. Menurut FAO (2017), transparansi dan koordinasi multi-aktor dalam sistem input pertanian merupakan faktor kunci dalam memastikan akurasi, efisiensi, dan ketepatan sasaran distribusi.

### 3. Kerjasama

Kerja sama antar *stakeholder* merupakan fondasi penting dalam membangun kelembagaan petani yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan. Dalam sistem pertanian jagung di Kabupaten Jeneponto, kerjasama lintas aktor menjadi kunci dalam menyatukan berbagai sumber daya, kepakaran, dan jaringan distribusi untuk mendukung aktivitas kelembagaan petani. Pola kerjasama yang telah terjalin di antara institusi publik, swasta, akademisi, lembaga keuangan, dan masyarakat desa tidak hanya bersifat transaksional, melainkan juga strategis dan struktural, dengan tujuan memperkuat posisi petani dalam rantai nilai pertanian.

- 1) BPP ↔ P4S  
Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) bekerjasama dengan Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) dalam memberikan pelatihan teknis kepada petani. P4S menjadi tempat belajar dan praktik lapangan bagi kelompok

tani dalam aspek manajemen usaha tani, diversifikasi produk, serta pengembangan inovasi teknologi pertanian. Kegiatan ini mencakup magang dan pelatihan keterampilan pertanian yang bersifat praktis dan kontekstual. Model ini sejalan dengan pendekatan "*learning by doing*" sebagaimana diuraikan oleh Leeuwis and Van den Ban (2004), yang menyatakan bahwa pelatihan berbasis pengalaman langsung dan kolaboratif lebih efektif dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan petani.

2) Pemerintah Desa ↔ LSM ↔ BUMDes

Kerjasama tiga pihak ini berfokus pada penguatan kelembagaan petani melalui penyediaan akses modal, pelatihan, dan pemasaran hasil panen. Pemerintah Desa berperan sebagai regulator dan fasilitator, BUMDes sebagai operator usaha tani dan distribusi, dan LSM sebagai pendamping pelatihan dan promosi hasil pertanian. Tuna et al. (2019) menekankan bahwa kemitraan yang melibatkan desa, masyarakat sipil, dan pelaku ekonomi lokal dapat menciptakan kelembagaan yang inklusif dan berakar kuat pada kebutuhan lokal.

3) Dinas Pertanian ↔ Dinas PUPR

Kerjasama ini menyoar penguatan infrastruktur fisik pendukung kelembagaan petani, seperti jalan usaha tani, saluran irigasi, dan embung. Identifikasi kebutuhan infrastruktur dilakukan bersama agar sesuai dengan distribusi kelompok tani dan kebutuhan produktivitas. Reed et al. (2009) menyatakan bahwa kerjasama lintas sektor teknis sangat penting untuk menyinergikan pembangunan pertanian dan infrastruktur secara terpadu, menghindari duplikasi, serta memaksimalkan dampak intervensi.

4) Dinas Pertanian ↔ Perguruan Tinggi

Kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat basis pengetahuan kelembagaan petani melalui pendampingan riset dan pembuatan materi penyuluhan berbasis penelitian. Kolaborasi ini meningkatkan relevansi program penyuluhan dengan kondisi lokal petani. Bertolozzi-Caredio et al. (2021) menegaskan bahwa kolaborasi antara akademisi dan pemerintah daerah menghasilkan materi pelatihan yang lebih adaptif dan berbasis bukti ilmiah.

5) Dinas Pertanian ↔ PT. Jiva dan PT. Bisi

Kemitraan yang terjalin berupa penyediaan benih dan pupuk berkualitas. Dinas Pertanian memfasilitasi penyaluran input dari perusahaan kepada kelompok tani serta mengawal kualitas dan transparansi distribusi. Hayes et al. (2021) menunjukkan bahwa kemitraan publik-swasta dalam penyediaan input pertanian dapat memperbaiki akses petani terhadap teknologi, asalkan dibangun di atas prinsip transparansi dan akuntabilitas bersama.

6) Bank ↔ BUMDes, Distributor, Toko Tani, Pedagang

Kerjasama sektor keuangan dengan pelaku usaha desa dan distributor input bertujuan meningkatkan efisiensi rantai pasok. Bank menyediakan pembiayaan melalui KUR, sedangkan BUMDes, distributor, dan toko tani menerima dukungan modal untuk menjamin ketersediaan input. Pedagang hasil pertanian memperoleh akses pembiayaan untuk membeli hasil panen petani. Phiri et al. (2024) menyatakan bahwa akses pembiayaan yang merata dan berbasis

jaringan lokal memperkuat ketahanan kelembagaan petani serta meningkatkan efisiensi pasar.

7) PT. Jiva ↔ Pedagang Hasil Pertanian

PT. Jiva mengembangkan sistem kemitraan untuk memperkuat pemasaran jagung petani. Pedagang lokal menjadi mitra dalam rantai distribusi, menjamin harga stabil, dan memperluas akses pasar. Model ini mencerminkan konsep “*inclusive agribusiness*” (Bizikova, 2020) yang menekankan pentingnya integrasi petani dalam sistem pasar formal melalui dukungan perusahaan agribisnis.

8) PT. Bisi ↔ Pedagang Hasil Pertanian

PT. Bisi menjalankan kemitraan dengan pedagang sebagai bagian dari strategi distribusi benih unggul dan pemasaran hasil panen. Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas dan kestabilan harga. Ochieng et al. (2018) menegaskan bahwa kerjasama perusahaan benih dengan jaringan distribusi lokal mendukung keberlanjutan usaha tani dan memperkuat fungsi pasar lokal.

## 2.5. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah kelembagaan petani jagung di Kabupaten Jeneponto dipengaruhi oleh keberadaan dan keterlibatan berbagai stakeholder lintas sektor, baik dari *public sector*, *voluntary*, maupun *private sector*. Setiap stakeholder memiliki peran yang berbeda-beda tergantung pada tingkat pengaruh dan kepentingannya. Sektor publik paling dominan adalah khususnya Dinas Pertanian dan Badan Penyuluhan Pertanian, karena mereka punya pengaruh tinggi (otoritas, sumber daya) dan kepentingan tinggi (keterlibatan langsung dalam penguatan kelembagaan petani). Peran moderat, terutama KTNA dan P4S yang punya pengaruh dan kepentingan cukup tinggi. Perguruan tinggi juga punya posisi strategis, meski lebih ke arah pendukung teknis (riset, pelatihan). LSM punya peran kecil dalam konteks ini. Sektor swasta terlibat, tetapi pengaruh dan kepentingannya tidak sebesar sektor publik. Mereka cenderung lebih fokus pada fungsi ekonomi dan pasar, bukan kelembagaan. Paling menonjol adalah PT. Jiva dan PT. BISI yang punya kepentingan dalam rantai pasok.

Penelitian ini telah mengidentifikasi dan memetakan 20 *stakeholder* yang terlibat dalam penguatan kelembagaan petani jagung di Kabupaten Jeneponto, diklasifikasikan berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingannya ke dalam empat kategori: (1) *key players* terdiri dari Dinas Pertanian, Badan Penyuluhan Pertanian, BBPP Batangkaluku, dan P4S memiliki pengaruh dan kepentingan tinggi dalam penguatan kelembagaan petani. Mereka merupakan aktor utama yang harus dilibatkan secara penuh dalam setiap tahap pengembangan kelembagaan; (2) *Subject*: Dinas Ketahanan Pangan, Perguruan Tinggi, Kontak Tani Nelayan Andalan, PT. Jiva, PT. Bisi International memiliki kepentingan tinggi tetapi pengaruh terbatas. Mereka berperan dalam pendukung teknis, perencanaan lintas sektor, dan regulasi; (3) *context setter*: Pemerintah Desa, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian memiliki pengaruh tinggi tetapi kepentingan rendah. Mereka dapat menciptakan konteks yang kondusif bagi kelembagaan, tetapi perlu didekati agar lebih terlibat aktif; (4) *Crowd*: Perbankan, LSM, BUMDes, distributor pupuk, toko tani, dan pedagang hasil pertanian memiliki peran terbatas dalam kelembagaan petani. Namun, tetap perlu dimonitor karena dapat mendukung secara tidak langsung atau menjadi potensi kolaborator di masa depan.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas program penguatan kelembagaan petani bergantung pada koordinasi lintas sektor, komunikasi yang berkelanjutan, serta integrasi antara kebijakan nasional dan kebutuhan lokal. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kerangka konseptual pemetaan *stakeholder* dalam konteks kelembagaan pertanian di Indonesia, dengan menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dan berbasis lokal. Temuan ini memperkaya literatur yang ada dengan memberikan bukti empiris dari studi kasus spesifik dan menyarankan pentingnya sinergi antara kebijakan, pelatihan, dan penguatan struktur kelembagaan petani.

## 2.5 Daftar Pustaka

- Abdullahi, M. and Gupta, Y., 2022. Financing agriculture in nigeria: a comparative review of roles played by private, public, and international financial institutions and agencies. *Universal Journal of Accounting and Finance*, 10(6), 925-937. <https://doi.org/10.13189/ujaf.2022.100602>.
- Addai, K., Temoso, O. and Ng'ombe, J., 2021. Participation in farmer organizations and adoption of farming technologies among rice farmers in ghana. *International Journal of Social Economics*, 49(4), 529-545. <https://doi.org/10.1108/ijse-06-2021-0337>.
- Adeyemi, O., Ajieroh, V., Umunna, L., Aminu, F. and Onabolu, A., 2022. Stakeholders, relationships, and coordination: 2015 baseline study of needed enablers for bridging agriculture-nutrition gaps in nigeria. *Food and Nutrition Bulletin*, 44(1\_suppl), S41-S51. <https://doi.org/10.1177/03795721221119249>.
- Allan, E., Ndiaye, A., Mei, S., Raber, E. and Kuo, W., 2022. Developing a culturally acceptable peanut nutrition bar with smallholder women farmers in kaffrine, senegal using response surface methodology. *Journal of Food Science*, 88(2), 608-624. <https://doi.org/10.1111/1750-3841.16412>.
- Aminah, S., Sahab, A. and Roikan, R., 2024. Political economy of farmer group empowerment policy to support the achievement of sdgs. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 19(1), 23-38. <https://doi.org/10.20473/jsd.v19i1.2024.23-38>.
- Aremu, T., Freeman, C., Laamari, A., Iddrisu, Y., Atakora, W. and Bindraban, P., 2023. Informing the design of a multistakeholder platform in ghana using stakeholder analysis and social network analysis. *Outlook on Agriculture*, 52(2), 126-139. <https://doi.org/10.1177/00307270231165323>.

- Arsyad, M., Nuddin, A., Fahmid, M., Darmawan, S., Aries, D., Pulubuhu, T. et al., 2021. Linkage of Roles Between Institutions for Agricultural Development in Indonesian Border Area. *Agroland* 28(1), 1–16.
- Banda, G., 2022. Evolution of Zimbabwe's Maize Innovation Ecosystems: Building an Institutional Innovation Infrastructure that Supported Food Security. *Africa Development* 47(3), 167–195. <https://doi.org/10.57054/ad.v47i3.2679>.
- Bertolozzi-Caredio, D., Bardaji, I., Garrido, A., Berry, R., Bijttebier, J., Gavrilescu, C. et al., 2021. Stakeholder perspectives to improve risk management in European farming systems. *Journal of Rural Studies* 84, 147–161. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.04.004>.
- Bizikova, L., Nkonya, E., Minah, M., Hanisch, M., Turaga, R. M. R., Speranza, C. I. et al., 2020. A scoping review of the contributions of farmers' organizations to smallholder agriculture. *Nature Food* 1(10), 620–630. <https://doi.org/10.1038/s43016-020-00164-x>.
- Budi, A., Amir, I. and Hendrarini, H., 2023. Development of a corporate-based corn seed area in jatirogo district, tuban regency. *Journal of Economics Finance and Management Studies*, 06(06). <https://doi.org/10.47191/jefms/v6-i6-11>.
- Creswell, John W and J. David Creswell, 2018. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Fifth Edition*. SAGE Publications, Inc.
- Curry, H., 2023. the cornbelt's last open pollinated corn: agricultural extension and the origins of the hybrid corn seed industry. *Plants People Planet*, 6(5), 1024–1037. <https://doi.org/10.1002/ppp3.10414>.
- Di Iacovo, F., Moruzzo, R. and Rossignoli, C., M., 2017. Collaboration, knowledge and innovation toward a welfare society: the case of the Board of Social Farming in Valdera (Tuscany), Italy. *Journal of Agricultural Education and Extension* 23(4), 289–311. <https://doi.org/10.1080/1389224X.2017.1302889>.
- Eastwood, C., Ayre, M., Nettle, R. and dela Rue, B., 2019. Making sense in the cloud: Farm advisory services in a smart farming future. *NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences*, 90–91. <https://doi.org/10.1016/j.njas.2019.04.004>.
- Ebrahimi, H., Schillo, R. and Bronson, K., 2021. Systematic stakeholder inclusion in digital agriculture: a framework and application to canada. *Sustainability*, 13(12), 6879. <https://doi.org/10.3390/su13126879>.
- Espig, M., Fielke, S., Finlay-Smiths, S., Jakku, E., Turner, J., Robinson. et al., 2022. Responsible digital agri-food innovation in australian and new zealand public research organisations. *Sociologia Ruralis*, 62(2), 389–409. <https://doi.org/10.1111/soru.12370>.
- FAO, 2017. *The Future of Food and Agriculture – Trends and Challenges*. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Available at: <http://www.fao.org/3/i6583e/i6583e.pdf>.
- Getson, J., Church, S., Radulski, B., Sjöstrand, A., Lu, J. and Prokopy, L., 2022. Understanding scientists' communication challenges at the intersection of

- climate and agriculture. *Plos One*, 17(8), e0269927. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0269927>.
- Haldar, K., Kujawa-Roeleveld, K., Schoenmakers, M., Datta, D. K., Rijnaarts, H. and Vos, J., 2021. Institutional challenges and stakeholder perception towards planned water reuse in peri-urban agriculture of the Bengal delta. *Journal of Environmental Management*, 238. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.111974>.
- Hayes, L., Manyweathers, J., Maru, Y., Loechel, B., Kelly, J., Kruger, H. et al., 2021. Stakeholder mapping in animal health surveillance: A comparative assessment of networks in intensive dairy cattle and extensive sheep production in Australia. *Preventive Veterinary Medicine*, 190. <https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2021.105326>.
- Heryanda, K., Utama, M., Yuliarmi, N. and Purbadhamaja, I., 2022. Analysis of garlic farmers' welfare in buleleng regency, bali, indonesia. *Asian Journal of Agriculture and Rural Development*, 12(4), 271-278. <https://doi.org/10.55493/5005.v12i4.4652>.
- Hryvkivska, O., Karpynskyi, R. and Prystemskyi, O., 2024. Innovative management of the production risks of agricultural enterprises. *Journal of Global Innovations in Agricultural Sciences*, 12(2), 1-17. <https://doi.org/10.22194/jgias/24.1250>
- Humaidi, F. and Soedarto, T., 2022. Competence of agricultural extension an effort to increase agricultural productivity in sidoarjo. *Agricultural Science*, 5(2), 114-123. <https://doi.org/10.55173/agriculture.v5i2.72>.
- Ibrahim, H. and Baqutayan, S., 2023. Policy actors' perceptions of obstacles to sudan's policy of wheat self-sufficiency implementation. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 13(8). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v13-i8/17693>.
- Iqbal, M. and Abbas, K., 2022. The impact of institutional credit on agricultural production in pakistan. *The Pakistan Development Review*, 469-485. <https://doi.org/10.30541/v42i4iipp.469-485>.
- Johnson, N., Mayne, J., Grace, D. and Wyatt, A., 2015. How Will Training Traders Contribute to Improved Food Safety in Informal Markets for Meat and Milk? A Theory of Change Analysis CGIAR Research Program on Agriculture for Nutrition and Health. <https://ssrn.com/abstract=2685229>Electroniccopyavailableat:<https://ssrn.com/abstract=2685229>.
- Khakhula, B., Kostyuk, O., Lanchenko, O., Antonyuk, H. and Homon, O., 2023. Innovative tools for risk management of the production activities of agricultural enterprises in an institutional environment. *Scientific Horizons*, 27(2), 136-153. <https://doi.org/10.48077/scihor2.2024.136>.
- Khalid, A., M., 2023. Creating Synergies among the Sustainable Development Goals and Climate Action: Insights from a Developing Economy. *Sustainability*, 15(17), 13137. <https://doi.org/10.3390/su151713137>.
- Kiptot, E., and Franzel, S., 2019. Stakeholder planning of the institutionalization of the volunteer farmer-trainer approach in dairy producer organizations in Kenya: key

- steps and supporting mechanisms. *International Journal of Agricultural Sustainability* 17(1), 18–33. <https://doi.org/10.1080/14735903.2018.1558581>.
- Kumar, S., Valeri, M. and Shekhar, S., 2021. Understanding the relationship among factors influencing rural tourism: a hierarchical approach. *Journal of Organizational Change Management*. <https://doi.org/10.1108/jocm-01-2021-0006>.
- Latifa, D., Karmaita, Y., Yefriwati, Agustamar, and Yubniati., 2023. Financial analysis of corn farming on the post-gold mine land reclamation technology package in Palaluar Nagari Sijunjung Regency. *Iop Conference Series Earth and Environmental Science*, 1160(1), 012060. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1160/1/012060>.
- Leeuwis, C. and Van den Ban, A., W., 2004. *Communication for Rural Innovation: Rethinking Agricultural Extension*. 3rd Edition. Blackwell Publishing.
- Lin, J., Fiankor, D. and Rosero, G., 2024. Revisiting the role of governance and institutions on agricultural production. *Journal of the Agricultural and Applied Economics Association*, 3(3), 556-571. <https://doi.org/10.1002/jaa2.132>.
- Malau, A., Malau, A. and Simanjuntak, M., 2024. Innovating sustainable agriculture: perspectives from economy and biology professionals. *Jpbi (Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia)*, 10(1), 320-328. <https://doi.org/10.22219/jpbi.v10i1.32587>.
- Mardhiah, N., Tjoetra, A., Marefanda, N., Saputra, J. and Muhammad, Z., 2023. The role of traditional institution (keujreun blang) in realizing the agricultural industrialization in nagan raya, aceh province, indonesia. *Journal of Madani Society*, 2(2), 75-86. <https://doi.org/10.56225/jmsc.v2i2.250>.
- Mucoki, S., Nkurumwa, A. and Maina, S., 2022. Effectiveness of the nakuru farmers' call center in linking farmers to agricultural extension stakeholders in nakuru county, kenya. *International Journal of Agricultural Extension*, 10(3), 491-498. <https://doi.org/10.33687/ijae.010.03.4415>.
- Nalumu, D., Mensah, H., Amponsah, O. and Takyi, S., 2021. Stakeholder collaboration and irrigation practices in ghana: issues, challenges, and the way forward. *Sn Applied Sciences*, 3(5). <https://doi.org/10.1007/s42452-021-04407-9>.
- Nasution, A., Alemina, E., Khairi, A., Handayani, S. and Jasmi, J., 2023. Agroecological challenges in three agricultural development areas in aceh. *Bio Web of Conferences*, 69, 04019. <https://doi.org/10.1051/bioconf/20236904019>.
- Niyazmetov, D., Soliev, I. and Theesfeld, I., 2021. Ordered to volunteer? Institutional compatibility assessment of establishing agricultural cooperatives in Uzbekistan. *Land Use Policy* 108. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105538>.
- Nkurunziza, G., Obedgiu, V. and Kamacoko, O., 2023. The mediating role of stakeholder engagement on the relationship between entrepreneurial orientation and agricultural project performance in developing countries. *OJ*, 12(2), 75-89. <https://doi.org/10.56279/orseaj.v12i2.5>.
- Nurliza, N., Ruliyansyah, A. and Hazriani, R., 2020. Performance behavior of corn smallholders for sustainable cooperative change in west kalimantan. *Agraris*

- Journal of Agribusiness and Rural Development Research, 6(1). <https://doi.org/10.18196/agr.6186>.
- Ochieng, J., Knerr, B., Owuor, G. and Ouma, E., 2018. Strengthening collective action to improve marketing performance: evidence from farmer groups in Central Africa. *Journal of Agricultural Education and Extension* 24(2), 169–189. <https://doi.org/10.1080/1389224X.2018.1432493>.
- Pedersen, I., Ellingsen-Dalskau, L. and Patil, G., 2022. Characteristics of farm based day care services for people with dementia – mapping the stakeholders' views. *Wellbeing, Space and Society*, 3. <https://doi.org/10.1016/j.wss.2022.100073>.
- Phiri, A., Zhao, X. and Chen, Q., 2024. Revitalizing smallholder farming in africa: insights from china's science and technology backyard model. *Research on World Agricultural Economy*, 5(2), 1-13. <https://doi.org/10.36956/rwae.v5i2.1042>.
- Provan, K., G. and Kenis, P., 2008. Modes of Network Governance: A Typology. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(2), 229-252. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum018>.
- Ragkos, A., Hayashi, K., Serra, J., Shibata, H., Michalis, E., Eguchi, S. et al., 2021. Contrasting considerations among agricultural stakeholders in japan on sustainable nitrogen management. *Sustainability*, 13(9), 4866. <https://doi.org/10.3390/su13094866>.
- Rahman, A., 2022. Agricultural transformation in indonesia: evaluation of policy implementation and challenges faced. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 12(2), 691. <https://doi.org/10.26858/jiap.v12i2.50367>.
- Rajala, E., Vogel, I., Sundin, A., Kongmanila, D., Nassuna-Musoke, M. G., Musundire, R. et al., 2021. How can agricultural research translation projects targeting smallholder production systems be strengthened by using Theory of Change?. *Global Food Security*, 28. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2020.100475>.
- Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J. et al., 2009. Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. *Journal of Environmental Management*, 90(5), 1933–1949. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.01.001>.
- Rizkiyah, N., Rachmadhan, A., Hendrarini, H. and Indah, P., 2025. The challenges to revitalizing the upstream sector of the white sugar industry in east java. *Iop Conference Series Earth and Environmental Science*, 1497(1), 012046. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1497/1/012046>.
- Romadi, U., Gunawan, G. and Mohammad, F., 2023. The influence of participatory technology and institutional participation of farmer groups on farmer business development. *Jurnal Penyuluhan*, 19(02), 17-24. <https://doi.org/10.25015/19202341384>.
- Romdon, A., Malik, A., Saeri, M., Triastono, J., Cempaka, I. and Wulanjari, M., 2023. Feasibility of corn farming in jember district, east java. *E3s Web of Conferences*, 444, 02023. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202344402023>.
- Rustinsyah, R., 2019. The significance of social relations in rural development: A case study of a beef-cattle farmer group in Indonesia. *Journal of Co-Operative*

Organization and Management 7(2).  
<https://doi.org/10.1016/j.jcom.2019.100088>.

- S., P., Roessali, W., R, T., Darwanto, D. and Hendarto, M., 2021. Analysis of agricultural sector productivity improvement strategies through cooperative institutions. *International Journal of Ethics and Systems*, 38(1), 20-34. <https://doi.org/10.1108/ijoes-04-2020-0055>.
- Sariati, I. and Hayanti, D., 2023. Transformasi Kelembagaan Petani Menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani Sebagai Model Akselerasi Pengembangan Agribisnis. *Jurnal Suluh Tani* 1(2), 28-34.
- Schwilch, G., Bachmann, F. and de Graaff, J., 2012. Decision support for selecting SLM technologies with stakeholders. *Applied Geography* 34, 86–98. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2011.11.002>.
- Sinaini, L. and Iwe, L., 2020. Agribusiness institutional development model of corn in muna regency, indonesia. *Iop Conference Series Earth and Environmental Science*, 484(1), 012143. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/484/1/012143>.
- Suradisastra, K., 2016. The Role of Institutions in Promoting Sustainable Agricultural Development in Indonesia. *International Journal of Social Science and Humanity*, 6(10), 761-765. <https://doi.org/10.18178/ijssh.2016.V6.738>.
- Tuna, E., A. Martinovska Stojcheska, I. Janeska Stamenkovska and A. Simonovska., 2019. Networks in the macedonian organic production context. *Journal of Agricultural, Food and Environmental Sciences* 73:47- 56.
- Uphoff, N., 1986. *Local Institutional Development: An Analytical Sourcebook With Cases*. Kumarian Press library of management for development. The United States of America.
- Wang, W., Wang, J., Liu, K. and Wu, Y., 2020. Overcoming barriers to agriculture green technology diffusion through stakeholders in china: a social network analysis. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(19), 6976. <https://doi.org/10.3390/ijerph17196976>.
- Wibowo, A., Santoso, A., B. and Dewi, R., A., 2022. Enhancing Stakeholder Engagement in Sustainable Agricultural Practices: A Case Study from Indonesia. *Journal of Agricultural Sciences*, 9(3), 150-160. <https://doi.org/10.5539/jas.v9n3p150>.
- Witinok-Huber, R. and Radil, S., M., 2021. Introducing the Local Agricultural Potential Index: An approach to understand local agricultural extension impact for farmer adaptive capacity and gender equity. *World Development Perspectives*, 23. <https://doi.org/10.1016/j.wdp.2021.100345>.
- Wu, S. and Li, S., 2024. Collaboration to address the challenges faced by smallholders in practicing organic agriculture: a case study of the organic sorghum industry in zunyi city, china. *Agriculture*, 14(5), 726. <https://doi.org/10.3390/agriculture14050726>.
- Yobe, C., Ferrer, S. and Mudhara, M., 2024. Determinants of market choice among agricultural cooperatives in south africa. *Journal of Agribusiness and Rural Development*, 71(1), 103-123. <https://doi.org/10.17306/j.jard.2024.01810>.